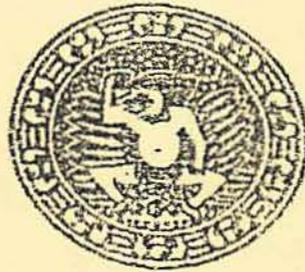


**LAPORAN
HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN SESUAI PRIORITAS
NASIONAL BATCH II**

TAHUN ANGGARAN 2009



TEMA: INTEGRASI BANGSA DAN HAMONI SOSIAL

**NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD):
COLLECTIVE MEMORY MASYARKAT ACEH TENTANG
KONFLIK GAM-RI**

Peneliti:

Eni Sugiarti, S.S., M.Hum.

Dr. Budiawan Purwadi

Mayor Caj Drs. M. Amin Zuhri

Dibiayai oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Proiritas Nasional Nomor: 300/SP2H/PP/DP2M/VII/2009

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
DESEMBER 2009**

**LAPORAN
HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN SESUAI PRIORITAS
NASIONAL BATCH II
TAHUN ANGGARAN 2009**

KKB
KK-2
LP. 209/110
SUG
n



TEMA: INTEGRASI BANGSA DAN HAMONI SOSIAL

**NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD):
COLLECTIVE MEMORY MASYARKAT ACEH TENTANG
KONFLIK GAM-RI**

**Peneliti:
Eni Sugiarti, S.S., M.Hum.
Dr. Budiawan Purwadi
Mayor Caj Drs. M. Amin Zuhri**

Dibiayai oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Proiritas Nasional Nomor: 300/SP2H/PP/DP2M/VII/2009

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
DESEMBER 2009**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

JUDUL : Nanggroe Aceh Darussalam (NAD): Collective Memory Masyarakat Aceh Tentang Konflik GAM-RI

Ketua Peneliti

a. Nama : Eni Sugiarti, S.S., M.Hum.
 b. Jenis Kelamin : Perempuan
 c. NIP : 132206067
 d. Jabatan Fungsional : Lektor
 e. Jabatan Struktural :
 f. Bidang Keahlian : Sejarah Sosial
 g. Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Budaya/ Ilmu Sejarah
 h. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
 i. Tim Peneliti :

No	Nama	Bidang Keahlian	Fakultas/Jurusan	Perguruan Tinggi
1	Dr. Budiawan Purwadi	Perbandingan Agama	Pasca Sarjana perbandingan Agama	Sanatha Dharma Yogyakarta
2.	Mayor Caj Drs. M. Amin Zuhri	Sejarah Militer	Badan Pelaksana Penulisan Sejarah	Dinas Sejarah Angkatan Darat

Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian yang Diusulkan : 2 tahun
 Biaya Total yang Diusulkan : Rp.199.881.000
 Biaya yang Disetujui Tahun: 1 (Pertama) : Rp. 77.500.000

Surabaya, 10 Desember 2009

Mengetahui

Ketua Peneliti



Eni Sugiarti, S.S., M.Hum
 NIP. 132206067

Dekan Fakultas Ilmu Budaya



Drs. Aribowo, M. S.
 NIP. 131453806

Menyetujui
 Ketua Lembaga Penelitian
 Universitas Airlangga



Prof. Dr. Bambang Sektiari L., DEA.
 NIP.131837004

SUMMARY

This research entitled *Nanggroe Aceh Darussalam (NAD): collective memory of the people of Aceh GAM-RI conflict*. This research question about the map of conflict and its relationship with the formation of values to which acehan in the collective memory based on the people of Aceh.

In this study using a social perspective approach. Thus the social memory can be interpreted as a form of shared awareness in the community.

This research produced the Aceh conflict mapping is divided into two, name'y vertical conflicts that occurred during military violence. The second conflict is a shift in post-conflict conflict of horizontal violence. A result from the complete research are: (1) still has a conflict in Aceh area although is not dorect to violence conflict between the TNI/POLRI with amry GAM. (2) A conflict map has become two parts: the first konflikct is vertical conflict between a Center Government from the area with old issue, except distribution, economic and political. The second conflict is horizontal conflict with basic of the conflict from the Aceh society. The issue is a problem that come from MoU Helsinki. (3) Awareness keacehan values have a direct impact on the formation of "imaginary nation" formed from the historical values and social values in Aceh

Key World: Collective Memory, The Aceh Society, GAM-RI Conflict

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian yang berjudul Nanggroe Aceh Darussalam (NAD): Collective Memory Masyarakat Aceh Tentang Konflik GAM-RI telah selesai dilakukan. Penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan beberapa pihak, untuk itu Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian**
- 2. Dikti yang telah memberikan dana Hibah Strategis Nasional Batch II**
- 3. Tim Peneliti yang telah bekerjasama dengan baik**
- 4. Dekan Fakultas Ilmu Budaya yang telah memberi izin kepada peneliti**
- 5. Rakyat Aceh yang telah bersedia memberikan informasi pada peneliti**

Penelitian ini merupakan penelitian tahun I yang akan diteruskan pada penelitian tahun II. Peneliti menyadari masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam penelitian ini maka kritik dan saran sangat diharapkan dari para pembaca dan pemerhati masalah konflik Aceh untuk kesempurnaan hasil penelitian ini.

Surabaya, 29 Oktober 2009

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR ISTILAH.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Hubungan dengan Penelitian Sebelumnya.....	6
2.2 Konsep Nanggroe Aceh Darussalam, Collective Memory dan Konflik.....	7
2.2.1 Konsep Nanggroe Aceh Darussalam.....	8
2.2.2 Konsep Collective Memory.....	12
2.2.3 Konsep Konflik.....	13
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	17
3.1 Tujuan Penelitian.....	17
3.2 Keutamaan Penelitian.....	18
3.3 Kontribusi Penelitian.....	18
BAB IV METODE PENELITIAN.....	20
4.1 Pendekatan.....	20
4.2 Konsep dan Definisi Kerja.....	22
4.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	23
4.3.1 Nara Sumber.....	24
4.3.2 Penentuan Lokasi Penelitian.....	24
4.3.3 Prosedur Penelitian.....	25
4.3.4 Analisis.....	26
4.3.5 Induksi.....	27
4.3.6 Target /Indikator Keberhasilan.....	27
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
5.1 Memebangun Sejarah Negeri Serambi Mekkah.....	28
5.2 Akar Permasalahan :Sumber Daya Alam dan Bibit Konflik GAM.....	37
5.3 Jakarta-Jawa: Pembentukan "Kolonialisme" Versi Masyarakat Aceh...42	42
5.4 Pemetaan Wilayah Konflik.....	48
5.5 Imajiner Nation Aceh dan Nilai Ke-Acehan.....	52
5.5.1 Perang Sabil: Roh Perjuangan Masyarakat Aceh.....	55
5.5.2 Adat Tullah, Adat Mahkamah, Adat Tunah : Nilai-Nilai budaya Masyarakat Aceh.....	58
5.6 Daerah Operasi Militer: Kebijakan dengan Pendekatan Militer.....	60
5.7 SIRA:Referendum Jembatan GAM Menuju Kemerdekaan.....	66
5.8 Nota Kesepahaman (MoU Helsinki) dan Arti Kemerdekaan.....	68
5.9 Tata Pemerintahan di Aceh: Penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh yang Berbasis Syariah.....	70
5.10 Peta Konflik di Aceh: Pergeseran Konflik Vertikal ke Arah Konflik Horisontal.....	76
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	82

DAFTAR PUSTAKA.....	85
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA.....	88
LAMPIRAN.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan yang tenteram dan damai tentunya merupakan harapan bagi semua orang yang tinggal dalam suatu negara dimana semua orang dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara normal, baik dalam kegiatan ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan bernegara. Namun ada sebagian dari saudara kita yang kehidupannya masih jauh dari ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari, yaitu masyarakat yang tinggal di sebagian wilayah di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Mereka dalam kehidupan sehari-harinya selalu berada dalam bayang-bayang kekerasan, baik fisik maupun mental karena dihimpit oleh dua kekuatan bersenjata, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam satu sisi dan TNI-POLRI dari sisi yang lain.

Pada mulanya konflik dimulai dari tiga permasalahan pokok. *Pertama*, pengkerdilan wilayah provinsi menjadi keresidenan. *Kedua*, adanya reorganisasi di tubuh Angkatan Bersenjata di Aceh, dari setingkat Divisi/Tentara Teritorium menjadi Resimen. *Ketiga*, pembagian hasil sumber daya alam yang tidak seimbang antara pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah.

Dalam kondisi yang serba sulit sebagai akibat dari konflik yang berkepanjangan, dalam waktu yang relatif lama, tentunya dapat membawa dampak psikologis yang mendalam bagi masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh yang terlibat konflik tentu mempunyai alasan-alasan yang membuat mereka ikut terlibat di dalamnya. Dalam kerangka pengalaman pribadi yang dimiliki oleh setiap orang di daerah yang lama di dera

konflik tentunya memiliki beragam warna alasan. Hal ini berkaitan dengan cara pandang dan pemaknaan mereka tentang konflik yang terjadi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis kelamin, umur, status pekerjaan, lokasi jauh tidaknya tempat tinggal dengan konsentrasi pasukan TNI-POLRI dan GAM, dan lain sebagainya. Perlakuan aparat TNI-POLRI dan GAM tentu berbeda antara laki-laki dan perempuan, antara petani dengan pedagang atau profesi yang lainnya.

Masyarakat yang tinggal di daerah yang sering terjadi konflik bersenjata dengan masyarakat yang jarang terjadi konflik bersenjata juga mempunyai penilaian yang berbeda pula. Masyarakat yang tinggal di daerah yang menjadi konsentrasi pasukan TNI-POLRI dengan yang tinggal di daerah yang menjadi tempat konsentrasi GAM juga akan terpengaruh dalam sudut pandang atau penilaian terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Berdasarkan realitas itu, tampaknya terdapat sesuatu yang harus dicermati, yakni permasalahan keragaman pengalaman dari masyarakat yang dapat menunjukkan cara pandang mereka terhadap konflik yang terjadi dan harapan-harapan mereka pascakonflik.

Fenomena sosial ini secara nyata menimbulkan berbagai macam dampak psikologis yang mendalam pada sebagian masyarakat. Artinya setiap orang akan memiliki sudut pandang sendiri-sendiri dalam menilai konflik dan pascakonflik atau masa damai setelah MoU Helsinki yang terjadi berdasarkan pengalaman masing-masing individu apa yang mereka ketahui dan mereka alami.

Masyarakat Aceh dalam sejarah awal Republik Indonesia berdiri, dikenal sebagai masyarakat yang mempunyai loyalitas yang sangat tinggi terhadap keberdaan Indonesia. Namun, dalam perjalanan sejarah selanjutnya, ketika loyalitas tersebut "terkhianati" maka loyalitas berbalik menjadi perlawanan dan penentangan yang tidak pernah mati.

Gerakan perlawanan masyarakat Aceh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat diibaratkan sebagai api dalam sekam yang selalu membara yang sewaktu-waktu dapat berkobar dalam skala yang besar.

Semangat perlawanan yang ada pada masyarakat Aceh dibentuk dan dikobarkan dengan menggunakan sarana-sarana berupa ingatan sejarah (*historical memory*) tentang kebesaran dan peranan penting Aceh dalam perjalanan sejarahnya. Karakter masyarakat Aceh yang mempunyai jiwa militer yang tinggi dan diperteguh dengan ideologi Islam menjadikan masyarakat Aceh sebagai masyarakat yang sangat tangguh dalam mewujudkan cita-cita sebagai masyarakat yang merdeka.¹

Masyarakat Aceh mempunyai cara untuk membentuk identitas “ke-Acehan” dan *nation imagines* (Negara Bayangan) yang kuat dengan berdasarkan pada *historical memory* yang terus menerus ada pada masyarakat Aceh, yang senantiasa terwariskan dari generasi ke generasi. Kondisi ini pada akhirnya dapat membentuk wacana sosial masyarakat bahwa Aceh merupakan sebuah *imaginer nation* yang merdeka yang mengendap dalam diri masyarakat Aceh dan menjadi memori kolektif (*collective memory*) masyarakat Aceh yang terus menerus terwariskan secara alamiah dari generasi ke generasi.

Bagaikan sebuah bola salju yang terus bergulir dan layaknya teori domino yang jatuhnya secara kontinyu, memori kolektif masyarakat Aceh terhadap *nation imagines* Aceh Merdeka terus ada dan mengkristal menjadi sebuah ideologi yang membenarkan

¹Sejak Abad ke-13 telah ditemukan adanya kerajaan –pelabuhan yang tumbuh di barat laut Sumatra salah satunya yang terbesar adalah kerajaan –pelabuhan Samudra dan tumbuh pesat pada abad ke - 14. Kerajaan ini dibangun atas dasar agama Islam dan ekonomi dan oraganisasi politik hal ini berkaitan dengan wilayah tersebut merupakan rute perdagangan muslim sehingga daerah tersebut kemudian juga menjadi pusat ilmu pengetahuan terutama Islam dan perdagangan terkemuka. Anthony Reid, 2005, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia) hlm, 1. Sikap Aceh yang menunjukkan penentangan sudah ditunjukkan terhadap Belanda ketika terjadi ekspedisi Aceh pada tahun 1863. Bentuk penentangan lain yang dilakukan oleh Aceh antara lain perlawanan kaum Padri, *Ibid.*, hlm.19.

terhadap setiap tindakan untuk mewujudkan cita-cita "bersama" sebagai bangsa Aceh yang merdeka. Hal ini dikuatkan lagi dengan "sejarah" yang mereka miliki dan yang mereka yakini kebenarannya, yaitu bahwa Aceh tidak pernah dijajah oleh Belanda. Dengan adanya "pemahaman" ingatan sejarah seperti itu maka Belanda tidak berhak untuk menyerahkan wilayah Aceh kepada Indonesia sehingga keberadaannya terlepas dari sejarah Indonesia dan dengan demikian mereka menganggap bahwa negara Indonesia/Jawa adalah negara "penjajah".

Pada saat kita berbicara tentang memori kolektif sebagai sebuah ingatan, maka akan berkaitan erat dengan masalah *meaning* (pemaknaan dan pemahaman) terhadap suatu kejadian. Bagaimana anggota masyarakat Aceh sebagai sebuah entitas sosial memaknai dan memahami kondisi-kondisi dan peristiwa pada masa lampau maupun pada masa sekarang sebagai sebuah ingatan sosial. Konflik yang terjadi di seluruh wilayah Aceh sebagai sebuah kulminasi ingatan-ingatan sosial pada masa lalu dan pemaknaan serta pemahaman terhadap kejadian-kejadian yang terjadi pada masa sebelumnya, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan perlawanan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang diangkat di dalam rencana riset ini yakni:

1. Bagaimana memori kolektif (*collective memory*) dari pihak masyarakat Aceh yang tinggal di daerah Kota Lhokseumawe, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang serta anggota TNI yang bertugas di daerah tersebut pada saat konflik terjadi ?

2. Bagaimana keterkaitan memori kolektif masyarakat Aceh dalam membentuk nilai-nilai *ke-Aceh-an* dan pengaruhnya terhadap konflik yang terjadi dalam waktu yang relatif lama di seluruh wilayah Aceh?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 . Hubungan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang berkaitan dengan masyarakat Aceh telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, antara lain dilakukan oleh Ibrahim Alfian, Nugroho Notosusanto, Jakobi, dan lain sebagainya. Peneliti-peneliti tersebut lebih menfokuskan pada keterlibatan masyarakat Aceh dalam upaya mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan penulis lainnya yang berasal dari luar negeri, Antoni Reid yang merupakan salah satu peneliti Aceh, dalam tulisan yang berjudul *Veranda of Violence* melihat konflik Aceh dari akar permasalahan, yaitu dari kekecewaan yang timbul atau dialami oleh masyarakat Aceh terhadap pemerintah Republik Indonesia atas segala “pengingkaran” peranan penting masyarakat Aceh terhadap kontribusi mereka terhadap Negara Indonesia dengan *memaparkan* berbagai macam peranan Aceh pada masa lalu, yaitu pada masa-masa awal berdirinya Negara Indonesia.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana ingatan-ingatan sosial sebagai ingatan kolektif (*memory collective*) masyarakat Aceh terhadap konflik yang terjadi di daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan mengambil rentang waktu ketika terjadinya konflik kekerasan militer dan pasca-konflik kekerasan militer.

2.2. Konsep Nanggroe Aceh Darussalam, *Collective Memory*, dan Konflik

Kajian memori kolektif (*collective memory*) pertama kali dikenalkan oleh Maurice Halbwachs pada tahun 1925 dalam sebuah tulisan yang berjudul *On Collective memory*,¹ Edited and Translated by Lewis A. Kajian tentang memori kolektif telah banyak dilakukan oleh para Sosiolog dan Antropolog. Halbwachs menggunakan konsep memori kolektif untuk melihat bagaimana gambaran kejiwaan dari sebuah kelompok sosial terhadap suatu kondisi atau kejadian yang telah berlalu dan yang sedang mereka alami.

Dalam kajian tentang ingatan manusia hanya dapat dilakukan secara kolektif, yaitu kumpulan ingatan-ingatan dari banyak individu. Setiap individu dalam sebuah kelompok masyarakat mempunyai ingatan yang berbeda-beda, yang akan berkaitan dengan pola-pola tingkah laku yang mereka lakukan atau yang mereka lihat dan mereka alami. Ingatan manusia merupakan refleksi tentang realitas sosial masa lalu, pemahaman sosial, dan pemahaman budaya manusia-manusia itu sendiri. Tipe pemahaman ini lebih bersifat lokalitas, termasuk dalam hal ini adalah ingatan manusia terhadap benda-benda seperti bangunan, monumen, pendirian suatu bangunan, senjata, maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Memori kolektif akan berkaitan erat dengan masalah *social meaning* (pemaknaan dan pemahaman sosial). Seperti yang dikemukakan oleh Alessandro Portelli² bahwa ingatan manusia berkaitan dengan kemampuan manusia tersebut untuk memahami dan mengerti serta memaknai terhadap objek yang dihadapi. Dalam kajian-kajian Antropologi maupun Sosiologi, ingatan manusia terhadap objek sangat tergantung pada bagaimana

¹Maurice Halbwachs, *On Collective Memory*, edited and translate by Lewis A:

²Allesandro Protelli, "What Makes Oral History Different" dalam Robert Perks and Alistair Thomson. *The Oral History Reader*. London and New York :Routledge, 1998.hlm.67-68.

seseorang akan memaknai terhadap suatu objek yang sangat berkaitan dengan adanya pengaruh intern dari seseorang dan pengaruh dari luar berupa pengaruh lingkungan yang ada di luar manusia itu sendiri seperti pengaruh sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya.

Memori kolektif masyarakat Aceh dibentuk dan terbentuk secara bersamaan dengan perjalanan sejarah (masyarakat) Aceh itu sendiri yang panjang hingga masa sekarang ini. Dalam diri masyarakat Aceh dapat digambarkan sebagai sebuah lembaran-lembaran sejarah yang membentuk dan mengkrystal. Dari masing-masing individu akhirnya menjadi kumpulan bagian dari lembaran hidup masyarakat Aceh yang beraneka macam sesuai dengan pengalaman pribadi masing-masing masyarakat Aceh, dari dulu sampai sekarang, dari masa sebelum konflik hingga masa pasca-konflik.

Sebagaimana masyarakat di wilayah-wilayah lain di wilayah Nusantara, kesadaran sejarah akan menjadi bagian yang tak terpisahkan perjalanan suatu masyarakat itu sendiri. Masyarakat Aceh dibentuk sebagai masyarakat yang mempunyai jiwa militan sebagaimana seorang militer atau syuhadak yang siap untuk mati syahid dan mempunyai solidaritas lokal yang tinggi. Hal ini mereka wujudkan dengan tulus ikhlas tatkala mereka terpanggil untuk mendukung dengan segala daya dan upaya yang mereka miliki terhadap kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya Aceh muncul di atas panggung sejarah Indonesia dan memainkan peranan penting dalam pembentukan Negara Indonesia pada masa-masa revolusi. Hal ini terbukti dari peran penting masyarakat Aceh dalam memberikan sumbangan tenaga dan harta benda guna mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak dapat dipungkiri

bahwa sampai masa sekarangpun keberadaan Aceh sebagai entitas sosial, politik, dan ekonomi masih sangat penting dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkembangan berbangsa dan bernegara pada masa-masa selanjutnya terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan antara "Jakarta" dengan masyarakat Aceh. Kondisi ini mengarahkan masyarakat Aceh menjadi masyarakat yang mempunyai *sence imagines of nation* yang sangat kuat dan terpisah dari jaringan-jaringan wilayah lainnya di Nusantara sebagai bentuk ketiadaan inter-koneksi dengan wilayah lain di Nusantara. Hal ini menjadikan timbulnya adanya aksi-aksi sosial yang berorientasi pada nilai (*value*).

Smelser mengemukakan bahwa setiap masyarakat terdapat komponen-komponen aksi sosial yang berorientasi nilai yang terdiri dari:

1. Nilai-nilai sosial
2. Norma-norma dan aturan-aturan yang ada dan mengikat setiap anggota untuk bersikap dan bertindak
3. Mobilisasi motivasi perseorangan untuk aksi yang teratur dalam peran-peran kolektivitas
4. Fasilitas situasional atau informasi, ketrampilan, alat-alat, dan rintangan dalam mencapai tujuan-tujuan yang konkrit.³

Akibat "kerapuhan" hubungan dengan "Jakarta" membuat wacana tentang Indonesia, sebagai imajiner bersama sangat minim dalam ingatan sosial di masyarakat Aceh. Hal ini membuat masyarakat Aceh tentang pemahaman terhadap "Indonesia" terpinggirkan dan digantikan oleh wacana tentang "ke-Aceh-an" sebagai *nation* menyeruak dalam ingatan orang Aceh. Akhirnya *sence of nation* tentang Aceh terbawa dan teraplikasikan dalam setiap gerakan-gerakan yang mereka lakukan dengan membawa

³ Neil Smelser, *Theory of Collective Behavior*, New York: The Free Press, 1962, hlm. 9.

cita-cita “negara Aceh yang merdeka”. Cita-cita untuk merdeka semakin lama semakin tertanam kuat dalam ingatan sosial masyarakat Aceh, apalagi mereka menarik jauh ke belakang, yaitu mengambil akar dari sejarah Aceh pada masa lampau (*historical collective memory*) yang penuh kedengan kegemilangan.

Seiring dengan adanya kesadaran kolektif yang terus tumbuh dan berkembang yang terbangun atau dibangun oleh masyarakat Aceh maka identitas sosial masyarakat Aceh semakin kuat terbentuk dan terakumulasi. Pada saat proses interaksi sosial, setiap individu atau kelompok selalu menampilkan peran dan identitas diri. Perilaku individu atau kelompok dalam proses interaksi dipengaruhi oleh harapan peran dan identitas diri.⁴

Dengan demikian *historical memory* sebagai kelampauan dapat dianggap sebagai contoh atau gambaran tentang apa yang terjadi pada hari ini. Kelampauan dalam diri masyarakat sebagai pengalaman yang akan terus mengalir dalam ingatan setiap individu dalam suatu masyarakat. Peristiwa masa lampau dipandang sebagai *willed event*, yaitu sesuatu terjadi karena manusia berpikir, percaya, memutuskan, merencanakan, dan bertindak. Dalam hal ini suatu peristiwa dianggap sebagai konsep sejarah yang telah dihayati menjadi bagian dalam dari kesadaran bersama.⁵ Kesadaran bersama yang ada sebagai sebuah “bangsa” yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berakar dari adanya kesadaran akan ingatan tentang sejarah masa lampau dan menjadi ingatan bersama pada masa-masa selanjutnya. Hal itu selanjutnya mengkrystal dalam tindakan perlawanan terhadap keberadaan atau hegemoni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

⁴G.H.Mead, *Mind, Self and Society*, Chicago: Chicago University Press, 1934, hlm. 15.

⁵Taufik Abdullah, “Dari Sejarah Lokal ke Kesadaran Nasional: Beberapa Problematik Metodologis” dalam T. Ibrahim (dkk), *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989, hlm.235.

Dalam kerangka tinjauan sosiologis, di dalam proses bernegara dalam masyarakat terjadi pertukaran sosial (*social exchanges*). Berdasarkan kerangka teori *Social Exchanges* menurut Peter Blau⁶ menyatakan bahwa di dalam dinamika dan mekanisme masyarakat terjadi interaksi sosial (*social interactions*) yang di dalamnya terkandung pertukaran sosial (*social exchanges*). George Simmel⁷ dalam kerangka interaksi sosial menawarkan konsep *stranger* bahwa kedatangan *stranger* itu bisa berdampak positif maupun negatif bagi warga lokal (setempat).

Namun ketika proses pertukaran dalam interaksi sosial masyarakat dianggap tidak seimbang dan ada pihak yang merasa dirugikan maka akan terjadi konflik. Dalam hal ini interaksi antara "Jakarta" dan Aceh dianggap merugikan pihak Aceh, dimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Jakarta dianggap *stranger* yang telah merugikan Aceh sehingga efeknya adalah memicu terjadinya konflik di Aceh. Dalam satu sisi Jakarta menganggap bahwa Aceh tidak loyal terhadap "Pusat", sedangkan dalam sisi lainnya Aceh menganggap "Jakarta" telah berbuat sewenang-wenang dengan membuat keputusan yang tidak dapat diterima dan melukai perasaan masyarakat Aceh.

2.2.1 Konsep Nanggroe Aceh Darussalam

Nanggroe Aceh Darussalam, sebutan bagi wilayah teritorial Aceh, yang daerahnya terletak di ujung Utara pulau Sumatera, pada masa sekarang merupakan wilayah konflik antara pemerintah Republik Indonesia dengan kelompok Gerakan Aceh

⁶Peter Blau, *Exchange and Power in Social Life*, New York: Wiley, 1964, hlm. 88-97.

⁷Kurt Wolff Trans. *The Sociology of George Simmel*. New York: Free Press, 1950. pp. 402-408
Dalam file:///C:/INTERNET/NETSCAPE/STRANGER.

Merdeka atau *Aceh Sumatra National Liberation Front* (ASNLF)⁸ yang dipimpin oleh Hasan Tiro bertujuan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Dalam riset ini, pengertian Nanggroe Aceh Darussalam sebagai suatu entitas ruang dan waktu yang mewadahi dinamika masyarakat Aceh dalam membentuk ingatan sosial mereka tentang sebuah Negara merdeka.

2.2.2. Konsep *Collective Memory*

Collective memory dalam riset ini merupakan rekaman ingatan sosial yang tumbuh pada masyarakat Aceh, yang mereka ketahui dan mereka alami, tentang konflik yang berkecamuk di Aceh. Ingatan sosial beriringan dengan melihat dan pengalaman pribadi dalam proses pembentukan identitas masyarakat Aceh dengan identitas “ke-Acehan” dan akhirnya membentuk adanya kesadaran bersama. Kesadaran bersama masyarakat Aceh diwujudkan dalam bentuk *collective action* dengan wujud perjuangan membentuk “*nation*” yang terlepas dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan mencapai Aceh Merdeka ini masih terus mengalir atau bergulir dalam ingatan setiap masyarakat Aceh hingga sampai saat sekarang ini.

Sikap dan perilaku seseorang individu atau kelompok dapat dimaknakan sebagai suatu pendorong yang ada dalam jiwa yang bersangkutan dalam memberikan reaksi terhadap berbagai aksi yang timbul di lingkungan sekitarnya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Sikap seseorang individu biasanya dipengaruhi oleh tiga

⁸ Hasan Di Tiro kemudian mengangkat dirinya sebagai Ketua *Aceh Sumatra National Liberation Front of Aceh Sumatra* seperti yang tertuang dalam *Declaration of Independence Aceh 4 Desember 1976*. Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, *Sejarah TNI AD: 1974-2004*, Jakarta: Dinas Pembinaan Mental AD, 2005, hlm.129.

⁹ Kodam Iskandar Muda, *Kodam Iskandar Muda (Sejarah dan Pengabdianannya)*, Banda Aceh: Dinas Penerangan Kodam Iskandar Muda.

faktor utama¹⁰ yakni kondisi fisik seseorang, jiwa seseorang, dan sistem norma/nilai budaya yang ada dalam masyarakatnya. Hal seperti itu dikatakan oleh Toynbee sebagai *challenge and resport*, dimana masyarakat Aceh menganggap bahwa kebijakan pemerintah Pusat yang merugikan mereka dianggap sebagai “tantangan” yang selanjutnya menimbulkan “respon”, yang berupa perlawanan.

Menurut Feichtinger, memori kolektif (*collective memory*) sebagai ingatan sosial yang merupakan pengertian akan sosial budaya sebuah individu secara kolektif.¹¹ Memori merupakan simpanan informasi yang terekam oleh masing-masing individu kolektif yang dikaitkan dengan pengalaman dan struktur nilai-nilai tertentu.¹² Memori merupakan rekaman ingatan terhadap suatu kondisi dimana ingatan bukanlah sebuah media penyimpan fakta yang bersifat pasif melainkan berproses aktif dari sebuah pengertian. Dalam konteks *historical memory*, rekaman ingatan tersebut berfungsi sebagai penjaga masa lalu.¹³ Berdasarkan teori-teori tersebut, maka memori kolektif masyarakat Aceh akan konflik merupakan pengertian sosial terhadap kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Aceh terhadap realitas sosial yang terjadi di Aceh.

2.2.3. Konsep Konflik

Proses interaksi sosial akan memungkinkan terjadinya suatu konflik. Adapun arti kalimat “konflik”, menurut Kamus Bahasa Indonesia kontemporer adalah sebagai bentuk

¹⁰Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Edisi ke dua puluh, Jakarta: Penerbit Jambatan, 2004, hlm. 388.

¹¹Prawiwo, “Ship Memory” dalam dalam LIPI, *Sejarah dan Dialog Peradaban; Persembahan 70 tahun Prof. Taufik Abdullah*, Jakarta: LIPI Press, 2006, hlm. 1063.

¹²Allesandro Protelli, “What Make Oral History Different”, dalam Robert Perk and Alistair Thomson, *The Oral History Reader*, London and New York: Routledge, 1998.

¹³*Ibid.*



2011
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

adalah perselisihan, pertempuran, bentrokan, dan pertentangan.¹⁴ Konflik sosial sebagai hasil dari kesadaran pencarian dari nilai-nilai tertentu. Dalam pengertian yang luas dari kata konflik adalah kesadaran persaingan dan para pelaku datang dengan menempatkan diri sebagai lawan, pelawan atau musuh. Individu sebagai anggota masyarakat selalu melebar atau menyempit dari sejumlah tuntutan masyarakat untuk kehidupan, kemenangan dari peristiwa, kepemilikan, dan perbedaan.¹⁵

Menurut Maurice Durverger, konflik dibedakan menjadi dua. *Pertama* adalah konflik horisontal, sebagai konflik antara kelompok-kelompok dengan posisi yang sama atau yang setara seperti konflik antar keluarga, suku-suku, provinsi, konflik antar kelompok dalam masyarakat dalam suatu wilayah atau negara. *Kedua* adalah konflik vertikal, sebagai bentuk konflik antara kelompok-kelompok dengan posisi yang tidak sama atau yang tidak setara dalam posisi yang ada di bawah dengan yang ada di atas atau sebaliknya, seperti pemerintahan pusat dengan daerah, kelompok minoritas dengan mayoritas, dan lain sebagainya dalam suatu wilayah atau negara. Berhubungan dengan kedua jenis konflik yang ada, maka riset ini akan diarahkan pada bentuk konflik vertikal yang terjadi di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yaitu antara pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah.

Sikap dan perilaku seseorang individu atau kelompok dapat dimaknakan sebagai suatu pendorong yang ada dalam jiwa yang bersangkutan dalam memberikan reaksi terhadap berbagai aksi yang timbul di lingkungan sekitarnya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Sikap seseorang individu biasanya dipengaruhi oleh tiga

¹⁴ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 1991, hlm. 654.

¹⁵ Edwin R.A Sellgman (ed), *Encyclopaedia of The Social Sciences*, New York: Mac Millan. 1954.

faktor utama¹⁶ yakni kondisi fisik seseorang, jiwa seseorang, dan sistem norma/nilai budaya masyarakatnya.

Perspektif sebagai konstruksi sosial merupakan proses sosial (*historisisme*) dari kenyataan masyarakat atau merupakan proses dialektika kenyataan sosial. Menurut Landerach,¹⁷ pandangan konstruksionis menyatakan bahwa manusia bertindak pada basis suatu pemaknaan yang ada pada mereka. Pemaknaan diciptakan melalui pengetahuan bersama dan terakumulasi. Konflik sosial politik juga didorong oleh pemaknaan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik. Perspektif konstruksi sosial menurut Landerach terbagi dalam tujuh asumsi yaitu:¹⁸

1. Konflik sosial dipahami sebagai hal yang alamiah, sesuatu pengalaman umum yang hadir di setiap hubungan dan budaya.
2. Konflik dipahami sebagai kejadian konstruksi kebudayaan secara sosial. Konflik tidak hanya terjadi pada diri seseorang tetapi orang merupakan peserta aktif dalam menciptakan situasi dan interaksi yang mereka ambil dari pengalaman sebagai konflik.
3. Konflik muncul melalui proses interaktif yang melandaskan pada pencarian dan penciptaan makna bersama.
4. Proses interkatif disempurnakan melalui dan diakarkan sebagai persepsi manusia, interpretasi, ekspresi, dan niatan-niatan yang semuanya tumbuh dari dan berputar kembali kekesadaran umum mereka (*common sense*).

¹⁶Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Edisi kedua puluh, Jakarta: Penerbit Jambatan, 2004, hlm. 388.

¹⁷ John Landerach. *Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Culture*, Syracuse New York: Syracuse University Press, 1996.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 9-10.

5. Pemaknaan muncul sebagaimana manusia meletakkan diri mereka sendiri dan sesuatu yang sosial seperti situasi, kejadian, dan tindakan di dalam pengetahuan terkumpul mereka.

6. Kebudayaan berakar di dalam pengetahuan bersama dan skema-skema dan digunakan oleh sekelompok orang untuk merasakan, menafsirkan, mengekspresikan, dan merespon kenyataan sosial di sekitar mereka.

7. Pemahaman hubungan konflik sosial dan budaya tidak hanya satu pertanyaan sensitif dari kesadaran tetapi lebih jauh petualangan yang dalam dari penemuan dan penggalian arkeologis dari pengetahuan umum bersama dari sekelompok orang.

Di dalam hal ini, konflik yang terjadi di Aceh sebagai bentuk akumulasi dari persepsi konstruksi sosial yang kemudian menjadi sebuah pemaknaan yang mempunyai daya gerak untuk tidakan-tindakan dalam memperjuangkan gerakan kemerdekaan Aceh.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian, pada akhirnya diharapkan akan dapat memberikan *output* yang signifikan sesuai dengan permasalahan yang ditelitinya. Dalam penelitian ini, mencoba untuk menggali memori kolektif masyarakat Aceh tentang konflik yang menderanya dalam jangka waktu yang relatif lama. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mencoba untuk melakukan identifikasi pemahaman masyarakat Aceh dari berbagai kalangan masyarakat dan wilayah terhadap konflik yang terjadi antara GAM-RJ.
2. Mendokumentasikan memori kolektif masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat Aceh, secara komprehensif dan konkrit tentang pengalaman pribadi dari masyarakat Aceh, sesuai dengan pemetaan atau pergeseran arah konflik, dan bagaimana sudut pandang mereka tentang konflik yang terjadi antara GAM-RJ
3. Secara umum hasil dari pendokumentasian tentang ingatan kolektif masyarakat Aceh, termasuk elit GAM, dan anggota TNI yang nantinya akan dapat dijadikan sebagai sumber referensi atau *blue print* bagi Pemerintah dan TNI serta elite GAM dalam pembuatan strategi penyelesaian konflik secara permanen yang berbasis pada kepentingan masyarakat Aceh. Dengan kata lain hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai "Jalan Alternatif" untuk penyelesaian

konflik sosial laten di Aceh karena sampai sekarang masalah konflik masih belum dapat diselesaikan secara tuntas.

3.2. Keutamaan (Urgensi) Penelitian

Keutamaan dari penelitian ini terletak pada tema yang diembannya yaitu tentang ingatan-ingatan kolektif masyarakat Aceh tentang konflik yang telah melingkupinya, yang menurut pandangan awal peneliti terkait dengan adanya *historical memory*, *social consciousness*, dan *identity* serta *sence of nation* masyarakat Aceh. Oleh karena itu di dalam memahami masalah konflik sosial laten yang terjadi di Aceh diperlukan adanya pendekatan yang humanis dengan menekankan pada pemahaman dan pemaknaan sosial yang menjadi wacana yang telah berkembang dalam ingatan-ingatan kolektif masyarakat.

Adapun harapan dari (hasil) penelitian yang mengangkat tema ini dapat memberikan andil atau kontribusi untuk membantu upaya Pemerintah dan berbagai elemen terkait lainnya, seperti TNI, elit GAM, Pemerintah Daerah serta tokoh Agama dan masyarakat, dapat menyelesaikan konflik laten yang ada di Aceh secara permanen dengan pendekatan yang humanis dan berbasis pada kepentingan masyarakat Aceh, terutama dengan melihat/mendengar keinginan-keinginan yang terekam dalam ingatan-ingatan masyarakat Aceh.

3.3. Kontribusi Penelitian

Seperti telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang konkrit dalam membantu upaya Pemerintah dan elemen terkait lainnya

untuk menyelesaikan konflik laten yang ada di Aceh secara permanen dengan pendekatan yang humanis, yang berbasis pada kepentingan masyarakat Aceh, dengan melihat/mendengarkan keinginan-keinginan yang terekam dalam ingatan-ingatan masyarakat Aceh. Dengan kata lain (hasil) penelitian ini dapat digunakan sebagai *blue print* atau cetak biru penyelesaian konflik yang terjadi di NAD secara berlanjut dan berkesinambungan dan akhirnya perdamaian dapat tercipta secara permanen, dengan “sentuhan” yang manusiawi karena berbasis pada kepentingan yang berasal dari suara hati masyarakat Aceh.

Lebih jelasnya, penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan, “adakah kemungkinan bahwa di dalam rekaman ingatan kolektif sosial masyarakat Aceh menyeruak keinginan sosial yang nantinya dapat dijadikan sebagai batu pijakan oleh Pemerintah dan elemen terkait lainnya dalam membuat dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan penyelesaian konflik Aceh dimana dalam tataran formal telah terjadi perdamaian namun dalam kenyataan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, secara laten, konflik masih berpotensi untuk meletup/berkobar dan dapat berkembang lagi secara luas?”.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Pendekatan

Penelitian tentang *collective memory* masyarakat Aceh ini menggunakan pendekatan Sosiologi, Antropologi, dan Sejarah. Pendekatan secara Sosiologis digunakan dalam penelitian ini karena untuk menganalisa perubahan sosial dan *collective behavior*. Adapun pendekatan secara Antropologis dipakai untuk menganalisa ide, ideologi, dan *mind set* yang berkembang dalam suatu masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat Aceh. Sedangkan pendekatan sejarah digunakan untuk memahami dan menganalisa sejarah masyarakat Aceh, baik secara individu maupun kelompok, yang membentuk adanya kesadaran sejarah atau *historical confidence*.

Ketiga pendekatan ini digunakan untuk melihat dan memahami ingatan sejarah masyarakat tentang ke-Aceh-an serta akan merekonstruksi dan menjadi ingatan sosial yang pada akhirnya akan membentuk identitas sosial dan mengkristal menjadi sebuah ideologi yang mempengaruhi terhadap perilaku (*collective behavior*). Ingatan sejarah (*historical memory*) dapat membentuk semacam ingatan sosial yang terus ada pada masyarakat dan menjadi "pelumas" bagi terjadinya tindakan-tindakan sosial. Suatu perbuatan terjadi tidak dapat dilepaskan dari bagaimana individu maupun kelompok sosial menamai dan memahami kondisi yang mereka hadapi.

Riset yang mencoba memahami masalah konflik Aceh dengan menggunakan ingatan sosial (*memory collective*) dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengurai

kekusutan konflik yang terjadi karena munculnya perilaku sosial tidak dapat dilepaskan dari tujuan masyarakat yang akan selalu hidup dalam setiap ingatan masyarakatnya.

Berkaitan dengan *memory collective* tersebut ada dua hal pokok yang berperan yaitu *event* dan *meaning*.¹ Ingatan sosial akan lahir dari adanya realita sosial yang kemudian dimaknai dalam kerangka sosial masyarakatnya.

Maurice Halbwachs² dengan istilahnya “memori kolektif”, menegaskan bahwa mengenang bukan semata-mata sebagai tindakan perorangan, melainkan terutama sebagai fenomena sosial. Kenangan ditandai lewat ketertataan simbolis sebuah kelompok atau masyarakat, artinya lewat pemahaman waktu dan ruang secara kolektif dimana konsep dasar berfikir dicetak serta distrukturkan. Senada dengan yang dikemukakan oleh Maurice Halbwachs, Pierre Nora melihat memori sosial merupakan tenaga penggerak bagi perilaku sosial. Trauma masyarakat dapat menjadi sebuah ingatan yang sangat membekas yang sewaktu-waktu akan dapat meledak dalam bentuk penentangan.³

Di dalam konsep Max Weber, suatu masyarakat ada konsep *meaning* yang bisa bermakna sebagai *common value* (Herbert Spencer).⁴ Suatu tindakan dari seorang warga masyarakat tidak bisa lepas dari makna *meaning* yang berlaku di dalam masyarakatnya. Sementara itu dapat dipastikan bahwa tindakan seorang individu memiliki tujuan-tujuan tertentu (*end*).⁵ Dalam upaya memahami suatu tindakan juga memahami tujuan tindakan atau pun makna tindakan. Jadi, di dalam kerangka memahami tindakan (*action*)

¹ Atilano Protelli, “What makes Oral History Different”, dalam Robert Perks and Alistair Thomson, *The Oral History Reader*, London and New York, Routledge, 1998. hlm.67-68.

² Maurice Halbwachs, *On Memory Collective*, Edited and Translated by Lewis A.

³ Stephanie L Kimbro, *Les Lieux de Memoire: French Collective Memory Of World War II In The Events of May 1968*, Miami: University of Oxford, Ohio, 2000.

⁴ Herbert Spencer, *Principles of Sociology* dalam file://CI/INTERNET/NETSCAPE/SPENCER.H. Yang dikutip dari Robert Bierstedt, *The Making of Society*. New York: Modern Library, 1959, pp. 253-273.

⁵ Tipe-tipe *social action* Max Weber antara lain *traditional action*, *affectual action*, *value-rational action*, *end-rational action*, dan *combinations*. Lihat Max Weber, *Basic Concepts of Sociology* dalam file://I/INTERNET/NETSCAPE/BASIC_CONCEPT1.html

masyarakat tidak akan mungkin bila tidak memahami konteks *meaning/value* ranah budaya masyarakatnya. Weber dalam kerangka upaya memahami itu menawarkan metode pemahaman (*verstehen*) dengan *interpretative*.⁶

4.2. Konsep dan Definisi Kerja

Memory collective dalam penelitian ini dimaknai sebagai ingatan kolektif sosial yang ada dalam ingatan masyarakat Aceh tentang konflik antara GAM-RI. Ingatan Sosial ini berdasarkan pada perspektif masyarakat Aceh yang terlibat sebagai anggota GAM maupun yang tidak terlibat sebagai anggota GAM tetapi terlibat langsung dalam peristiwa konflik. Selain itu ingatan sosial juga yang ada pada anggota-anggota TNI yang pernah terlibat dalam konflik tersebut.

Berkaitan dengan masalah kolektif memori terdapat beberapa hal penting yang mempengaruhi ingatan seseorang dan masyarakat.⁷ Dalam penelitian ini akan menekankan pada keterkaitan hal-hal dengan ingatan antara lain:

1. Peranan dan kedudukan informan dalam konflik; hal ini berkaitan dengan hubungan informasi yang disampaikan oleh seorang informan dengan posisi seseorang dalam konflik, apa dia sebagai *main actor*, *co-actor*, *follow traveler*, *figurant*, dan peran lainnya.
2. Pendidikan informan; hal ini menjadi hal yang penting berkaitan dengan pengelompokan sosial di dalam masyarakat seperti di Aceh. Kelompok dengan

⁶*Ibid.*

⁷Ratna Saptasari. "Writing Indonesian Histories: Reflection on 'Alternative' Historiographies. dalam *Workshop Rethinking Indonesian Historiography*, Yogyakarta 12-24 Desember 2005. Tentang hal-hal yang mempengaruhi ingatan individu dan ingatan sosial dikaji lebih mendalam dalam Olick, Jeffery K., ed. *States Memory, Continuities, Conflict and Transformation in National Retrospection*, Durham : Duke University Press, 2003.

pendidikan rendah, menengah, dan tinggi yang mempunyai perbedaan sudut pandang tentang konflik.

3. Umur informan; hal ini berkaitan dengan pencarian informasi dengan menekankan pembagian lintas generasi terutama untuk mendapatkan pola antar generasi tua yang terlibat dalam GAM dengan generasi selanjutnya.
4. Kepentingan informan dalam konflik; hampir sama dengan kedudukan dalam konflik namun poin tentang kepentingan informan dalam konflik mempunyai indikasi yang lebih dalam yaitu untuk melihat kontribusi seseorang dalam konflik dan bagaimana kontribusi konflik terhadap seseorang atau kelompok sosial.
5. Ikatan sosial yang ada; keterlibatan seseorang dalam konflik, apakah berkaitan dengan trauma keluarga korban, pengalaman pribadi atau dampak dari kejadian di lingkungannya.

4.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Riset ini dalam melakukan pengumpulan data menggunakan metode observasi, pengamatan terlibat (*participant observation*),⁸ dan wawancara mendalam (*in depth*). Analisis data dengan menggunakan metode interpretatif, tepatnya adalah metode *cultural domain analysis*,⁹ yakni memahami aspek *meaning* ataupun *value* dalam budaya suatu masyarakat.

Sumber data atau informan masyarakat Aceh dalam riset dengan menggunakan kategori peta wilayah konflik dan pengelompokan sosial. Pengumpulan data dilakukan

⁸Danny L. Jurgensen, *Participant Observation, A Methodology for Human Studies. Applied Social Research Methods Series Volume 15*, Newbury Park, London, New Delhi: Sage Publications, 1989, hlm. 12, 19.

⁹James P. Spradley, *Participant Observation*, Florida: Holt, Rinehart and Winston Inc., 1980, hlm. 85-91.



melalui metode pengamatan/observasi, partisipasi terlibat, dan wawancara mendalam (*in depth*) terhadap informan. Wawancara dilakukan dengan wawancara bebas terhadap informan, dalam hal ini peneliti melakukan empati dan mencoba masuk ke dalam alam pikiran informan atau menjadi *being native* (seakan-akan sepaham dengan informan). Hal itu dilakukan semata untuk mempermudah melakukan pendekatan terhadap informan demi memperoleh pemahaman yang komprehensif, objektif, dan akurat.

4.3.1. Nara Sumber

Dalam riset ini, informan dipilih secara random dengan menggunakan teknik random sampling secara proposional dari berbagai kalangan masyarakat dan juga yang bertempat tinggal di berbagai wilayah di provinsi NAD, antara lain di Lhokseumawe, Pidie, Idi Rayeuk, Biren Beyeun, Peurlak, dan Manyakpayet, Kua'a Langsa, Matang Ara, Nursalam, Langsa, Seinebuk Tuha, Alur Minyak, Alur Meku, Kutacane, dan lain sebagainya dengan pembagian Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang.

Informan dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus seperti jenis kelamin, umur, dan lokasi tempat tinggal, serta kelompok sosial dimana mereka kemungkinan akan diwawancarai, diobservasi, dan lain sebagainya.

4.3.2. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih yakni masyarakat Aceh di wilayah-wilayah antara lain Lhokseumawe, Pidie, Aceh Tamiang, Peurlak, Idi Rayeuk, Biren Beyeun (Aceh Timur) dan Langsa dan Kota Cane dengan kriteria jauh-dekatnya dengan pusat-pusat

konflik. Daerah-daerah ini terbagi dalam tiga kategori. Pemetaan daerah konflik mengikuti alur dan paradigma militer dengan melihat pada banyaknya intensitas konflik.

Adapun pemetaan konflik yang terjadi di provinsi NAD dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kategori daerah Hitam/Merah. Daerah ini merupakan daerah yang mempunyai tingkat konflik yang tinggi, yaitu daerah-daerah dalam penelitian yang termasuk daerah Hitam adalah daerah Peuriak, Idi, Biren Beuyeun, dan Lhoksumawe.
- b. Kategori daerah Abu-Abu, dalam penelitian ini yang termasuk daerah abu-abu adalah Aceh Tamiang Kota, dan Langsa kota, namun di daerah ini juga terdapat daerah yang merupakan basis GAM yang juga masuk dalam daerah Hitam/Merah seperti Raja Tuha, Seinebok Tuha, Mayakpayet, dan Gunung Masjid Mayakpayet.
- c. Kategori daerah Putih, yaitu daerah -daerah dimana pengaruh konflik GAM – RI relatif kecil, dalam penelitian ini adalah daerah Kutacane karena di wilayah ini pengaruh konflik tidak begitu terasa.

4.3.3. Prosedur Penelitian

Setelah proposal penelitian disetujui, pertama kali yang dilakukan oleh Tim Peneliti adalah melakukan revisi terhadap proposal yang ada, terutama mengenai instrumen penelitian sampai menjadi operasional dan layak digunakan untuk penelitian ke lapangan. Pada Tahap pertama ini dibarengi dengan terjun ke lapangan dengan melakukan observasi ke lokasi yang hendak dituju untuk mencari bahan masukan bagi perbaikan operasional konsep dan instrumen.

Tahap kedua, yakni tahap pengumpulan data yang dilakukan/berlangsung pada bulan kedua hingga bulan keenam (September, Oktober, November, Desember, 2009). Semua anggota tim terlibat dalam tahap ini, dua orang bersama para pembantu peneliti terjun ke lokasi penelitian. Di dalam proses pengumpulan data ini, Tim Peneliti juga sudah melakukan analisis.

Pada Tahap ketiga, yakni melakukan analisis data yang didapat (reduksi, penyajian, dan verifikasi) yang berlangsung pada bulan keenam sampai kedelapan. Selanjutnya pada Tahap keempat yakni pembuatan laporan, yang dilakukan pada bulan kesembilan. Pada Tahap kelima, yaitu melakukan presentasi (bila diperlukan) pada bulan kesepuluh atau sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Hibah Kompetitif 2009.

Pada tahap pengumpulan data, indikator capaian adalah dapat mengidentifikasi informan yang akan dijadikan sebagai narasumber untuk wawancara dengan pengklasifikasian yang sesuai dengan variabel-variabel penelitian. Dengan demikian data yang diperoleh merupakan data-data yang masih kasar/mentah.

4.3.4. Analisis

Sebelum data dianalisis, dilakukan proses reduksi data, yakni proses pemilihan, pemusatan perhatian/penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.¹⁰ Berdasarkan data yang telah direduksi

¹⁰Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi dan Mulyarto, Jakarta: UI Press, 1992, hlm. 15-21. Dalam buku ini, analisis data meliputi: reduksi, penyajian, dan analisis/verifikasi data. Reduksi juga dimaknakan sebagai suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

itu, maka dilakukan proses analisis/verifikasi dengan menggunakan metode interpretasi suatu metode pemahaman/*verstehen* secara interpretatif terhadap *meaning/value* sosio-kultural terhadap masyarakat Aceh.

4.3.5. Induksi

Induksi atau proses menyimpulkan didasarkan pada data dan analisis yang diperoleh, baik data dari hasil observasi, wawancara, partisipasi, maupun data hasil dokumentasi. Di dalam riset ini, induksi dapat dilakukan secara terus menerus, mulai dari mengumpulkan data hingga pada waktu tahap analisis data.

4.3.6. Target/Indikator Keberhasilan

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, target yang akan dicapai dalam riset ini yakni menemukan suatu bentuk pemahaman dan penjelasan/eksplanasi secara komprehensif tentang konflik yang terjadi di Aceh sebagai bentuk konflik sosial laten berdasarkan harapan-harapan masyarakat Aceh, yang berakar dari ingatan-ingatan sosial masyarakat terhadap masa lalunya.

Selanjutnya, penemuan diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyelesaian kedua belah pihak yang bertikai antara Pemerintah dan masyarakat Aceh. Dan pada akhirnya diharapkan bahwa hasil riset ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi pemerintah Republik Indonesia untuk membuat kebijakan-kebijakan yang memperhatikan aspirasi dari masyarakat Aceh, khususnya dari masyarakat yang mengalami konflik secara langsung.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam memahami gejala yang dialami oleh masyarakat Aceh, terlebih dahulu hendaknya kita dapat memahami sejarah panjang yang melingkupi masyarakat Aceh dari dulu hingga masa sekarang ini. Semua akar permasalahan yang ada di Aceh tidak dapat dilepaskan dari bergulirnya perjalanan sejarah Aceh dari masa lalu hingga masa sekarang ini. Dengan demikian ketika kita berbicara Aceh kita harus memahami sejarah Aceh karena disitulah pola pikir masyarakat Aceh akan tergambarkan.

Aceh yang mendapat sebutan sebagai "Serambi Mekkah", sebuah sebutan yang mengidentifikasikannya dengan ke-Islam-an. Masyarakat Aceh seringkali menganggap bahwa statusnya sebagai seorang Muslim dan sebagai orang Aceh merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial politik mereka. Hal inilah yang kemudian menjadikan bentuk-bentuk perjuangan orang Aceh sepanjang perjalanan sejarahnya yang tidak lepas dari nilai-nilai ke-Aceh-an dan ke-Islam-an.

5.1. Membangun Sejarah Negeri Serambi Mekkah

Sepanjang perjalanan sejarah politiknya, Kerajaan Aceh jauh sebelumnya telah mengambil tempat yang sangat spesifik dan signifikan dengan peran-peran yang telah dimainkan, setidaknya pada abad ke-13 ketika perdagangan di Sudut Barat Laut Sumatra menampakkan geliatnya. Pada masa itu Kerajaan Samudra Pasai telah mampu menjadi kerajaan yang besar sehingga namanya mampu merefleksikan kebesaran untuk wilayah tersebut. Pelabuhan Lhokseumawe yang letaknya sangat strategis menjadi pusat

perdagangan karena berhadapan langsung dengan Selat Malaka, yang merupakan rute niaga dan penyebaran agama yang sampai saat ini menjadi wilayah yang menarik untuk dikaji.¹

Perkembangan lebih lanjut dari kerajaan-kerajaan yang berada di tanah Rencong itu mencapai kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda. Pada masa inilah memori kolektif tentang kejayaan kerajaan Aceh selalu disebut dan diagung-agungkan oleh semua orang Aceh dan selalu terwariskan ke dalam lintas generasi. Sejarah lisan kebesaran Aceh selalu menjadi dasar pola pikir dan pola tingkah laku politik bagi generasi-generasi selanjutnya, bahkan sampai sekarang ini. Pola pikir dan tingkah laku politik masyarakat Aceh tentang kejayaannya dapat dikatakan sebagai "warisan" dari Sultan Iskandar Muda yang dapat menimbulkan sikap anti terhadap sentralisasi kekuasaan oleh pemerintah Pusat (Jakarta) apabila pemerintah Pusat ternyata tidak bisa mewujudkan kejayaan seperti pada masa kejayaan pemerintahan Sultan Iskandar Muda.² Dengan demikian pembentukan sejarah Aceh tidak lepas dengan adanya korelasi yang sinergis antara sejarah masyarakat Aceh dengan proses pembentukan politik Aceh itu sendiri.

Dalam perkembangan selanjutnya masyarakat Aceh selalu mengkaitkan secara erat antara agama dan patriotisme bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya yang mendiami wilayah-wilayah di Indonesia. Bagi mereka agama dijadikan sebagai wahana untuk mengkristalkan nilai-nilai ke-Aceh-an.

Ketika kekuasaan asing dari Eropa datang ke Aceh seperti Portugis, Belanda, dan Inggris, wilayah Aceh mendapat perhatian yang khusus, terutama pada masa kolonial

¹ Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Jilid III*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hlm. 3.

² Pada tahun 1625 Sultan Iskandar Muda mengembalikan kegemilangan kerajaan Aceh dan menjadikan sebagai pusat perdagangan lada dan emas. Selain kejayaan dalam bidang ekonomi, kerajaan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda merupakan simbol politik yang mempunyai kekuasaan yang besar. *Ibid.* hlm. 56-57.

Belanda mulai berkuasa di wilayah Nusantara. Pada saat terjadinya persaingan kekuasaan antara Inggris dengan Belanda, kedua belah pihak saling tarik menarik kepentingan ekonomi dan politik di Aceh. Dalam pertikaian untuk berebut pengaruh terhadap Aceh tersebut, Aceh selalu dilibatkan karena memiliki letak daerah yang sangat strategis. Akhirnya pada perjanjian yang dilakukan antara Inggris dan Belanda yang terjadi pada tahun 1819 dibuat suatu kesepakatan untuk memberikan status kekuasaan independen atas kerajaan Aceh, walaupun secara riil kekuasaan itu tidak pernah diberikan. Kesepakatan antara Belanda-Inggris pada kenyataannya hanya dijadikan sebagai strategi Inggris terhadap Belanda agar Belanda tidak memiliki kesempatan atau kehendak untuk merebut Aceh dari kekuasaan Inggris.³

Posisi dan peran Aceh sebagai suatu kekuatan sosial politik terus ada dan memainkan peran yang besar, hal ini terlihat pada masa Revolusi yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Oktober 1945 seluruh Ulama di Aceh, seperti Tengku Haji Hasan Krueng Kale, Tengku M. Daud Beureueh, Tengku Haji Ja'far Sidik Lamjabat, dan Tengku Haji Hasballah Indrapuri menyatakan dukungannya terhadap Proklamasi Kemerdekaan dan patuh pada Pemimpin Besar Republik Indonesia Soekarno dan bertekad untuk mempertahankan Republik Indonesia.⁴

Pada saat ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta diduduki oleh Belanda dalam Agresi Militer II tanggal 19 Desember 1948, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatra Barat. Ketika pemerintahan Indonesia tidak bisa berfungsi

³Anthony Reid. *Asal Mula Konflik Di Aceh : Dari Perebutan Pantai Timar Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke- 19*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2005, hlm.12-13.

⁴Mengernai isi pernyataan kesetiaan selengkapnya dari Daud terhadap Negara Republik Indonesia baca dalam Teuku Ibrahim Alfian. *Wajah Aceh dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press. 2005, hlm.248

sebagaimana mestinya akibat serangan militer Belanda itu, Wali Negara Sumatra Timur mengajak Daud Beureueh untuk membentuk negara Federasi dalam Muhtamar Sumatra tanggal 28 Maret 1949⁵. Namun ajakan tersebut ditolak dan tetap memilih untuk setia pada Republik Indonesia. Kesetiaan atau loyalitas masyarakat Aceh diperlihatkan juga ketika pada bulan Agustus pada saat seluruh lapisan masyarakat Aceh menyumbangkan harta benda yang dimilikinya untuk dibelikan dua pesawat terbang Seulawah, yang kemudian ditetapkan menjadi hari menjadi Garuda Indonesia. Selain itu juga masyarakat Aceh menyumbangkan dana kepada pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta untuk membiayai perwakilan Republik Indonesia yang berada di luar negeri, Angkatan Perang Republik Indonesia dan pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta.⁶

Berdasarkan pada *historical-contribution*, apa yang telah diberikan oleh Aceh untuk mempertahankan dan menyelamatkan Republik Indonesia, rupanya balasnya berbanding terbalik dengan apa yang telah diberikan oleh masyarakat Aceh. Hal inilah yang kemudian memicu berkembangnya rasa kecewa dan menggores luka yang dalam pada masyarakat Aceh. Keputusan yang melukai perasaan orang Aceh antara lain adalah saat pengkerdilan provinsi Aceh dimana provinsi Aceh dimasukkan ke dalam wilayah provinsi Sumatera Utara. Disamping itu, kekecewaan juga dialami oleh para pejuang, khususnya kalangan militer, karena kekuatan komando militer Aceh yang semula setingkat Divisi/Tentara Teritorium, akhirnya dilikuidasi hanya setingkat satu brigade.⁷

Berdasarkan ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Kutaraja tanggal 17 Desember 1949, No.8/ Des/W.K.P.H. dibentuk Provinsi Aceh dengan Tengku

⁵ *Ibid.*, hlm. 246.

⁶ *Ibid.*

⁷ Mengenai bagaimana sejarah likuidasi organisasi militer di Aceh dapat dibaca *Kodam Iskandar Muda, Sejarah, Perkembangan, dan Dharma Baktinya* (Kodam IM, 2003).

M. Daud Beureueh sebagai Gubernurnya.⁸ Akan tetapi belum genap satu tahun provinsi Aceh berdiri, dalam sidang pada tanggal 8 Agustus 1950, Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat memutuskan bahwa sesuai dengan persetujuan Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia, wilayah Indonesia dibagi dalam 10 provinsi. Satu diantaranya adalah provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian provinsi Aceh yang telah terbentuk harus digabungkan dengan provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian Aceh mengalami penurunan status dari Daerah Istimewa menjadi Keresidenan di bawah provinsi Sumatra Utara. Daud Beureueh yang semula sebagai Gubernur Aceh diberi jabatan sebagai Pegawai Tinggi Bantuan di Departemen Dalam Negeri. Hal inilah antara lain yang di kemudian hari memicu timbulnya akar ketidaksenangan dan menjadi catatan sejarah bagi semua masyarakat Aceh karena mereka merasa dikhianati oleh Republik Indonesia.⁹

Konflik-konflik yang terjadi setelah itu mencapai titik puncaknya dengan dibentuknya Negara Islam Indonesia oleh Tengku Daud Beureueh pada tanggal 20 September 1953. Dalam perjalannya Negara Islam Indonesia ini berafiliasi dengan gerakan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat.¹⁰ Dalam visi perjuangan Daud Beureueh dalam Gerakan DI/TII terlihat dengan jelas bahwa Aceh mampu mengkaitkan hubungan antara agama dan patriotisme secara lebih erat dibandingkan dengan masyarakat yang ada di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dalam gerakan ini salah satu sumber ketegangan struktural adalah lenyapnya Provinsi Aceh dengan adanya penggabungan Aceh ke dalam Provinsi Sumatra Utara, dan likuidasi organisasi militer serta keyakinan agamanya

⁸ S.M. Amin. *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*, Yakarta; N.V.Seroengan. 1957, hlm. 28.

⁹ Marwati Djoned Poesponegoro, Nugroho Noto Susanto. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hlm. 271.

¹⁰ *Ibid.*

(*generalized belief*), yang telah mapan dalam kehidupan masyarakat Aceh diaktifkan dan menghasilkan satu determinan dalam perilaku kolektif yang menghasilkan gejala sosial. Pada akhirnya "gerakan protes" yang dilakukan Daud Beureuh ini muncul sebagai kekuatan yang menentang terhadap eksistensi negara Republik Indonesia sebagai satu kesatuan.

Melihat problem yang mengancam disintegrasi bangsa itu, akhirnya Pemerintah Pusat merespon gejala yang muncul pada masyarakat Aceh pada saat itu, dengan mengeluarkan kebijakan untuk memberikan hak otonomi khusus pada Aceh dengan menetapkan Aceh sebagai Daerah Istimewa pada tanggal 16 Mei 1959 berdasarkan Surat Keputusan Nomer I/Missi/1959. Maka dengan dibentuknya Daerah Istimewa Aceh sebagai wilayah dengan status Otonomi Khusus yang memiliki kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri di bidang pendidikan, agama dan adat istiadat. Namun status Otonomi Khusus pada wilayah dan pemerintahan daerah ini tidak memberikan perubahan yang signifikan bagi daerah ini.¹¹ Ternyata pada proses pembangunan selanjutnya, disadari atau tidak oleh pemerintah Pusat, terjadi marginalisasi ekonomi dan politik terhadap masyarakat Aceh.

Sejak awal tahun 1960-an Aceh berada dalam keadaan tenang dan damai. Namun terjadi berbagai ketimpangan sosial yang berorientasi pada perimbangan pembagian perekonomian antara Pusat-Daerah yang tidak seimbang dimana Aceh yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar dari sumber daya alam, seperti minyak dan gas alam cair diberi pembagian yang sedikit. Dalam proses pembagian hasil antara Daerah dan Pusat tersebut, masyarakat Aceh merasa dieksploitasi dan dirugikan. Akibat dari ketimpangan pembagian hasil antara Pusat-Daerah dan ditambah terjadinya ketimpangan

¹¹ Teuku Ibrahim.Alfian, *op. cit.*, hlm. 285.

sosial antara kehidupan penduduk asli yang hidup dalam garis kemiskinan dengan kaum pendatang yang hidup serba kecukupan, maka akhirnya membuat seorang putra daerah Tengku Hasan Di Tiro, yang kemudian dikenal dengan Hasan Tiro, mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 4 Desember 1976.¹²

Tengku Hasan Muhammad Tiro menjadi pimpinannya dan anggotanya kebanyakan direkrut dari mantan pengikut gerakan DI/TII dan keluarganya serta segenap masyarakat yang tidak puas terhadap keputusan Pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan atau kesejahteraan penduduk pribumi. Pada awal gerakannya, Gerakan Aceh Merdeka ini didasarkan pada ideologi Islam sehingga menjadi daya tarik mantan anggota DI/TII. Hal ini senada dengan apa yang diceritakan oleh salah seorang nara sumber yang bernama D.A. Rahman, yang pada saat itu menjabat sebagai *Ulee Sago* (Panglima Wilayah) Manyakpayet, Aceh Tamiang.

*"... Saya sama Tuan Puteh mantan Panglima Gunung Masid nda ada yang berani mengatakan kita GAM waktu itu. Saya masuk GAM karena ajakan dari teman yang ada di atas. Saya katakan perjuangan GAM tepat betul karena perjuangan dari nenek moyang kita belum selesai. Saya dulu anggota DI/TII, ayo kita lanjutkan, kita bergerak lagi, kita selesaikan pada saat pidato di Rembug Pidie..."*¹³

Alasan utama yang menyebabkan meningkatnya gerakan sparatis di Aceh adalah sebagai berikut: *pertama*, pemerintah Pusat melaksanakan kebijakan "keamanan dan

¹²Hasan Tiro sejak tahun 1950 telah tinggal di 454 Riverside Drive New York, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Columbia University. Hasan Tiro mulai dikenal di masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia ketika mengkritik terhadap kebijakan politik pemerintahan Ali Sastroamidjojo dengan adanya surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, yang disiarkan di suart kabar Amerika dan Indonesia. Lihat selengkapnya dalam Al- Chaidar. *Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, hlm. 33-36.

¹³Wawancara dengan D.A Rahman di Matang Ara, Manyakpayet, Aceh Tamiang pada tanggal 15 Agustus 2009

pembangunan” yang diimplemenstasikan dalam rencana-rencana industrialisasi atas negara Indonesia. Pembangunan perusahaan-perusahaan manufaktur dilakukan di Jawa, sementara provinsi-provinsi di luar Jawa yang kaya akan sumber daya alamnya hanya bertugas sebagai pemasok bahan-bahan mentah untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Provinsi-provinsi yang kaya akan hasil alam seperti Aceh dengan ladang gas alam dan cadangan minyak yang melimpah diambil dalam rangka menopang proses industrialisasi di Indonesia. Namun proses industrialisasi tersebut dirasakan membawa kerugian bagi daerah-daerah pemasok bahan mentah, seperti provinsi Aceh. Dari pembagian hasil tersebut ternyata daerah Aceh hanya memperoleh kue hasil dari industrialisasi sebesar 5%. Pembagian ini tentu saja sangat merugikan dan semakin dirasakan ketidakadilan (lagi) yang dilakukan oleh Pusat terhadap masyarakat Aceh sehingga hal ini di kemudian hari menimbulkan rasa kecewa yang berkepanjangan terhadap pemerintah Pusat.

Selain itu kebijakan pembangunan semasa pemerintahan Soeharto bersifat terpusat (sentralisasi) yang memberikan kekuasaan yang semakin besar di tangan pemerintah Pusat dimana hal ini dirasa sangat melecehkan oleh masyarakat Aceh terhadap pengingkaran status Aceh sebagai “Daerah Istimewa”. Kurangnya hak untuk menentukan nasib sendiri dalam permasalahan politik dan ekonomi mendorong semakin kuatnya gerakan GAM. Sejak masa itulah GAM berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan Aceh sebagai tujuan perjuangan dan tujuan merdeka itu masih diyakini oleh sebagian anggota GAM hingga saat ini.

Gerakan Aceh Merdeka yang dipimpin Hasan Di Tiro dalam memobilisasi menggunakan asas Islam seperti dalam gerakan DI/TII ditambah dengan isu ras atau etnonasionalisme. Gerakan Aceh Merdeka terasa semakin kuat ketika Tengku Hasan Tiro

hendak menghapus UUD 1945 dan Negara Republik Indonesia. Untuk memperluas gerak dari aksi GAM ini, Hasan Tiro membuat perubahan besar pada visi perjuangan dengan mengganti asas perjuangan GAM.¹⁴

Pada tahun 1994 terjadi perubahan strategi perjuangan GAM. Hasan Tito mengubah strategi perjuangan GAM yang semula berasaskan Islam dengan strategi yang bersifat sekuler dengan memasukan pembebasan seluruh Sumatra sebagai bagian integral dari GAM dengan nama *Aceh-Sumatra National Liberation Front (ASLNF)*.¹⁵

Perjuangan GAM menjadi semakin memiliki daya tarik yang kuat bagi masyarakat Aceh pada saat pemimpin mereka menggunakan isu sejarah kegemilangan Aceh pada masa lalu. Masyarakat Aceh memiliki kesadaran sejarahnya yang tinggi, suatu kesadaran yang mengajarkan mereka tentang upaya mencari makna tentang masa lampau dan masa kini. Hal ini menjadikan sudut pandang dan alat (modal) yang ampuh untuk menempuh jalan perjuangannya dalam rangka memenuhi harapan-harapan dan cita-cita perjuangan hidup masyarakat Aceh di masa-masa mendatang. Sejarah mengajarkan pada masyarakat Aceh apa yang dimiliki sekarang, kondisi yang terjadi pada masa kini dan keberadaan yang sedang mereka alami adalah sebagai akibat dari proses masa lampau. Masa lampau akan selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peristiwa sekarang.

Ketika berada di lapangan jelas sekali terlihat bagaimana para responden mampu menyampaikan perjalanan sejarah Aceh mulai pada masa kejayaan kerajaan Aceh terutama Iskandar Muda, serta perjuangan para pendahulunya ketika melawan Belanda dimana

¹⁴ Teuku Ibrahim Alfian, *loc. cit.*

¹⁵ Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat. *Sejarah TNI AD 1974-2004*. Jakarta: Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, 2005, hlm. 129.

“Aceh tak pernah kalah dari Belanda”, sampai perjuangan melawan Jepang.¹⁶ Ada suatu penekanan khusus dari para nara sumber ketika mereka menyampaikan sejarah perjuangan Aceh dalam kerangka sejarah Indonesia pada masa-masa penyelamatan negara Republik Indonesia. Kontribusi Aceh dalam rangka menyelamatkan eksistensi Republik ini berupa sumbangan fisik berupa dua pesawat Seulawah dan sunbangan dana untuk Republik Indonesia dari masyarakat Aceh menjadi semacam titik klimaks bagi masyarakat Aceh ketika pada tahun-tahun setelah itu sejarah Aceh ditempatkan sebagai “sejarah korban” dalam kerangka sejarah Republik ini.

Pada tahun-tahun berikutnya sejarah Aceh diliputi oleh adanya sejarah yang hitam, dan sebagai sejarah orang yang sedang menuntut keadilan dan hak mereka. Dalam kerangka ini sejarah masyarakat Aceh ditempatkan sebagai kerangka dan pola tingkah laku bagi masyarakat pemiliknya. Sejarah masa lampau itu kemudian mereka jadikan sebagai alasan untuk berjuang, yang dalam sisi lainnya dianggap sebagai tindakan-tindakan yang melawan kebijakan pemerintah Pusat.

5.2 Akar Permasalahan Konflik : Sumber Daya Alam dan Bibit Konflik GAM

Kebijakan perekonomian Indonesia pada masa kepemimpinan Soeharto menempatkan sumber daya alam pada kedudukan yang sangat penting dan memiliki nilai tinggi atau strategis dalam perananan sebagai motor penggerak perekonomian nasional.¹⁷

¹⁶Bagi masyarakat Aceh, Perang Aceh dalam melawan Belanda yang memakan waktu lama dari tahun 1873 -1912 justru dimaknai sebagai bentuk kekuatan Aceh yang teguh dan sulit untuk dikalahkan.

¹⁷Peran besar yang dimainkan oleh Aceh dalam bidang ekonomi telah ada sejak jaman kerajaan dan masa-masa selanjutnya. Seperti pada masa revolusi Indonesia. Ir Soekarno pernah menyampaikan dalam pidato tanggal 4 Desember 1959 bahwa Aceh merupakan daerah modal, yang berarti bahwa Aceh telah lama menjadi aktor ekonomi di Indonesia,

Sejak ditemukannya ladang minyak dan gas alam di Arun dalam jumlah besar di kota Lhoksumawe, merubah kedudukan Aceh dalam perekonomian nasional. Dengan ditemukannya sumber daya alam inilah Aceh menjadi daerah yang memiliki arti penting dalam perekonomian nasional. Sumber daya alam yang melimpah menjadi daya tarik para investor dan pengusaha untuk menanamkan kepentingan guna mengeruk keuntungan di wilayah ini. Investor-investor asing mengadakan *join-venture* dengan perusahaan minyak negara (Pertamina) dengan mendirikan satu perusahaan yaitu *Mobil Oil* (sekarang *Exxon Mobil*) yang melakukan eksploitasi kekayaan alam di provinsi Aceh.

Para investor dan pemerintah Pusat sangat diuntungkan dalam bisnis minyak dan gas ini dimana mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena harganya sangat tinggi, sesuai dengan fluktuasi harga dunia, dan sangat laku di pasar domestik maupun marca negara. Namun kondisi terbalik dialami oleh Aceh sebagai pemilik wilayah yang memiliki sumber minyak dan sumber gas itu.

Aceh tidak diuntungkan dengan *trikeldown effect* yang diberikan sebagai pembagian kue atas keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan *Exxon Mobil*. Aceh hanya mendapatkan bagian sebesar 5- 20 % dari pemasukan eksploitasi alam, sedangkan keuntungan selebihnya menjadi bagian keuntungan dari pemerintah Pusat dan perusahaan tersebut. Fakta ini menyebabkan masyarakat Aceh berada di bawah garis kemiskinan, pendidikan rendah, dan hancurnya identitas lokal sebagai akibat tergerus oleh modernisasi.

Selain perusahaan yang berbasis pada sumber daya alam yang dimiliki oleh Aceh, kebijakan industrialisasi dari pemerintah Pusat mendorong bermunculannya perusahaan-perusahaan raksasa baru seperti PT. Pupuk Iskandar Muda, Pabrik Pupuk Aceh Asean Fertilizer, dan Pabrik Kertas Kraft. Banyaknya perusahaan baru bertaraf nasional maupun

internasional ternyata tidak membawa perubahan yang berarti bagi perekonomian regional di Provinsi Aceh. Sebagian besar rakyat Aceh tidak merasakan kesejahteraan dengan kekayaan alamnya yang dimilikinya dan hanya dapat menyaksikan kekayaan alam yang mereka punyai diangkut oleh perusahaan asing dan pemerintah Pusat.¹⁸

Ketidakseimbangan ekonomi dan sosial ini membangkitkan rasa amarah dan kecemburuan terhadap pemerintah Pusat. Kondisi ini diperburuk lagi dengan sistem sentralisasi politik dan ekonomi pemerintahan Pusat yang berkedudukan di Jakarta. Hal ini nampak jelas bahwa ketiadaan eksistensi politik dan ekonomi Aceh sebagai provinsi yang memiliki keistimewaan dan otonomi. Friksi yang sangat jelas terbangun adalah perbedaan yang mencolok antara Pusat dan Daerah. Antara Jakarta – Aceh, sehingga akhirnya memunculkan stigma yang buruk tentang Jakarta dan orang-orang Jawa sebagai “penjajah”.

Rakyat Aceh memendam kecemburuan karena tidak dapat terlibat atau menikmati hasil bumi dan rakyat Aceh tidak diberi keluasaan untuk mengatur ekonomi sendiri. Rakyat Aceh menjadi “tamu” di daerah sendiri. Ketika disinggung mengenai perekonomian dan gejolak di Aceh sebagian nara sumber mengemukakan adanya dasar dari gerakan yang ada di Aceh lebih didasari oleh keinginan untuk mendapatkan pembagian kesejahteraan dari apa yang telah diperoleh Pusat. Berikut petikan wawancara dari beberapa nara sumber:

“.....Hidup tenang lah jangan ada tembak-tembak lagi, hidup gak takut lagi, sudah enak seperti ini. Kalau dulu kita takut tiap hari takut dipukul, dibentak, diambil harta. Sekarang tenang. Sekarang kita hidup tidak seperti dulu yang susah untuk makan. Sekarang sudah lumayan...”¹⁹

¹⁸ Al Chaidar, *op. cit.*, hlm. 12.

¹⁹ Wawancara dengan Lindawati di Sineubuk Tuha, Aceh Timur, pada tanggal 16 Agustus 2009.

"....Kakak sering tanya kenapa abang menjadi GAM, katanya untuk bela Nanggroe, untuk menuntut hak yang dirampas, kekayaan, kebebasan yang dirampas orang-orang Jakarta, seperti jihadlah. Kakak bilang ..kan sudah ada yang berhak malah nanti kita kita mati, kita hanya rakyat kecil. Abang saya nda mau dengan dan nekad juga tetap berjuang dengan GAM yang penting Aceh dikembalikan haknya..."²⁰

"....Isu yang banyak didengar , kalau Aceh referéndum, Aceh Merdeka . kalau kita merdeka itu Aceh akan kaya, punya mobil satu seorang. Kerna Aceh kaya, banyak harta, harta Aceh. Harta Aceh kalau merdeka dikelola sendiri, kalau tidak merdeka tidak bisa...."²¹

"....Yang penting kami bisa makan saya sekeluarga senang. Sekarang sudah jadi tukang deres tidak takut, tidak lari-lari..."²²

"....Bagi saya MOU jalan tempat kita perjuangan bisa dapat, tapi ingat kalau Pemerintah tak dapat dilaksanakan dan bohongi rakyat Aceh, pastilah akan ada lagi gerakan macam konflik kemarin. Kita orang Aceh yang selalu pegang janji, kita diambil semua harta untuk Jakarta, kita hanya nuntut hak kita Aceh. Beri kebebasan untuk mengelola Aceh, jangan ganggu Aceh lagi dan jangan bohongi Aceh. Pasti kita lawan orang kaphe..."²³

²⁰ Wawancara dengan Aminah di Langsa pada tanggal 18 Agustus 2009.

²¹ Wawancara dengan Aminah di Langsa pada tanggal 18 Agustus 2009.

²² Wawancara dengan Salamah di Selamahmudah, Aceh Timur, pada tanggal 18 Agustus 2009.

²³ Wawancara dengan Zainal Abidin di Kuala Langsa, Kota Langsa, pada tanggal 18 Agustus 2009.

"...Di dalam konsep negara kesatuan dalam perjanjian mereka telah memungkinkan konsep-konsep dalam perekonomian kita tetap dalam konsep negara kesatuan dalam perjanjian mereka telah memungkinkan konsep-konsep dalam perekonomian. Kita tetap bermula dengan peraturan juga bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara tapi aplikasinya nol, hal ini akhirnya yang menjadikan Aceh menjadi daerah yang bodoh. Bagi Indonesia bahkan menjadi mengkhianati dan manjajah, menipu lagi. Jadi saya katakan sekarang Aceh menuntut hak lagi. Kita berpihak, Aceh perdamai tapi masih nggak jelas perkonomiannya. Mau kita kembali Aceh berjaya. Persoalannya kita berat Undang-Undang apalagi Aceh diberi pemerintah sendiri kita bertanggungjawab ke Pusat, 6 point termasuk paparannya. Keluar negeri, fiskal, ekonomi, perdagangan semua dikembalikan oleh Aceh sendiri...."²⁴

"...Aceh jangan didikte, jalankan dulu 70% persen untuk Aceh, 30 % untuk pusat secara konsisten. Kalau kesenjangan di Aceh tetap ada. Kalau dibiarkan kebijakan melenceng pasti ada perjuangan Aceh lagi...."²⁵

"...Kita orang sudah dianaktirikan. Perjuangan kita menuntut hak Aceh dari segala kekayaan Aceh yang diambil, dikuras, dibawa pula dikasih orang lain, sedangkan di Aceh sendiri banyak yang nggak makan. Kalau Aceh nda berdiri,

²⁴ Wawancara dengan M. Yatim Usman di Hagu Barat Laut, Kota Lhokseumawe, pada tanggal 19 Agustus 2009.

²⁵ Wawancara dengan Tengku Mohamad Yatim Usman di Hagu Barat Laut, Kota Lhokseumawe pada tanggal 19 Agustus 2009.

Aceh akan kembali. Banyak sekali uang Aceh. Saya dulu aktif juga di AM. Pa ta sebenarnya Aceh ingin melepaskan diri dari RI wajar...²⁶

5.3. Jakarta - Jawa : Pembentukan “Kolonialisme” Versi Masyarakat Aceh

Ketika berbicara konflik yang muncul dan berkembang selama konflik di Aceh. Awal mula terjadinya konflik GAM di Aceh menunjukkan garis konflik yang bersifat fundamental tentang eksploitasi dan pengelolaan aset wilayah Daerah oleh pemerintahan Pusat dan pelanggaran terhadap tata pemerintahan yang dikehendaki di Aceh. Masyarakat Aceh “yang terwakili” oleh GAM melihat ketimpangan yang ada sebagai bentuk “kolonisasi” pemerintah Pusat terhadap pemerintah Daerah. Keterlibatan Jawa sebagai wilayah yang dijadikan sebagai Pusat Pemerintahan dan sentral perusahaan-perusahaan manufaktur yang mengeksploitasi kekayaan alam di luar pulau Jawa, termasuk Aceh sebagai pemasok bahan mentah. Keterlibatan aktor-aktor dari etnis Jawa dalam proses eksploitasi di Aceh menorehkan stigma negatif terhadap etnis Jawa di mata masyarakat Aceh. Wacana yang berkembang kemudian adalah orang Jawa identik dengan aktor-aktor yang menyebabkan eksploitasi di Aceh.

Selain itu berdasarkan *collective memory* masyarakat Aceh yang “pernah” merasa dikhianati oleh orang-orang Jawa dalam Gerakan DI/TII menjadikan ingatan sosial yang kelam bagi keterlibatan Jawa dalam pergumulan politik di Aceh. Hal ini terlihat jelas ketika berdirinya GAM dengan menekankan masalah etnisitas sebagai dasar pembentukan GAM.

²⁶ Wawancara dengan D.A Rahman di Matang Ara, Manyakpayet, Aceh Tamiang, pada tanggal 16 Agustus 2009.

Seperti yang diungkapkan oleh D.A Rahman ketika mengikuti pidato –pidato pembentukan GAM di Pidi.

“...Ini perjuangan yang berbeda dengan DI. Pada waktu itu hal yang perlu ditandakan disini, kita jangan pakai orang pakai orang Jawa sampai ke bawah. Sudah dapat, orang lalu tapi ujung-ujungnya lemah. Jangan meminta tolong ke orang Jawa, Alasannya sebagian orang kita Jawa sudah keturunan nenek moyang di Aceh, tapi belum jadi Aceh, masih belum ada kawin silang. Namun belum Aceh asli, meski bahasa Aceh. Jangan sampai orang Jawa boleh ikut kalau perjuangan sudah selesai kita tanya orang Jawa, dari tahun berapa mereka ada di Aceh. Kalau misalnya jawabnya dari nenek moyang nda tau lagi ihwal keturunannya berarti dia orang Aceh. Tapi kalau orang tersebut tahun 1995 maka orang Jawa dibilang kamu pulang dulu buat surat paspor baru masuk...”²⁷

GAM membubuhkan cap bahwa Jawa adalah etnis asing bagi Aceh. GAM menyalahkan pemerintah Indonesia dalam rangka menciptakan ketidakadilan di Aceh. Orang Aceh menilai bahwa Negara Republik Indonesia adalah hanya milik etnis Jawa. Hal tersebut dikuatkan oleh fakta historis dimana pada masa Orde Baru, etnis Jawa mendominasi struktur pemerintahan dan ekonomi, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. GAM melihat realitas tersebut untuk membangun rasa benci dan permusuhan dengan memanfaatkan sentimen etnis demi perjuangannya.²⁸

²⁷ Wawancara dengan D.A Rahman di Matang Ara, Manyakpayet, Aceh Tamiang, pada tanggal 16 Agustus 2009, Mayak Payet

²⁸ Hal ini sangat jelas teruraikan pada naskah teks pidato Proklamasi Gerakan Aceh Merdeka . lihat Lampiran Teks Proklamasi Gerakan Aceh Merdeka.

Dalam beberapa hal isu ketegangan yang muncul di Aceh sebagai isu etnonasionalisme antara Aceh dan Jawa tidak mencuat sebagai isu sentral terhadap visi perjuangan GAM. Namun pada awal pembentukan GAM isu penguasaan sumber alam Aceh oleh orang-orang bukan Aceh dijadikan Hasan Tiro untuk menggiring publik untuk membuat pengesahan atas hak *self determination* dengan tujuan untuk mendirikan suatu negara merdeka. Mensikapi hal ini ada pendapat yang menyebutkan bahwa isu ras dan agama hanyalah *outlet* yang vokal, yang kemudian menimbulkan ketegangan struktural dan kemudian dijadikan sebagai determinan untuk gerakan yang berorientasi pada nilai.

Terlepas dari pro dan kontra atas stigma yang berkembang terhadap kelompok Jawa di Aceh, realita di lapangan bahwa etnis Jawa menjadi salah etnis yang menjadi "sasaran" dari sebagian orang-orang GAM. Sebagai contoh di wilayah pemukiman Jawa di daerah Alur Megu dan Alur Minyak di Bireunbayan, Kab. Aceh Timur, terjadi pembakaran dan juga terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh GAM.

".....Orang Aceh dan orang Jawa di sini bagus tetapi tidak dekat, kalau ketemu biasa saja. Orang Aceh sering teriak kita sebagai orang yang Jawa yang menjajah Aceh. Waktu konflik sering kalau kita jalan di daerah Beyeun. Kami tidak menyangka kalau daerah sini akan jadi pembakaran dan penembakan. Karena di sini ada orang Aceh seharusnya aman, beda kalau yang di daerah Wonosari hanya ada orang Jawa. Tapi di Wonosari malah aman karena ada Brimob..."²⁹

²⁹ Wawancara dengan Warni di Alur Megu, Bireunbayan, Aceh Timur, pada tanggal 19 Agustus 2009.

"...Orang-orang Jawa di sini dulu makmur. Mereka kerja terus dan kalau orang Aceh iri. Orang-orang GAM minta uang ke kita. Lama-lama kami tertekan juga. Kami sering diteriaki hai orang Jawa. Katanya kami penjajah, kami diusir. Waktu ada GAM di rumah kami memberikan apa yang ada. Kami memberikan ya dengan terpaksa kami lari pun tak bisa. Setelah GAM pergi datanglah TNI kami lebih aman dengan TNI.

Namun rupanya ini mengundang marah GAM. Pada tanggal 3 Januari 2001 mereka datang dan teriak orang Jawa kau, kutembak kau. Aku kena pukul dan nda sadarkan diri. Tau tau rumah sudah dibakar. Rumah orang-orang lain juga dibakar. Ozan mau tolong saya setelah itu aku muntah-muntah rupanya gegar otak dan sampai sekarang masih suka pusing dan sering lupa.

Keponakan saya ditembak namanya Warnen, karena besannya orang TNI namanya Panio, dianggap GAM sebagai mata-mata untuk TNI. Waktu ditembak sampai beberapa kali tidak meletup, kemudian ditembak dengan laras panjang dor kepalanya lepas. Sebenarnya Ozan keponakannya sudah ngajak lari tetapi Warnen tidak mau katanya sudah kalau memang harus mati di sini ya nda apa-apa. Anaku lari. Yang jadi korban di dusun sini banyak.

Setelah kejadian macam mana ngeri inget-inget. Di sini ada orang Jawa dan sedikit orang Aceh. Orang Aceh nda kena. orang Aceh jadi mata-mata. Memang iya. Orang Aceh kemudian ditangani Brimob. Kami ganti membakar kampung Aceh..."³⁰

³⁰ Wawancara dengan Suparno di Alur Megu, Bireunbayan, Aceh Timur, pada tanggal 19 Agustus 2009.

"...Daerah kami merupakan daerah wong Jawa, tapi ada sedikit yang Aceh. Daerah kami orang-orang Jawa banyak jadi petani ladang kami sampai 7 hektar. Orang Jawa di sini sebelum konflik tenang. Tapi sering kali kita diminta duit katanya untuk perjuangan orang Aceh.

Waktu bulan Januari 2001 rumah kami dan masyarakat sini didatangi oleh orang-orang GAM jumlahnya 30 orang. Mereka bersenjata lengkap. Waktu itu rumah ruang tamu penuh untuk tidur orang-orang itu. Bangun pagi jam 5 masak untuk sarapan, jam 7 cuci piring jam 12 masak lagi, seperti itu masih di injak-injak. Orang di sini bergantian jaga takut ada tentara. Kita nda bisa lari takut ditembak GAM, sana ada GAM, sini ada GAM. Setelah itu GAM pergi datanglah TNI.

Tanggal 3 Januari 2001 jam 8 malam. Rumah kami di atas bukit rumah batu. Ada orang itu (GAM) teriak. Orang Jawa ya...orang Jawa kutembak kau...bapaknya anak-anak jawab ...Jangan tembak, jangan tembak, terus dipukul pakai popor ditembak dor terus tersungkur. saya dan anak-anak dimasukkan ke dalam kamar. Anak saya laki-laki 2 dan perempuan satu. Dimasukan ke kamar dikunci. Masuk ke kamar orang itu nanya mana hartanya. Saya bilang saya nda punya harta, cuma anak-anak. Semua dibongkar. Bapaknya anak-anak pinsan aku pikir juga mati. Orang tadi mulai bakar rumah kami. Orang-orang keluar semua. Waktu di kamar saya takut bingung bagaimana mau keluar. Saya ingat ada jendela, anak-anak saya suruh melompat jendela dan suruh lari terus, saya kan gemuk saya pikir kakiku patah karena sebelah jendela ada jurang kami masuk jurang. Api di rumah mulai membakar, aku ingat bapak. Aku suruh anak-anak sembunyi di bawah

pohon pisang, aku kembali ambil bapak, dia masih belum sadar, aku gendong terus aku letakkan di semak pohon pisang.

Rumah atapnya sudah kebakar aku ingat ada air di drum ada dua drum aku dengan anaku siram ke rumah (sampai sekarang luka bakar dari bu Legiyem masih ada)...³¹

Bagi sebagian GAM keberadaan orang Jawa dan keterlibatan etnis Jawa dalam konflik sebagai wacana yang seringkali dikaburkan namun pada moment-moment tertentu dimunculkan sebagai determinan untuk memicu gerakan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan salah seorang combatan.

"...Saya menjadi combatan di wilayah Peurlak. Saya menjadi GAM dan dilatih kemiliteran di Malaysia. Kami tidak pernah mengusir orang-orang Jawa tapi kami hanya mengatkan kami tidak menjamin keselamatan saudara, kalau kita orang Jawa merasa tidak nyaman dan tidak terjamin keselamatannya silahkan saja keluar dari Aceh, karena ini daerah konflik...³²

Hal yang agak berbeda terlihat dari penuturan D.A Rahman yang masih dengan hati-hati menempatkan etnis Jawa dalam posisi yang bersifat pragmatis di setiap arah gerakan.

"....Ini perjuangan yang berbeda dengan DI. Pada waktu itu hal yang perlu ditanyakan di sini, kita jangan pakai orang pakai orang Jawa sampai ke bawah. Sudah dapat, orang lalu tapi ujung-ujungnya lemah. Jangan meminta tolong ke

³¹ Wawancara dengan Legiyem, Alur Megu, Bireunbayan, Aceh Timur, pada tanggal 19 Agustus 2009.

³² Wawancara dengan Ismuha di Raja Tuha, Manyakpayet, Aceh Tamiang, pada tanggal 16 Agustus 2009.

orang Jawa, Alasannya sebagian orang kita, Jawa sudah keturunan nenek moyang di Aceh, tapi belum jadi Aceh, masih belum ada kawin silang. Namun belum Aceh asli, meski bahasa Aceh. Jangan sampai orang Jawa boleh ikut kalau perjuangan.... Saya dan Pak Citro bersama-sama berpida'o, di 7 kampung Jawa, saya katakan kalau Geucik kasih keluar wargu saya nggak jamin selamat, resiko saya ancam. Ini bukan ancaman bukan mau bunuh pak Lurah. Namun ada dua wilayah yang di luar kendali yaitu di Alur dan Mandading. Pada waktu itu terjadi eksodus orang-orang Jawa di Mandading rupanya ada orang yang menulis di pintu orang-orang Jawa Boleh menempati 1 x24 Jam lebih dari itu tidak tanggung. Rupanya itu ditulis oleh orang Jawa....³³

5.4. Pemetaan Wilayah Konflik

Pemetaan konflik dalam penelitian ini dengan menggunakan paradigma Militer, dengan yang membagi daerah konflik dalam 3 kategori yaitu Daerah Hitam atau Meran daerah ini menjadi daerah yang intensitas konflik antara GAM-RI tinggi. Daerah-daerah yang termasuk daerah Hitam antara lain Aceh Utara, Pidie, Aceh Timur, dan Bireun. Hal ini dikaitkan dengan kondisi wilayah secara geografis menjadi medan yang sangat strategis untuk perang gerilya, yang menjadi sistem perang pasukan GAM. Daerah bergunung-gunung dan berbukit, juga banyak dijumpai kebun-kebun sawit dan karet. Wilayah pantai juga menjadi daerah yang sangat strategis untuk masuknya pasokan logistik bagi para milisi (combatan) yang ada di gunung.

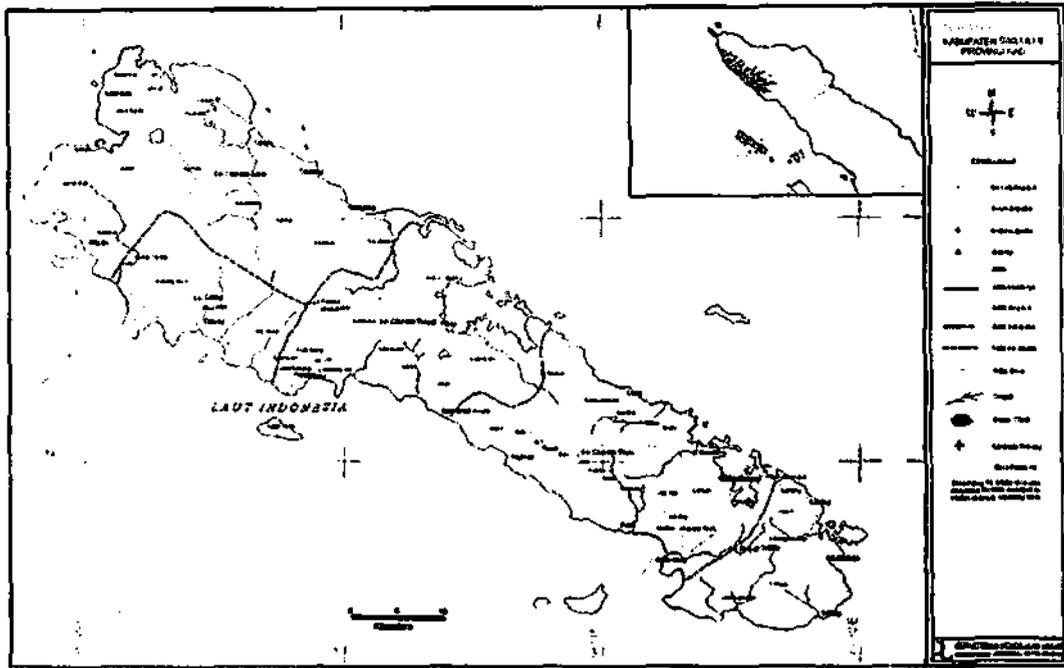
³³ Wawancara dengan D.A. Rahman di Mayakpayet, Aceh Tamiang, pada tanggal 16 Agustus 2009.

Selain pertimbangan geografis, wilayah Hitam merupakan wilayah awal dari gerakan perjuangan Aceh Merdeka, seperti wilayah Pidie dan Aceh Utara, Aceh Timur (Peurelak dan Idi Rayeuk) dan Bireun merupakan wilayah basis perjuangan para milisi perjuangan GAM dari perjuang DI/TII, Aceh Merdeka (AM) sampai pada perjuangan Gerakan Aceh (GAM).

Daerah Abu-Abu, merupakan daerah yang insentitas konflik tidak tinggi dan menjadi daerah yang strategis dan menjadi daerah rujukan untuk menghindari konflik terbuka antara GAM –RI. Daerah-daerah ini meliputi Banda Aceh, Langsa, Aceh Tamiang, dan Meulaboh. Daerah daerah ini merupakan daerah yang relatif aman untuk dijadikan tempat mengungsi, untuk menghindari konflik. Daerah Abu-abu terutama di wilayah kota sedangkan di pedalamnya, di beberapa titik masih menjadi wilayah konflik dengan intensitas tinggi.

Kategori wilayah konflik yang ketiga adalah wilayah Putih, daerah putih merupakan daerah dengan intensitas konflik rendah. Secara umum semua wilayah di Aceh merupakan wilayah konflik namun terdapat beberapa wilayah yang intensitas konfliknya rendah serta tidak menjadi rujukan tempat berlindung. Daerah-daerah tersebut antara lain adalah daerah Gayo Lues, Tekongon, Aceh Tenggara, seperti Kotacane.

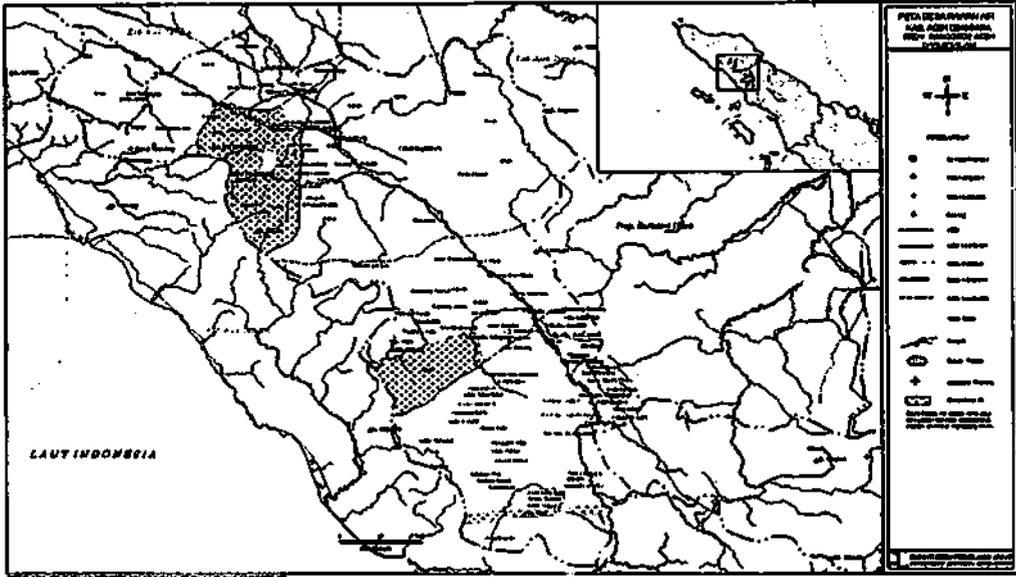
A. Peta Aceh Tamiang



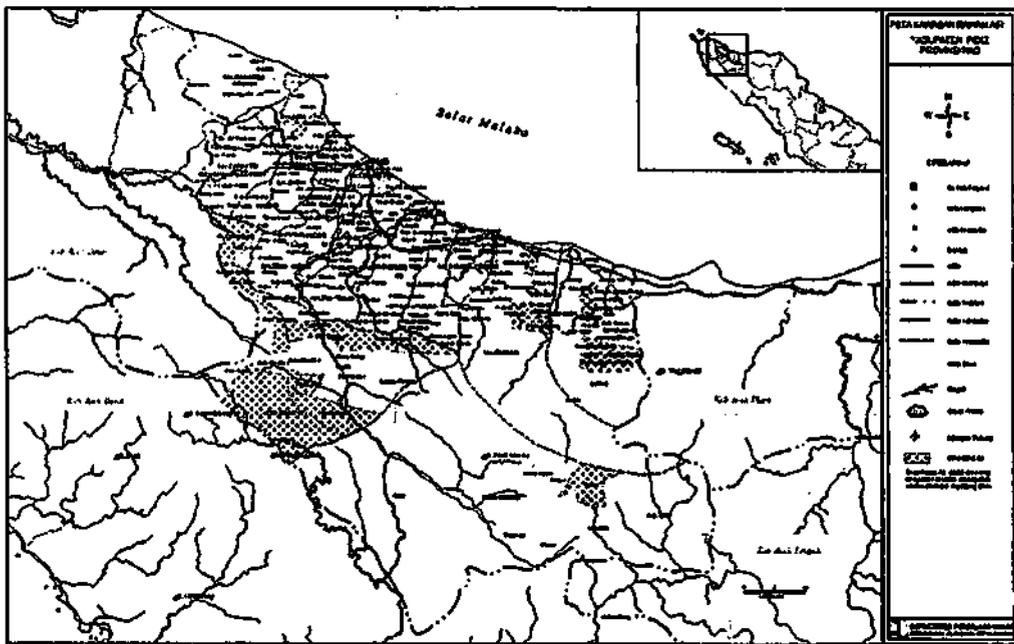
Wilayah Aceh Tamiang dalam penelitian ini sebagai daerah perbatasan antara provinsi Sumatra Utara dan provinsi Aceh. Ketika konflik berkecamuk, wilayah ini menjadi salah satu wilayah yang penting karena menjadi jalur masuk darat. Peran yang strategis dari wilayah ini menjadikan daerah ini menjadi wilayah perebutan antara GAM dan Republik. Dengan demikian wilayah ini menjadi pengaruh yang sangat kuat antara kekuatan RI dan dan kekuatan GAM.

Kabupaten Aceh Tamiang termasuk daerah Abu-abu, namun ada beberapa daerah yang merupakan daerah Hitam yang letaknya jauh dari pusat kota seperti Raja Tuha dan Manyakpayet yang menjadi daerah riset.

B. Peta Aceh Timur



C. Peta Aceh Utara



5.5. *Imajiner Nation* Aceh dan Nilai Ke-Aceh-an

Indonesia sebagai wacana suatu negara (*asing*) bagi masyarakat Aceh, sedangkan (negara) Aceh adalah suatu *Imajiner Nation* yang sedang diperjuangkan oleh masyarakat Aceh. Paradigma tentang Indonesia dihancurkan dan diganti tentang paradigama Aceh oleh Hasan Tiro, yang kemudian diikuti oleh sebagian masyarakat Aceh. Hasan Tiro mengklaim bahwa Aceh tidak pernah dijajah dan bukan merupakan bagian integratif dengan wilayah Indonesia. Pemahaman tentang Indonesia adalah bekas seluruh wilayah Belanda selama penjajahan Belanda dimana Aceh tidak termasuk di dalamnya. Hal inilah kemudian dijadikan dasar pemahaman tentang Indonesia untuk sebagian masyarakat Aceh.

Analisa terhadap gerakan yang berorientasi pada nilai (*value orientied movement*) yang terjadi di Aceh adalah untuk membentuk *imajiner nation* orang Aceh, yang dikategorikan oleh Smelser sebagai *collective behavior* atau gejolak sosial berupa, yang dinamakan oleh Smelser, sebagai *generalized belief* dengan anatomi sebagai berikut:

- a. Bersifat histeria dan melahirkan panik
- b. Bersifat pencapaian keinginan melahirkan keranjingan atau tipe tertentu revivalisme dan semacamnya.
- c. Bersifat permusuhan melahirkan upaya pengkambinghitaman orang lain atau tindak kekerasan dan tindakan ekstrim lainnya.
- d. Berorientasi nilai melahirkan revolusi politik, pergerakan nasional, pemberontakan melawan kebijakan pemerintah Pusat dan perturan-peraturan hukum Negara seperti Undang-Undang Dasar Negara dan hukum formal lainnya.

Sepanjang perjalanan sejarah perjuangannya, masyarakat Aceh mempunyai tujuan akhir untuk membentuk sebuah “negara merdeka”. Pemahaman negara merdeka bagi masyarakat terus ada dan menjadi dasar bagi Gerakan Daud Beureueh maupun Gerakan Aceh Merdeka Hasan Di Tiro. Dalam *mind set* yang terbentuk sebagai pemahaman tentang “negara “ bagi masyarakat Aceh ada pada sebagian masyarakat Aceh yang menginginkan adanya *Future Aceh*. Dalam beberapa hal pemahaman tentang Negara pada masyarakat Aceh adalah sebagai bentuk pengakomodiran terhadap nilai-nilai ke-Aceh-an yang lebih didasari oleh konsep Islam.

Pada saat Daud Beureueh mengadakan pemberontakan, visi gerakannya adalah untuk membentuk Negara Islam di Aceh, disusul dengan munculnya Aceh Merdeka dan akhirnya muncul Gerakan Aceh Merdeka yang dipimpin oleh Tengku Hasan Di Tiro. Apabila kita amati dari beberapa nara sumber dengan lintas generasi ada persamaan tuntutan dalam setiap Gerakan di Aceh yaitu menuntut kemerdekaan. Berikut ini pandangan tentang kemerdekaan di Aceh dalam setiap gerakan dari beberapa generasi :

“.....Saya masuk GAM karena ajakan dari teman yang ada di atas, saya katakan perjuangan GAM tepat betul karena perjuangan dari nenek moyang kita belum selesai. Saya dulu anggota DI/TII, dulu kita menuntut keadilan menuntut negara Islam berdiri, ayo kita lanjutkan kita bergerak lagi kita selesaikan, itu ajakan-ajakan dari GAM pada saat pidato di Rembug Pidi...”³⁴.

³⁴ Wawancara dengan D.A Rakman di Matang Ara, Manyakpayet, Aceh Tamiang pada tanggal 16 Agustus 2009.

*"....Tak tau aku, katanya GAM mau buat kita merdeka, mau merdeka nda mau Republik Indonesia tapi aku tak tau. .."*³⁵

*'... Aceh tidak pernah di jajah oleh siapapun, kita tidak didikalahkan Belanda, Jepang , kita ada bangsa Aceh, bangsa Jawa, Bangsa Boerneo kita semua mempunyai negara masing-masing. ³⁶....Pengertian negara Indonesia sebagai negara kepulauan adalah negara yang berdiri sendiri, juga yang harusnya terjadi di Aceh biarlah kita mengurus Aceh sendiri..."*³⁷

*"....Pada mulanya saya masuk GAM ingin menuntut keadilan, sampai beberapa waktu kita mau tidak mau harus punya negara sendiri, karena pusat nda bisa merespon..."*³⁸

Pemahaman Aceh sebagai entitas sosial dan politik yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan politik lainnya, telah tergambarkan pada masa Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini Aceh mempunyai sikap politik anti sentralisasi terhadap kekuasaan Pusat. Sikap politik ini jelas sekali tergambar pada masa Gerakan Daud Beureueh maupun pada Gerakan Aceh Merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa kuatnya *historical memory* masyarakat Aceh pada masa lampau dan dapat membentuk adanya kesadaran sejarah setiap lintas generasi masyarakat Aceh. Ketika kesadaran sejarah ini telah dipahami oleh

³⁵ Wawancara Muhamad Amin Hasan di Mounmot, Aceh Timur, pada tanggal 18 Agustus 2009.

³⁶ Apa yang narasumber pahami bahwa Aceh tidak pernah di jajah sebenarnya merupakan hasil indoktrinasi yang ada pada prajurit GAM oleh para petinggi GAM dimana sejarah di "bengkokkan demi mendukung pembenaran tindakan".

³⁷ Wawancara dengan Ismuha di Raja Tuha, Manyakpayet, Aceh Tamiang pada tanggal 16 Agustus 2009.

³⁸ Wawancara dengan Ismuha di Raja Tuha, Maayakpayet, Aceh Tamiang, pada tanggal 16 Agustus 2009.

setiap anggota masyarakat maka kesadaran sejarah dapat berubah bentuk sebagai kesadaran sejarah bersama. Hal ini disadari betul oleh pemimpin-pemimpin gerakan yang ada di Aceh. Dengan demikian pemahaman sejarah pada masa lampau dijadikan sebagai *will event*.³⁹

Dengan demikian kesadaran bahwa Aceh adalah negara yang merdeka terus ada dan mengendap dalam ingatan sosial masyarakat Aceh. Aceh adalah sebuah negara yang merdeka dibangun dari konsep-konsep Islam dimana “negara Aceh” adalah negara yang didasarkan pada syariat Islam.

Kesadaran dan keinginan untuk mewujudkan negara merdeka semakin kuat ketika negara Aceh disandingkan dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh dihadapkan pada realita bahwa mereka sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun pemahaman itu menjadi kabur ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi bagian yang “terpisah dari sejarah Aceh” atau bahkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi bagian kelim dari sejarah Aceh. Hal ini menjadikan NKRI dipisahkan dari sejarah Aceh. Dengan demikian pemahaman tentang Indonesia sangat minim dalam ingatan masyarakat Aceh dan “Indonesia sebagai negara” terpinggirkan dan tergeser oleh imajiner *nation* Aceh.

5.5.1 . Perang Sabil : Roh Perjuangan Masyarakat Aceh

Kisah Perang Sabil menjadi ideologi yang berkembang pesat pada saat konflik berkecamuk. Apa yang istimewa dari konsep ideologi perang Sabil di Aceh ? Ideologi ini sudah ada pada saat Belanda mengumumkan perang terhadap Kerajaan Aceh. Untuk

³⁹ Taufik Abdullah , “ Dari Sejarah Lokal ke Kesadaran Sejarah Nasional: Beberapa Polemik Metodologis”, dalam Tengku Ibrahim Alfian , dkk., *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989, hlm. 235.

memberikan semangat perjuangan melawan bangsa asing (*kaphe*), unsur keagamaan dijadikan sebagai penopang perlawanan terhadap pihak lawan. Oleh sebab itu, sesuai dengan agama yang mereka anut, kaum ulama menawarkan Islam sebagai basis gerakan. Pada masa terjadinya konflik, Islam di tangan para ulama ditransformasikan ke dalam ideologi perlawanan dan akhirnya Islam terbentuk secara tipikal dan komprehensif menjadi ideologi perang.

Pada tanggal 26 Maret tahun 1873 Belanda mengumumkan perang terhadap Kerajaan Aceh setelah Aceh menolak kedaulatan Belanda. Perang melawan Belanda tidak terelakan lagi. Pada agresi tersebut Seri Paduka Baginda Muda Tuanku Hasyim berusaha memompakan semangat perjuangan kepada rakyatnya untuk melawan kekuatan Belanda. Tuanku Hasyim menggunakan saluran agama sebagai penggerak massa. Ideologi Islam tentang Perang di jalan Allah menjadi roda penggerak massa. Ideologi *Jihad Fisabilillah* dikobarkan sebagai visi perjuangan masyarakat Aceh.

Agama memainkan peran yang sangat penting sehingga agama dan politik dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang sama. Ideologi Perang Sabil diangkat sebagai dasar penggerak melawan kekuatan lawan. Dalam penyampaian dilakukan melalui cerita-cerita fiksi yang berangkum dalam Hikayat Perang Sabil. Hikayat Perang Sabil telah berkembang di dalam masyarakat Aceh pada abad XVIII.

Ketika Negeri Aceh dilanda serangan dari bangsa Belanda, banyak berkembang hikayat perang. Hikayat bagi orang Aceh berupa cerita fiksi yang berisi butiran-butiran pengajaran moral. Dalam hikayat perang Sabil dinyatakan bahwa siapa yang mati dalam perang melawan musuh yang dianggap *kaphe'* (kafir) adalah mati syahid dan akan

diampunkan segala dosanya. Berikut cuplikan Hikayat Perang Sabil yang didendangkan pada masa konflik Aceh :

Subhanallahuwahdahu Wabiham Dihi

Khalikul Badri Wallaili Aza Wajalla

Ulom Pujeopo Sidruupo Allahu Rabbi

Keukama Nabi Beusuci Aceh Merdeka

Beudah hairakan Tajakprang Dum sitrei Nabi

Yang neu ungki, benangkri keupa Yang Esa

Soe yang Hantem prang sep malang Tuhanku Nabi

Syurga Tinggi hon Nabi dudoe ceulaka

Terjemahan

Subhanallahuwahdahu wa bihamdihi

Khalikul Badri wallaihi aza wa jalla

Kami puji Tuhan, Ya Rohman, Yang Maha Suci

Tolonglah kami Illahi Aceh Merdeka

Bangunlah hai kawan berperang si musuh Nabi

Yang tidak ta'ati, aturan hukum Yang Esa

Yang tak mau perang, malang sial jadi

Kemudian hari mimpi dapat surga

Dengan demikian Islam tertransformasikan ke dalam ideologi perang dan berlanjut hingga masa konflik berlangsung di Aceh. Islam dijadikan sebagai sarana agitasi politik untuk mengadakan perlawanan, membentuk identifikasi diri. Islam telah berubah menjadi

"agama rakyat" yang secara mendalam mempengaruhi hubungan sosial dan tingkah laku budaya masyarakat Aceh. Dalam posisi inilah Islam telah membentuk masyarakat Aceh sebagai kelompok etnik tersendiri ketika ajaran itu mengalami "Acehnisasi".

5.5.2. *Adat Tullah, Adat Mahkamah, dan Adat Tunah* : Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Aceh

Dalam kehidupan masyarakat Aceh, ada tiga hukum adat yang dipegang secara ketat, yaitu *Adat Tullah, Adat Mahkamah, dan Adat Tunah*. Ketiga hukum adat ini akan berjalan seiring dengan dinamika masyarakat Aceh. Ketika masyarakat Aceh mentransformasikan diri mereka dalam Islam maka masyarakat Aceh menerapkan nilai-nilai Islam sebagai dasar dalam bersikap, bertindak, dan berpikir secara Islami. Nilai-nilai ke-Islam-an ditransformasikan dan membentuk "identitas sebagai orang Aceh" dengan atribut- dan simbol-simbol ke-Islam-annya.

Dalam kerangka konflik antara GAM-RI, nilai-nilai ke-Islam-an yang termuat dalam *hukum Adat Tullah*⁴⁰ dijadikan dasar nilai yang ada pada masyarakat Aceh. Dengan demikian bagi masyarakat Aceh, nasionalisme dan keyakinan agama telah bercampur. Setiap anggota GAM tidak dapat memisahkan antara keyakinan agama Islam dengan perjuangan politik dalam memperjuangkan Aceh merdeka.

Hukum-hukum Islam dijadikan sebagai motivasi perjuangan, seperti yang diungkapkan oleh seorang *Inong Balee* sebagai berikut:

⁴⁰ Adat Tullah ialah aturan-aturan dan ketentuan yang berdasarkan Kitabullah (Al Quran). Muhammad Umar, 2002, Banda Aceh: Busafat, hlm.14.

"... Di hutanpun ada pernikahan, aku ngaji dan sholat tak tinggal. Kalau kita sedang lari di hutan nggak ingat apa-apa lagi yang diingat cuma Allah..."⁴¹

"... Menanggapi pertanyaan tentang penerapan peraturan yang berlaku di masyarakat, saya lihat undang-undang yang ada sekarang bukan undang-undang yang benar karena sisa-sisa undang-undang orang Belanda. Kenapa kita tidak menggunakan syariat saja. Saya lebih senang kalau di Aceh menggunakan peraturan syariat tapi yang di atas-atas tidak sesuai. Macam kalaulah dah buat salah mereka tidak pakai syariat untuk hukum dirinya. Kalau Syarikat Nanggroe didirikan dan semua orang juga bapak pejabat dikenakan, buat salah dicambuklah tapi mereka tak kena, mana mau dicambuk..."⁴²

Ada harapan yang sangat besar terhadap implementasi hukum-hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh sebagai dasar dalam mencapai perjuangan mereka. Islam memegang peran yang sangat dalam bagi perjuangan Gerakan Aceh Merdeka. Dengan demikian tidak realitis ketika perjuangan GAM dipisahkan dengan nilai-nilai ke-Islam-an.

"... Saya tertarik pada perjuangan GAM karena memperjuangkan kepentingan umat, nda salah dengan agama. Ini konsep sama dengan Islam..."⁴³

Dalam upaya melegitimasi terhadap gerakan yang mereka lakukan juga berdasar pada hukum *tunah*, sebagai contoh ketika mereka "berhadapan" dengan etnis

⁴¹ Wawancara dengan Nurgayah di Sinebouk, Aceh Timur pada tanggal 16 Agustus 2009.

⁴² Wawancara dengan Zainal Abidin di Kuala Langsa, Kota Langsa pada tanggal 19 Agustus 2009.

⁴³ Wawancara dengan Muh. Yatim Usman di Hagu Barat Laut, Kota Lhokseumawe, pada tanggal 19 Agustus 2009.

lain di Aceh terutama etnis Jawa, orang-orang Aceh membuat tatalaku dengan adat *Seumando bak labu*. Konsep ini diberlakukan ketika orang-orang Aceh merasa “kalah” bersaing dengan etnis pendatang terutama etnis Jawa yang mereka diibaratkan sebagai bentuk “kolonialisme Jawa”. Keberhasilan orang Jawa dan penguasaan aset-aset ekonomi oleh orang Jawa diibaratkan dengan menjalarnya pohon labu yang mengintervensi wilayah sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Aceh. Dengan demikian nilai-nilai yang ada di masyarakat digunakan juga dalam perjuangan masyarakat Aceh.

5.6. Daerah Operasi Militer: Kebijakan dengan Paradigma Militer

Permasalahan-permasalahan konflik yang muncul dan kemudian menjadi gerakan-gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan terus berkembang di Aceh dan melibatkan sebagian masyarakat Aceh. Sejak Orde Baru mengganti kekuasaan Orde Lama di Indonesia, rezim Orde Baru mengadopsi *developmentalism* yang ditopang oleh pendekatan keamanan tradisional (*traditional security*).⁴⁴ Kondisi politik yang diciptakan oleh Orba berasal dari pendekatan keamanan, akan menekankan dan sekaligus terjadinya penekanan pada kebebasan berpolitik. Perbedaan-perbedaan suatu konsep terhadap kebijakan pemerintah akan dimaknai oleh pemerintah sebagai bentuk penentangan dan merupakan ancaman bagi stabilitas keamanan negara. Dengan pendekatan *traditional security* ini menempatkan alat keamanan negara seperti TNI/POLRI dijadikan sebagai alat untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Hal ini dapat menyebabkan adanya tindakan-tindakan koersif⁴⁵ dan tidak akan mampu menyelesaikan masalah konflik secara permanen. Penyelesaian terhadap

⁴⁴ Jeong, *Peace and Conflict Studies: An Introduction*, England: Ashgate Publishing Company, 2003, hlm.367.

⁴⁵ Perilaku dan tindakan yang berupa ancaman, baik yang non kekerasan maupun kekerasan. Sedangkan perilaku nonkoersif adalah perilaku berupa kerjasama, menjajik.in hadiah dan persuasif. O tomar J. Bartos dan Paul Wehr, *Using Conflict Teori*, New York: Cambridge University Press, 2002, hlm.175.

konflik-konflik vertikal antara GAM dan RI dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan militer, baik oleh GAM maupun oleh pemerintah RI. Sampai berakhirnya rezim Soeharto, yang diklaim sebagai rezim yang mengeksploitasi Aceh, pendekatan militer yang dilakukan oleh pemerintah RI dianggap berhasil menurut paradigma militer. Namun dampak dari pendekatan penyelesaian konflik dengan tekanan dan kekuatan militer ternyata menorehkan luka yang amat dalam bagi masyarakat Aceh.

Kekerasan politik dalam bentuk penggunaan kekerasan fisik dan tekanan militer justru dapat membentuk solidaritas sosial yang semakin besar bagi komponen-komponen masyarakat seperti bola salju yang semakin membesar tatkala TNI-POLRI bertindak sewenang-wenang. Masyarakat Aceh merasa kecewa dengan agresifitas yang diperlihatkan oleh alat keamanan negara, yaitu TNI/POLRI. Kondisi ini justru membangkitkan kembali tradisi militer yang ada pada masyarakat Aceh dengan semangat Perang Aceh pada masa perang melawan Belanda. Ingatan sosial terhadap agresifitas militer menjadikan militer dianggap sebagai "alat pemusnah" bagi eksistensi Aceh, seperti yang telah dilakukan oleh Belanda pada abad sebelumnya. Hal ini terlihat pada ungkapan untuk para alat negara TNI/POLRI sebagai "*Pai*" atau "*Kape*"⁴⁶. Tragedi yang menyertai ketika tentara membuka senjata (*open fire*) dianggap sebagai kegagalan tentara melakukan pendekatan persuasif untuk memahami dinamika masyarakat Aceh yang tengah merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah Pusat.

Dengan demikian keterlibatan masyarakat Aceh dalam gerak perjuangan kolektif masyarakat Aceh melawan pemerintah, setidaknya-tidaknya mereka bersimpati dan memberikan dukungan moral sebagai masyarakat yang mempunyai *kesamaan sejarah*

⁴⁶ Sebutan *Pai* dan *Kape* terhadap militer diberikan masyarakat Aceh untuk tentara Marsose Kolonial Belanda.

Aceh dan berbalik memihak GAM. Salah satu nara sumber menyatakan keikutsertaan masyarakat Aceh secara aktif maupun hanya sekedar simpati juga dijumpai pada etnis lain di Aceh, seperti orang-orang Padang.

"... Orang banyak bantu kita orang Padang, kami sering ke situ. Kata mereka wajar kalau Aceh bergerak..."⁴⁷.

Situasi di lapangan semakin memanas ketika hampir semua lini masyarakat ikut berpartisipasi dalam perjuangan GAM. Kondisi ini semakin meradang ketika pada tahun 1989 mulai masuk pejuang-pejuang GAM yang telah dilatih di kamp-kamp Libya sejak tahun 1980an mulai datang dan menjadi kekuatan inti dari militer GAM. Mereka tidak kalah profesional dengan pasukan TNI-POLRI sehingga menjadi kekuatan GAM bertambah kuat tatkala berhadapan dengan militer RI. Melihat dukungan rakyat Aceh yang semakin meningkat terhadap GAM, pemerintah RI merespon dengan cepat kondisi ini.

Untuk merespon terhadap kondisi yang ada di Aceh, pemerintah dengan perpanjangan tangannya, menggunakan aparat keamanan untuk "mengamankan" kondisi yang ada di Aceh. Aparat keamanan menggunakan "taktik kontra insu:geni" yaitu penyelesaian keamanan dengan taktik lawan gerilya terhadap taktik gerilya GAM dengan menggunakan pendekatan terapi kejut atau *shock therapy*. Pendekatan keamanan dengan terapi kejut ini menempatkan segala bentuk aksi menentang kebijakan pemerintah Pusat sebagai bentuk oposisi terhadap pemerintah yang harus diamankan.

⁴⁷ Wawancara dengan D.A Rahman di Matang Ara, Manyakpayet, Aceh Tamiang, pada tanggal 16 Agustus 2009.

Pemberlakuan pendekatan terapi kejut di wilayah Aceh menimbulkan aparat keamanan berada di posisi sebagai pihak yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat Aceh, yang sedang menuntut keadilan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Pusat.

"...Tentra suka pukul orang-orang kampung, suka minta makanan menembak di depan orang, saya takut tentra. Kalau ditanya-tanya GAM suka kena pukul. Di dusun Monmut kita hidup baik dengan orang GAM, tapi kita tidak mau kasih tau GAM..."⁴⁸

Efek dari penerapan terapi kejut ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan menjadikan wilayah Aceh memasuki masa-masa yang penuh teror. Pada gilirannya kondisi ini menjadikan semakin rasa tidak percaya masyarakat terhadap Indonesia sebagai negara yang (seharusnya) mampu melindungi rakyatnya sendiri dan mampu memberikan rasa aman. Kehidupan di bawah tekanan militer yang terus menerus justru mengakumulasi secara psikologis keinginan secara kolektif untuk membangkang terhadap rezim yang menekan. Dalam hal ini rakyat Aceh berusaha untuk mengadakan pembontakan terhadap kebijakan pemerintah Pusat. Dan pada gilirannya sebagian masyarakat Aceh, terutama yang terkena dampak langsung dari aksi militer, akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan GAM dan membentuk pola gerakan dengan dasar pemikiran bahwa merdeka adalah satu satunya cara mengakhiri segala bentuk ketertekanan yang mereka alami.

Namun pemerintah RI sekali lagi mengambil kebijakan yang berkaitan dengan konflik vertikal antara GAM-RI, justru dengan mengutamakan operasi militer. Puncak dari kegagalan pendekatan penyelesaian konflik yang terjadi dalam waktu yang lama di Aceh

⁴⁸ Wawancara dengan Muhamad Amin Hasan di Munmot, Aceh Timur, pada tanggal 18 Agustus 2009.

adalah diberlakukannya wilayah Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1989 – 1998. Pada perkembangannya militer tidak hanya menargetkan pada sasaran pokoknya, yaitu satuan-satuan GAM tetapi juga menargetkan masyarakat sipil yang dipercaya berpotensi mendukung GAM. Kondisi di lapangan secara umum, dengan diberlakukannya Aceh sebagai wilayah DOM mendorong munculnya gejala sosial yaitu adanya kecenderungan mengenai keberpihakan atau simpati rakyat Aceh terhadap perjuangan GAM, meskipun masyarakat sipil tidak secara langsung sebagai aktor yang berhadapan-hadapan dengan militer sebagai lawan utama.

Diberlakukannya DOM memancing kemarahan sebagaian besar masyarakat Aceh sehingga mereka semakin menentang terhadap pemerintah Pusat dan meningkatkan dukungan kepada GAM, walaupun tidak dilakukan secara terbuka karena rasa takut atau terancam oleh aparat keamanan. Dari sebagian responden yang ada ketika ditanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pemberlakuan DOM mengatakan bahwa DOM merupakan tindakan yang sangat melukai nurani masyarakat Aceh dan semakin menumbuhkan rasa benci terhadap pemerintah Pusat. Pemerintah dianggap bertindak di luar kemanusiaan dan menginjak-injak harkat dan martabat masyarakat Aceh. Pembunuhan, sewenang-wenangan, penangkapan yang tidak sah, penyiksaan, dan segala bentuk intimidasi yang dilakukan oleh aparat keamanan sangat membekas dan menjadi daya gerak untuk lebih meningkatkan perlawanan mereka. Namun tidak jarang mereka menyadari tindakan aparat keamanan dimana mereka hanyalah menjalankan tugas negara dalam keadaan perang.

Dalam konteks inilah pemberlakuan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer mempunyai arti mendalam bagi masyarakat Aceh, sebagaimana yang dituturkan beberapa responden:

"... Kebijakan DOM telah membuat orang Aceh terbakar semangatnya. Dulu rakyat Aceh yang tidak ikut perjuangan menjadi ikut berperang. Bayangkan saja kadang kita sedang duduk bertiga datang Tentara kita lari karena takut bukan salah, terus ditembak, yang lainnyapun akan kena jerat..."⁴⁹.

" Waktu diberlakukan DOM tahun 2000 di daerah kita orang nda berani keluar apalagi kalau sudah ada tembak-menembak. Kita tidak bisa bebas, operasi KTP sering berakhir dengan tindakan pukulan, apalagi pada orang yang diduga terlibat GAM..."⁵⁰

".....Masa DOM salah satu keluarga saya, adik saya menjadi korban.. kita menuntut hak tapi Jakarta memberi kami peluru..."⁵¹

"... Saya tahun1990 berangkat ke Malaysia, yang ada dalam: hati saya merubah nasib, karena di sini kita tidak ada pekerjaan. Merantau waktu itu bukan karena GAM. Sebagian orang Aceh berduyun-duyun kerja di Malaysia pada tahun-tahun1990. orang-orang Aceh berduyun-duyun ke Malaysia, anak perempuan tua-muda, ditangkap oleh tentara malaysia karena dianggap migran gelap. Saya baca dikoran-koran kok nda seperti biasanya, orang yang datang ke Malaysia biasanya anak musa yang mencari kerja, ini kok jumlahnya banyak dan banyak anak-anak, ibu-ibu bahkan ibu hamil, orang tua datang ke Malaysia. Mereka ditangkap.

⁴⁹ Wawancara dengan D.A Rahman di Matang Ara, Manyakpayet, Aceh Tamiang, pada tanggal 16 Agustus 2009.

⁵⁰ Wawancara dengan Syarifah, masyarakat sipil, di Kota Langsa pada tanggal 18 Agustus 2009.

⁵¹ Wawancara dengan Hanafi, mantan combatan di Kuala Langsa, Kota Langsa pada tanggal 18 Agustus 2009.

Waktu kami datang untuk menemui orang-orang ini kami tidak dikasih masuk, kami datang sampai tiga kali. Baru datang ke tiga kali kami dikasih masuk. Kami tanya kok disini? Dia bilang daripada kita mati di Aceh, biarlah mati disini. Taulah orang Aceh malam diambil pagi tinggal nama, mana ada yang dibuang dikarung goni, dibuang di perbatasan, istri diperkosa, dibunuh ditaruh di tepi jalan.. Bila ayahnya dicurigai bapak ditangkap anaknya juga ditangkap, kena pukul istrinya. Rumah dibakar buat kita ketakutan.jadi itulah Hal ini buat saya berpikir negara kok bunuh seperti ini. Itulah yang menyayat ,itulah yang buat sayadendam dan berpikir bergabung dengan GAM. Kami lebih baik mati, kita sudah diinjak-injak harkatnya.

Pada mulanya saya ingin menuntut keadilan, sampai beberapa waktu kita mau tidak mau harus punya negara sendiri, karena Pusat nda bisa merespon...⁵²

5.7. SIRA: Referendum Jembatan Demokratis GAM Menuju Kemenangan

Pada saat dihentikannya pemberlakuan Daerah Operasi Militer tahun 1998 dan momen jatuhnya rezim Soeharto, di Aceh terjadi adanya upaya pemberlakuan strategi perjuangan nonmiliter dengan mengupayakan dilakukannya referendum. Upaya ini dimotivasi oleh gerakan perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh rakyat Timor-Timur, sehingga apa yang dilakukan oleh rakyat Aceh dengan upaya Referendum sebagai "cetak biru" merdeka sebagaimana Timor-Timur.

Upaya pemberlakuan strategi perjuangan nonmiliter dimotori oleh SIRA (Sentral Informasi Referendum untuk Aceh). Organisasi ini dibentuk pada tahun 1999 dengan

⁵² *Wawancara dengan Teuku Suum di Kuala Langsa, Kota Langsa pada tanggal 13 Agustus 2009.*

mengusung isu referendum Aceh sebagai jalan demokrasi dalam rangka memecahkan masalah konflik di Aceh. SIRA diusulkan sebagai sayap politik GAM

Upaya referendum yang dilakukan oleh SIRA tidak dapat terealisasi pada tahun 2001 dan tidak membawa dampak yang signifikan. Menurut Jeong upaya yang dilakukan oleh SIRA dengan menempuh jalan demokrasi penyelesaian konflik termasuk dalam kategori perdamaian negatif.⁵³ Meskipun pemerintah memberikan otonomi khusus terhadap Aceh dan pemberian hak kepada Aceh untuk mengimplemantasikan hukum syariah, sebagai bentuk “reaksi hibrida” yang diputuskan oleh pemerintah Pusat terhadap Aceh. Namun demikian upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak membawa perubahan karena realita di lapangan operasi militer dan bentrokan antara GAM dan militer Indonesia masih tetap berlangsung.

Upaya perdamaian dari pihak-pihak organisasi non pemerintah yang menjembatani perdamaian pada tahun-tahun berikutnya juga mengalami kegagalan seperti pada tahun 2000 yang dimotori oleh Henri-Dunant Centre(HDC) gagal karena GAM menolak negoisasi pergantian tujuan gerakan mereka untuk merdeka dengan otonomi khusus, sedangkan di pihak pemerintah Pusat tidak mengijinkan GAM mentransformasikan diri menjadi partai Politik.

Sebuah upaya Kesepakatan Penghentian Permusuhan (*Cessation of Hostilities Agreement* atau *CoHA*) yang diadakan pada tahun 2002 mengagendakan 4 hal yaitu:

1. Keamanan berupa penghentian kontak senjata dan kekerasan, penentuan zona damai, demiliterisasi serta reformulasi Brigade Mobil (Brimob) di Aceh menjadi Polisi Sipil

⁵³ Jeong, *op.cit.* hlm.24. Perdamaian negatif terfokus pada tidak adanya kekerasan langsung. Upaya pemecahan konflik dan kekerasan membutuhkan cara-cara negoisasi dan mediasi daripada memilih paksaan fisik.

2. Humanitarian yaitu penyaluran bantuan kemanusiaan
3. Rekonstruksi dan rehabilitasi bagi korban kekerasan dan pembangunan kembali fasilitas umum.
4. Dialog dengan menciptakan ruang sipil yang lebih luas.

Perdamaian dalam Jeda Kemanusiaan dan CoHA hanya dimaknai sebagai penghentian tembak-menembak serta ganti rugi bagi para korban tanpa melihat rantai kekerasan dan akar kekerasan yang harus diputus dan tidak dijadikan warisan dalam menyelesaikan perselisihan. Hal ini di utarakan oleh M.Yatim Usman

"...konsep perdamaian yang ada sampai sekarang belum jelas, sehingga kita selalu merasa dibohongi oleh pemerintah Pusat.. Pemerintah selalu mencap terjadinya ketidaksepahaman pada perjanjian selama ini sebagai ulah GAM pemberontak dan perdamaian hanya berumur satu dua hari akhirnya kembali terjadi konflik.."

Kegagalan perjanjian-perjanjian dari pihak GAM dan RI karena kedua belah pihak masih bertumpu pada penyelesaian militer seperti penarikan pasukan dan pembentukan zona-zona damai dan sebagainya, tanpa melihat akar permasalahan sebagai dasar penyelesaian konflik.

5.8. Nota Kesepahaman (MoU Helsinki) dan Arti Kemerdekaan

Secara umum, sebagian besar penduduk Aceh diidentifikasi (identik) dengan GAM atau setidaknya mendukung (alasan) perjuangan GAM. Banyak pengamat yang mengemukakan bahwa sebagian besar masyarakat Aceh pada masa konflik senjata antara GAM-PI memberikan dukungan kepada GAM dan mendukung usul untuk Aceh

merdeka. Hal ini menjadi motor penggerak lajunya GAM dalam upaya mewujudkan cita-cita perjuangan untuk merdeka. Namun dipihak "lawan", Pemerintah berusaha untuk menghambat lepasnya Aceh dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan didasarkan pertimbangan politik dan ekonomi, dan sejarah.

Namun ketegangan mulai tercairkan setelah terjadinya Tsunami yang memporandakan sebagian besar wilayah Aceh dengan korban jiwa dan harta benda yang sangat besar. Meskipun peristiwa Tsunami bukan sebagai *prime factor* tetapi setidaknya memberikan dampak pada kondisi di Aceh dan sangat mempengaruhi terhadap sikap dan tindakan kedua belah pihak, yaitu GAM dan RI untuk kembali membuka negosiasi damai dengan pertimbangan adanya proses rekontruksi Aceh. Negoisasi ini berjalan dengan mediasi dari lembaga nonpemerintah dari Finlandia yaitu *Crisis Management Inisiatif* (CMI) di Helsinki. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai tuntutan yang datang untuk menyelesaikan masalah Aceh menjadi daya tekan dan menggiring ke dua belah pihak untuk berdamai.

Dalam Nota kesepahaman damai ini dinyatakan bahwa "... kedua belah pihak menyakini bahwa penyelesaian damai atas konflik yang terjadi merupakan satu-satunya hal yang memungkinkan dibangunnya Aceh kembali...". Namun demikian pembukaan negosiasi damai ini pada awalnya hanya sedikit menimbulkan efek pada situasi di lapangan dimana konflik bersenjata masih terjadi antara kelompok GAM dan satuan TNI-POLRI.

MoU pada awalnya menimbulkan kesangsian dari sebagian besar masyarakat Aceh pada khususnya dan masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya. Mou Helsinki disangsikan mampu menghentikan pertumpahan darah di Aceh. Hal ini didasarkan pada usaha-usaha damai sebelumnya yang bersifat prematur dan selalu terjadi kembali

kekerasan di Aceh, seperti pada masa Jeda Perdamaian dan usaha CoHA dimana kenyataan di lapangan terjadi kontak-kontak senjata antara GAM dengan militer.

Dari hasil wawancara dengan beberapa nara sumber, mereka memberikan gambaran yang jelas tentang kegagalan upaya damai tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Zainal :

...” bagi kami masih meraba-raba apa yang terjadi dengan pelaksanaar. Mou Helsinki, karena seperti upaya perdamaian yang dulu-dulu tetap saja kita masyarakat Aceh ditembaki aparat, tapi Gam juga yang dikatakan salah...”⁵⁴

Kondisi ini bergeser berubah ketika perjanjian damai ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005. Antara GAM dan RI menyepakati 6 butir Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh pihak Pemerintah RI dan pihak GAM, antara lain:

1. Transformasi GAM menjadi Partai Politik lokal.
2. GAM membatalkan permintaannya untuk merdeka dan ditukar dengan “pemerintahan-sendiri” untuk Aceh dalam rangka otonomi khusus.
3. Diberikan amnesti umum untuk pejuang dan aktivis GAM yang ditahan
4. Indonesia menarik pasukan nonorganik (kurang lebih sebanyak 25.000 prajurit) dari Provinsi Aceh dalam waktu tiga bulan.
5. Demiliterisasi GAM dalam waktu tiga bulan setelah penandatanganan perjanjian.
6. Mendirikan Misi Pemantau Aceh (*Aceh Monitoring Mission*) yang tidak bersenjata, terdiri dari perwakilan Uni Eropa dan beberapa negara ASEAN; misi ini akan melakukan pemantauan langsung penarikan pasukan Indonesia dan proses demiliterisasi.

⁵⁴ Wawancara dengan Zainal dkk. di Kuala Langsa, Kota Langsa, pada tanggal 15 Agustus 2009.

Nota Kesepahaman yang tertuang dalam Mou Helsinki merupakan upaya perdamaian yang tidak hanya berada dalam ranah keamanan dan kemiliteran saja, namun lebih dari itu, Nota Kesepahaman ini mencakup wilayah yang bersifat multi sektor antara lain sektor politik, sosial, hukum, bahkan masalah-masalah budaya.

Upaya penyelesaian diupayakan berdasarkan pada basis ke-Islam-an dan pendekatan-pendekatan budaya ke-Islam-an yang menjadi daya ikat yang kuat pada masyarakat Aceh. Hal itu ditandai antara lain dengan mengaktifkan kembali Wali Nanggroe dan penyusunan *Qomun* (Peraturan Daerah). Selain itu juga merupakan penyelesaian berbasis kultur masyarakat Aceh yang kuat. Upaya ini rupanya membawa angin segar bagi upaya perdamaian dan rakonsiliasi konflik di seluruh wilayah Aceh.

Beberapa nara sumber memberikan harapan yang sangat besar bagi pelaksanaan MoU Helsinki:

"... Pernah dengar katanya kita damai merdeka Aceh. Ada dengar orang-orang GAM katanya kita merdeka. Damai tidak prang (perang) lagi..."⁵⁵

"...Bagi saya MoU jalan tempat kita perjuangan bisa dapat, tapi ingat kalau pemerintah tak dapat laksanakan dan bohongi rakyat Aceh, pastilah akan ada lagi gerakan macam konflik kemarin. Kita orang Aceh yang selalu pegang janji, kita diambil semua harta untuk Jakarta, kita hanya nuntut hak kita Aceh. Beri kebebasan untuk mengelola Aceh jangan ganggu Aceh lagi dan jangan bohongi Aceh. Pasti kita lawan orang kaphe'..."⁵⁶

⁵⁵ Wawancara dengan Ibrahim Hasan di Selamahmudah, Peurlak, Aceh Timur, pada tanggal 18 Agustus 2009.

⁵⁶ Wawancara dengan Zainal Abidin di Kuala Langsa, Kota Langsa, pada tanggal 18 Agustus 2009.

"...Bagaimana untuk menjadi perdamaian, kalau tidak kita jaga. Perdamaian satu dua hari, apalagi teman saya kan ada persoalan panjang. Apalagi teman saya di Eropa, Amerika, di Australia tidak ada arah otonominya. mereka semua tidak setuju dengan perdamaian ini, mereka masih menuntut kemerdekaan. Jadi artinya kemerdekaan yang luas kalau ekonomi, yang luas, keamanan nda merdeka. Isikan perdamaian dengan kemerdekaan, seluruh lini, konsep perdamaian harus dipahami..."⁵⁷

"....Mou Helsinki merupakan perubahan strategi perjuangan GAM, sebenarnya perjuangan kita masih panjang kita masih ada garis komando. Kita belum arti damai. Apa yang ada di Helsinki (Mou maksudnya) harus diwujudkan, seperti disintegrasi (reintegrasi maksudnya), kemakmuran orang Aceh. Pencapaian Helsinki dianggap tepat. dimana eksekutifnya sudah dikuasai GAM kemudian legislatifnya harus masuk. Mou menjadi tujuan akhir, kalau pemerintah melaksanakan MoU Helsinki di bumi Aceh.maka sejahteralah kita . tidak ada lagi kata merdeka lagi, kita NKRI. Tapi kalau pemerintah mengkhianati ini akan berubah lagi. Kita komitmen menerima 5 hal..."⁵⁸

Namun demikian tidak semua responden mengerti keberadaan MoU Helsinki dan memahami makna MoU tersebut. Hal ini dijumpai pada beberapa nara sumber yang mengakui tidak tahu dan kurang dapat memaknai MoU.

⁵⁷ Wawancara dengan M. Yatim Usman di Hagu Barat Laut, Kota Lhokseumawe pada tanggal 19 Agustus 2009.

⁵⁸ Wawancara dengan Ismuha di Raja Tuha, Manyakpayet, Aceh Tamiang, pada tanggal 16 Agustus 2009.

5.9. **Tata Pemerintahan di Aceh : Penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh yang Berbasis Syariah.**

Dalam pembentukan tata pemerintahan harus berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut dengan masalah keagamaan di Aceh. Aceh tumbuh sebagai wilayah dimana kehidupan masyarakatnya bertumpukan pada ajaran keagamaan yaitu Islam. Nilai-nilai ke-Islam-an yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat menjadi dasar-dasar pembentukan nilai-nilai (*value*) yang ada.

Apabila kita cermati sepanjang perjalanan sejarah Aceh, Islam selalu menjadi nilai dasar dalam kehidupan dan sejauh ini nilai-nilai ke-Islam-an menunjukkan peran yang sangat besar dan menentukan arah politik di Aceh. Peran di masa depanpun tidak akan lepas dari keterkaitan dengan agama Islam. Salah satu elemen dasar pembentukan nilai adalah hukum. Hukum yang ada di Aceh berkaitan dengan hukum Syariah, walaupun sejauh ini terdapat beberapa kesimpangsiuran konsep dan ketidakjelasan tujuan yang besar tentang bagaimana dan dengan cara apa hukum Syariat dijalankan di Aceh.

Seperti dalam cuplikan berita di bawah ini yang menggambarkan kondisi tersebut:

"....Misalnya dalam urusan pernikahan, orang Aceh mempunyai dua surat yaitu surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA dan surat Kaleuh Meunikah sejenis surat nikah yang dikeluarkan oleh GAM. Pernikahan ala Gam dilakukann oleh penghulu yang ditunjuk oleh GAM. Kartu identitas diri GAM mengeluarkan TPD alias Tanda Peuturi Droë dan memiliki KTP dan untuk pengurusannya dilakukan di rumah kepala desa (keucik).

Kantor kepala desa di Aceh digantikan oleh Ulee Sagoe, semacam pemimpin GAM di tingkat kecamatan. LKMD berganti menjadi Tuha Peut dan

Tuha Lapan. Lumpuhnya birokrasi ala Jakarta diyakinani sebagai hilangnya kepercayaan penduduk Aceh kepada pemerintahan Pusat. Namun melemahnya birokrasi juga disinyalir karena desakan GAM, misalnya diminta mundur beberapa keucik dan jika tidak mau mundur maka akan dianggap tidak mau mendukung kemerdekaan Aceh...⁵⁹

Kejelasan tentang hukum Syariah yang ada di Aceh menunjukkan titik terang.

Salah satu tonggak penting bagi masa depan perdamaian Aceh adalah keberhasilan dengan disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) pada tanggal 11 Juli 2007. Dengan disahkannya Undang-Undang Pemerintah Aceh tersebut maka secara formal Aceh mempunyai "keistimewaan" dalam sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Meskipun demikian, UUPA ini diterima secara beragam oleh berbagai elemen masyarakat di Aceh. Ada yang berpendapat, UUPA ini terobosan baru yang diharapkan bisa menjadi pintu masuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Akan tetapi banyak juga yang menilai UUPA ini banyak cacat, terutama adanya sejumlah pasal yang dinilai bertentangan dengan isi dan semangat MOU Helsinki.

Undang –Undang Pemerintah Aceh meski mendapat respon pro dan kontra tetapi secara umum mencerminkan Nota Kesepahaman Helsinki. Adapun isi dari Undang-Undang Provinsi Aceh antara lain:

1. Kewenangan pengelolaan minyak dan gas akan dilakukan bersama antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah Aceh.
2. Aceh akan mendapatkan 70% dari hasil sumber daya alam (minyak dan gas bumi)

⁵⁹ "Satu provinsi dua Birokrasi", dalam *Kompas* tanggal 18 Februari 2001.

3. Aceh akan mendapatkan tambahan dana otonomi khusus selama 20 tahun. Pada 15 tahun pertama, besarnya adalah 2% dari total plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Pada 16 sampai tahun ke 20, besarnya 1% dari total Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.
4. Setiap pelaku usaha pertambangan WAJIB menyiapkan dana pengembangan masyarakat.
5. Pemerintah menyisihkan minimal 30% dari dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk membiayai pendidikan di Aceh.
6. Penduduk Aceh berusia 7 hingga 15 tahun mendapat pendidikan dasar GRATIS, tanpa dipungut biaya.
7. Pemerintah mengutamakan pelayanan pendidikan GRATIS kepada kelompok yang tidak mampu sampai pendidikan menengah.
8. Pemerintah menyediakan pelayanan pendidikan khusus bagi orang cacat dan anak-anak terlantar.
9. Pemerintah akan melakukan upaya rehabilitasi korban konflik dan korban bencana alam.
10. Setiap anak yatim dan fakir miskin akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan tanpa dipungut biaya (gratis).
11. Setiap pemeluk Islam di Aceh WAJIB menaati dan mengamalkan Syariat Islam. Setiap pemeluk Islam di Aceh WAJIB menaati dan mengamalkan Syariat Islam.

5.10. Peta Konflik di Aceh : Pergeseran Konflik Vertikal ke Arah Konflik Horisontal

Untuk memahami pemetaan konflik dapat dilihat dari tipe atau jenis konflik.

Konflik yang terjadi di Aceh antara GAM – RI dari awal konflik, yaitu pada saat Hasan Tiro memproklamasikan Gerakan Aceh Merdeka, sampai sekarang, dapat dikategorikan menjadi dua jenis konflik yaitu konflik vertikal dan konflik horisontal.⁶⁰

Appanila kita mencermati peta konflik yang terjadi di Aceh dapat diidentifikasi menjadi dua. Yang *pertama* adalah masa awal perjuangan GAM . Pada awal konflik yang terjadi di Aceh dikategorikan sebagai konflik vertikal. Konflik ini terbangun antara pemerintah Pusat dengan Rakyat Aceh (pemerintah Daerah). Isu yang diusung oleh gerakan ini adalah isu kemerdekaan Aceh yang bertujuan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalah ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Pusat terhadap Aceh merupakan dasar bagi GAM untuk menuntut kemerdekaan. Pada periode ini ingatan sosial masyarakat Aceh tertuju pada kejadian kekerasan militer yang sengaja diturunkan untuk "menjaga kestabilan keamanan di Aceh". Pendekatan militer justru menimbulkan dampak meningkatnya agresivitas kelompok GAM dan menarik simpati dari masyarakat sipil untuk terlibat secara langsung atau tidak langsung berpartisipasi mendukung GAM dengan mendasarkan pada beberapa alasan. Dilain pihak pemerintah Pusat mendapatkan dukungan dari para elite (emerintah Daerah. Kondisi yang tidak lagi kondusif di Aceh mendorong Gubernur Aceh Ibrahim Saleh pada tahun 1989

⁶⁰ Konflik Vertikal adalah konflik dengan dimensi atas-bawah yaitu konflik struktur sosial, politik, antara elite dan massa, atasan dan bawahan dalam konteks individu, sosial, organisasi, kehidupan bernegara dan lainnya. Hal yang menonjol adalah digunakannya instrumen kekerasan negara. Konflik Horisontal yaitu konflik diantara kelompok dalam masyarakat sendiri, seperti konflik antar etnis, antara agama, antar golongan yang setara. *Studi Konflik komunal di Indonesia Saat Ini*. (Jakarta: INIS Leiden dan Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah. 2003). hlm. 41-43.

mengajukan permohonan pengiriman pasukan non organik TNI-POLRI kepada Presiden yang akhirnya direspon oleh pemerintah dengan menerjunkan pasukan TNI-POLRI dengan menggelar Operasi Jaring Merah.⁶¹

Pergeseran rezim Orde Baru oleh Orde Reformasi pada tahun 1998 menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap kebijakan di Aceh. Kondisi ini berdampak pada kebijakan Pemerintah terhadap Aceh yang mencabut status DOM di Aceh pada tanggal 7 Agustus 1998.⁶² Namun dengan dicabutnya DOM justru membuat situasi di Aceh masih menunjukkan kondisi yang kritis. Menghadapi hal tersebut Pemerintah sekali lagi melakukan pendekatan militer dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden no.28 tahun 2003 yang menyatakan Nanggroe Aceh Darussalam dalam Keadaan Bahaya Dengan Tingkat Keadaan Darurat. Dengan berlakukannya keputusan tersebut maka Aceh berada dalam status Darurat Militer.⁶³

Ketika terjadi bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 menjadi titik balik bagi kedua belah pihak untuk kembali duduk dalam meja perundingan. Pada masa inilah kemudian konflik Aceh memasuki era baru, yang sebelumnya telah dirintis oleh HDC, CoHA, maupun SIRA dengan menggunakan jalur jalur damai (*face making*) dalam menyelesaikan konflik. Secara umum ingatan sosial masyarakat Aceh pada era ini adalah adanya tindakan kekerasan yang menyebabkan trauma dan kebencian pada masyarakat Aceh terhadap pemerintah Pusat dan alat-alat keamanan TNI-POLRI.

Kedua, konflik horisontal yaitu fenomena konflik pada era demokrasi. Pada era ini konflik tidak lagi menunjukkan hubungan atasan dan bawahan (Pusat-Daerah). Konflik

⁶¹ Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, *op. cit.*, hlm.149-150.

⁶² *Ibid.*, hlm.152.

⁶³ *Ibid.*, hlm.161.

yang terjadi di Aceh mengalami pergeseran dengan mengusung isu pelanggaran HAM, Referendum, dan Penerapan Hukum Islam. Dinamika konflik dan masalah-masalah yang baru muncul setelah penandatanganan Nota Kesepahaman MoU Helsinki yang menunjukkan adanya pergeseran konflik yang ada di Aceh. Penandatanganan Nota Kesepahaman itu bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 23 tahun antara GAM dan pemerintah Indonesia.

Secara umum kondisi keamanan di Aceh pasca MoU Helsinki relatif aman karena konflik bersenjata tidak lagi terjadi. Namun hal ini bukan berarti permasalahan konflik sudah benar-benar hilang. Garis-garis konflik tetap ada dan pada titik tertentu semakin meluas. Konflik vertikal yang utama tetap ada antara pihak GAM dan pemerintah Pusat di Jakarta. Garis konflik baru, terutama setelah penandatanganan Nota Kesepahaman, terutama berkaitan dengan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman tersebut. Dengan demikian ada pergeseran konflik di Aceh bergeser ke tingkat politik. Pada saat ini terjadi peningkatan partisipasi politik masyarakat Aceh yang sangat pesat, bahkan dapat dikatakan dalam konteks desentralisasi dan "pemerintah sendiri" untuk Aceh sangat mungkin terjadi kompetisi dan konflik politik antara Jakarta dan pemerintah provinsi Aceh, dimana selama ini pemerintah provinsi dianggap sebagai bagian dari pemerintah Pusat, atau dapat dikatakan sebagai bawahan dari Jakarta.

GAM dan masyarakat sipil Aceh bukanlah satu-satunya pihak yang sangat besar menaruh harapan terhadap pelaksanaan MoU Helsinki. Pemerintah provinsi dan administrasinya akan memperoleh posisi kekuasaan baru dan meningkatnya peluang karir dalam konteks Aceh dengan pemerintahannya sendiri.

Konflik horisontal yang terjadi di Aceh tentang rekonstruksi konflik, salah satunya adalah munculnya friksi dalam masyarakat korban konflik, mantan kombatan GAM, dan masyarakat sipil korban konflik. Friksi ini mencuat di daerah-daerah korban konflik dari masyarakat sipil terutama daerah-daerah yang didiami oleh etnis minoritas di Aceh seperti Jawa. Permasalahan lain yang muncul adalah berkenaan dengan hak milik, seperti misalnya adalah hak atas tanah pertanian dan perkebunan, rumah dan lainnya. Hal ini berkaitan dengan terjadinya pengungsian pada saat konflik dan ketika para pengungsi kembali menimbulkan adanya konflik seputar reintegrasi sosial dan ekonomi. Kecemburuan sosial tidak hanya terjadi di tingkat horisontal, tidak hanya terjadi ditingkat wijayah, tetapi juga tingkat elite lokal dan di dalam masyarakat itu sendiri. Secara umum di dalam masyarakat Aceh muncul aktor-aktor baru yang secara ekonomi lebih mapan, justru mendapatkan keuntungan dari proses rekonstruksi konflik. Dengan demikian muncul friksi baru di dalam masyarakat antara "yang punya dan tidak punya".

Munculnya konflik horisontal baru yang sekarang sedang menjadi sorotan publik adalah anggota GAM yang berpangkat tinggi dengan anggota GAM yang berpangkat rendah. Anggota GAM yang berpangkat tinggi telah memiliki kehidupan yang cukup baik setelah penandatanganan Nota Kesepahaman dengan mendapatkan kedudukan politik serta mendirikan usaha-usaha baru seperti kontraktor, pedagang, dan lain sebagainya. Sementara anggota GAM yang berpangkat rendah hidup dengan seadanya, masih berjuang untuk menata kehidupan mereka dan keluarga mereka. Hal ini diungkapkan oleh beberapa nara sumber:

".... Suami saya anggota GAM dapat bantuan seperti rumah yang dibakar, gara-gara GAM untuk bikin rumah. Saya dapat 40 juta rupiah...."⁶⁴

".... Yang kakak dapat 1 tahun pernah dapat uang 3 juta tapiambilnya di Idi, macam manalah de, saya sudah janda ada 5 anak. Uang itu untuk membantu sekolah anak, saya penghasilan berapa De, cuma tukang sadap karet. Kalau di sekitar kakak ada rumah-rumah yang diberi, tapi kakak tidak..."⁶⁵

"....Saya dapat untuk rumah ini, dulu rumah ini dibakar dapat 25 juta rupiah..."⁶⁶

".... Nda dapat dana ..eh pernah 1 juta .. tapi hartaku sudah hilang semua, rumah dibakar, sekarang kami sekeluarga menempati rumah seperti ini..."⁶⁷

"....Mantan-mantan GAM ada yang senang ada yang susah, saya harus mengancam itulah untuk dapat hak. Kita masih melihat seperti kemarin, rumah-rumah atap rumbia, masak masih dengan kayu..."⁶⁸

⁶⁴ Wawancara dengan Maryani, anggota *Inong Bale* di Sinebouk, Aceh Timur, pada tanggal 16 Agustus 2009.

⁶⁵ Wawancara dengan Romlah di Beyeun, Alue Gading, Aceh Timur, pada tanggal 18 Agustus 2009.

⁶⁶ Wawancara dengan Salamah di Selemahmudah, Nursalan, Aceh Timur, pada tanggal 18 Agustus 2009.

⁶⁷ Wawancara dengan Suparno di Alue Gading, Aceh Timur, pada tanggal 19 Agustus 2009.

⁶⁸ Wawancara dengan Ismuha di Raja Tuha, Manyakpayet, Aceh Tamiang, pada tanggal 16 Agustus 2009.

"...Cuma sekarang saya dipandang sebelah mata oleh orang-orang GAM yang muda-muda..."⁶⁹

Dari beberapa cuplikan di atas ada beberapa permasalahan yang muncul yang sedang berkembang di Aceh sebagai bentuk baru konflik horisontal dan vertikal yang tidak hanya konflik antara Pemerintah Pusat dan GAM tetapi jauh lebih luas lagi adalah munculnya friksi-friksi baru dalam konflik yang lebih kompleks dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat terlibat dalam konflik yang lebih bersifat horisontal. Dan kedua konflik tersebut berpotensi untuk meletup kembali manakala kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak berpihak pada masyarakat dan semua pihak tidak dapat menahan diri. Untuk itulah diperlukan kearifan dalam melihat, mendengar dan memahami memori kolektif masyarakat Aceh agar kedamaian dapat tercipta secara permanen.

⁶⁹ Wawancara dengan D.A. Rahman di Matang Ara, Manyakpayet, Aceh Tamiang, pada tanggal 16 Agustus 2009.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik yang terjadi di Aceh tidak dapat dilepaskan dari permasalahan struktural seperti kemiskinan dan kesenjangan serta disharmonis antara Pusat – Daerah. Apabila permasalahan tersebut tidak ditangani secara arif dan serius, dalam perspektif jangka menengah sampai jangka panjang, akan menimbulkan kerawanan atau gejolak. Masalah tersebut akan lebih berkembang apabila muncul isu-isu lainnya yang lebih berat yang dapat mengundang simpati dari negara lain, yaitu isu tentang pelanggaran HAM, baik dalam skala ringan, sedang, maupun berat.. Kekerasan yang terjadi di Aceh pada masa lampau dapat dengan tiba-tiba muncul di urutan pertama sebagai agenda publik untuk segera diselidiki atau diselesaikan daripada agenda kemiskinan atau pembagian distribusi pendapatan antara Pusat-Daerah. Kesalahan-kesalahan dalam menerapkan kebijakan yang dilakukan sebelumnya dalam menangani masalah konflik di Aceh masa lalu dapat dengan mudah meningkatkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap negara Indonesia dan institusi yang melingkupinya.

Akar penyebab konflik di Aceh terletak pada kebijakan dikerdilkannya dan dimarjinalkan kekuasaan sosial, politik, dan ekonomi orang “Aceh” oleh pemerintah Pusat, yang mereka anggap tidak adil dan menginjak-injak harkat dan martabat. Sistem pemerintahan atau kekuasaan yang tersentralisasi pada Pemerintah Pusat menyebabkan timbulnya kesenjangan wilayah politik, ekonomi antara Pusat dan Daerah.

Daam kerangka konflik tersebut konflik dibentuk secara vertikal, namun dengan bergulirnya waktu konflik mencapai ranah yang lebih luas yang melibatkan elemen-

elemen yang ada di dalam masyarakat. Konflik ini ini muncul setelah referendum, dan terlihat sangat jelas ketika ditandatangani Nota Kesepahaman MoU Helsinki. Polaritas konflik bergeser pada tataran konflik horisontal. Konflik antar anggota GAM yang bergerak pada level GAM elite dan TA (Tentara Aceh, Mantan tentara GAM), serta GAM kelas bawah (GAM *Cantoi*).

Isu yang bersifat etnisitas sempat muncul pada saat konflik GAM-RI, sangat kontras antara penduduk asli dengan pendatang. Konflik ini berkembang ketika rekonstruksi konflik yang membuat adanya pengelompokan antara kelompok GAM dan masyarakat sipil. Konflik horisontal juga terjadi ketika Aceh menerapkan hukum dalam Undang-Undang PA yang mendasarkan pada Syariat Islam.

Proses penyelesaian terhadap friksi-friksi yang ada dan terus berkembang dalam masyarakat Aceh tidak hanya memperdebatkan tataran institusional antara pemerintah Pusat di Jakarta dan pemerintah Aceh. Namun penyelesaian membutuhkan dukungan dan pada tingkatan tertentu harus mendengarkan masukan dari masyarakat Aceh dari segala segmen, mulai dari para elite masyarakat sampai pada *grass root* atau masyarakat dalam klasifikasi yang terbawah, agar dapat dilibatkan dalam penyelesaian konflik karena pada gilirannya masyarakatlah yang merasakan berkelanjutannya konflik. Oleh karena itu haruslah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik di Aceh, dalam keadaan apakah upaya rekonsiliasi tradisional dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengurai dan menyelesaikannya agar tercipta kehidupan yang normal dan damai di Aceh.

Bersamaan dengan terus bergulirnya konflik, baik konflik vertikal maupun horisontal, masyarakat Aceh berusaha mentransformasikan diri mereka ke dalam nilai-

nilai ke-Acehan dengan menggunakan nilai-nilai Adat dan nilai-nilai Islam sebagai dasar dalam perjuangan membentuk "Negara Aceh". Sampai ditandatanganinya MoU Helsinki yang dikatakan sebagai "Kemerdekaan dan Kemenangan Aceh", dalam *social mind set* orang Aceh masih ada cita-cita membantu Negara Aceh Merdeka.

SARAN

Akar dari permasalahan di Aceh harus diurai terlebih dahulu dengan pikiran dan maksud yang bersih dan selanjutnya ditangani dari tingkat nasional dan provinsi serta tingkat *grass root*. Pihak-pihak yang memegang kekuasaan di Jakarta dan Aceh harus menetapkan aturan bagi setiap kesepakatan dan memastikan efek dari kesepakatan tersebut dapat menjangkau dan dipahami oleh masyarakat dan menjadi bagian integral dengan keinginan masyarakat.

Sebagaimana telah diungkapkan dalam analisa sebelumnya bahwa kecenderungan munculnya garis konflik Aceh di masa depan hampir dapat dipastikan terjadi lagi secara horisontal. Pendekatan yang diperlukan adalah penyelesaian dengan pendekatan inklusif dengan melibatkan dan meningkatkan dialog pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dengan berbasis pada suara hati dan kepentingan masyarakat Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Kusno, *Penjaga Memori: Gardu di Perkotaan Jawa*, Yogyakarta: Ombak, 2007.
- Al-Chaidar, *Aceh Bersimbah darah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989 – 1998*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Allianso Protelli, "What makes Oral History Different", dalam Robert Perks and Alistair Thomson. *The Oral History Reader*, London and New York, Routledge, 1998.
- Amrizal J. Prang, *Aceh: dari Konflik ke Damai*. Yogyakarta: Bandar, 2008.
- Blau, Peter, *Exchange and Power in Social Life*. New York: Wiley, 1964.
- Colombijn, Freek dan J. Thomas Lindblad (ed.), *Roots of Violence in Indonesia*. Leiden. KITLV, 2002.
- Edwin R.A Seligman, (ed). *Encyclopaedia of The Social Sciences*. New York: Mac Millan. 1954
- Fielding, Nigel G. (ed.), *Actions and Structure, Research Methods and Social Theory*. London, Newbury Park, Beverly Hills, New Delhi: Sage Publications, 1988.
- Halbwachs, Maurice, *On Collective Memory*, Lewis A. (edt, and transl.). New York: State University of New York Press, 1925.
- Hari Kawilarang dan Murizal Hamsah(ed.). *Banda Aceh*. Banda Aceh: Banda Publishing, 2008.
- Hogg, M.A. and Abram, D, *Social Identification: A Social Psychology of Intergroup Relation and Group Processes*. London: Routledge, 1988.
- Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh Dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Ikrar Nusa Bakti, *Beranda Perdamaian : Aceh tiga Tahun Pasca Mou Helsinki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kodam Iskandar Muda, *Kodam Iskandar Muda (Sejarah dan Pengabdianannya)*. Banda Aceh: Dinasa Penerangan Kodam Iskandar Muda, 2003.
- Kimbro, Stephanie .L., *Les Lieux De Memorie: French Collective Memory of World War II in Events of May 1969*. Ohio: University Oxford, 2000.
- Landerach, John Paul, *Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Culture*, Syracuse New York: Syracuse University Press, 1996.

- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi dan Mulyarto, Jakarta: UI Press, 1992.
- Mead, G.H, *Mind, Self and Society*, Chicago: Chicago University Press, 1934.
- Moch. Nurhasim, *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka (Kajian Tentang Konsensus Normatif antara GAM-RI dalam Perundingan Helsinki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Muhammad Umar, *Darah Dan Jiwa Aceh*. Banda Aceh: Busafat, 2002.
- Parsons, Talcott. *Action Systems and Social Systems*. Dalam file:///I/INTERNET/NEscape/PARSON2. Dikutip dari Talcott Parsons, *The System of Modern Society*. Englewood Cliffs, NY: Prentice-Hall, 1971, pp. 4-8.
- Perks, Robert and Thomson, Alistair. *The Oral History Reader*. London and New York: Routledge, 1998.
- Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press, 1991.
- Pierre Nora, "Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire," in *Histories: French Constructions of the Past: Postwar French Thought*, vol. 1, (New)
- Poloma, Margaret M., *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali dan Yayasan Solidaritas Gajah Mada. 1987.
- Pratiwo, "Ship of Memory", dalam LIPI, *Sejarah dan Dialog Peradaban (Persembahan 70 tahun Prof. Taufik Abdullah)*. Jakarta, LIPI Press, 2006.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Salim, Agus (Penyunting). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Sen, Amartya, *Kekerasan dan Ilusi Tentang Identitas*, Serpong: Marjin Kiri. 2007.
- Sharon, Seah Li Lian, "Truth and Memory: Narrating Viet Nam" dalam *Asian Journal of Social Science*, Vol. 29. No. 3 tahun 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Spradley, James P., *Participant Observation*. Florida: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1980.

Stepanie L Kimbro, *Les Lieux de Memoire: French Collective Memory Of World War II In The Events of May 1968*. Miami University of Oxford, Ohio, 2000.

Weber, Max. *Basic Concept of Sociology*. Diambil dari file:
[///C:/INTERNET/NETSCAPE/BASIC_CONCEPT.html](file:///C:/INTERNET/NETSCAPE/BASIC_CONCEPT.html)

Wolf, Kurt (Trans.). *The Sociology of George Simmel*. New York: Free Press, 1950.
Dalam file:[file:///C:/INTERNET/NETSCAPE/STRANGER.George Simmel – The Stranger](file:///C:/INTERNET/NETSCAPE/STRANGER.George%20Simmel%20-%20The%20Stranger)

http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Aceh_Merdeka

<http://www.blogger.com/profile> *Histori atau Memori, Memori Kultural dan Identitas Kelompok*

TRANSKRIPT WAWANCARA

Nama : Maryani
 Umur : 32 tahun
 Alamat : Dusun Pengajian Sinebuek Tuha II, Peurlak
 Pekerjaan : buruh
 Keterlibatan konflik : Inong Bale
 Wawancara : 16 Agustus 2009
 Kategori keterlibatan : terlibat aktif dari pihak GAM
 Katagori Wilayah : wilayah Konflik

Pengalaman Menjadi Aktifis GAM

Selama dua tahun aku hidup di hutan, aku tak bisa duduk di rumah, karna ikut suami aku.

Waktu datang Tentra ke rumah, orang itu bilang mana suamimu... aku jawab aku tak tau, berkali aaku ditanya aku jawab tak tau, tak tau... Tentra bilang ...kalau suami kami dirumah, rumah ini dibakar... (Tentra cari-cari di rumah diobrak-abrik), setiap aku jawab tak tau aku dipukul, sini (kepala) semua badan dipukul, rambut ditarik-tarik...aku tak takut waktu itu, aku Cuma ingat Allah, tak ingat satupun , anak, orang tua. Waktu itu saya hamil. Suami sedang ke laut, Tentra pukul-pukul saya, perut aku digores-gores pisau.

Waktu belum lari ke hutan kalau datang Tentra kita diancam. Ada orang GAM yang ketemu ditembak di depan kakak , waktu Muzakir kepalanya putus karna kepergok tentra. Kalau Gam datang turun dari hutan langsung ditembak. Setelah dityembak dipotong lehernya, ada lagi satu kecil bibakar. Ada juga tentara yang ke sini ditangkap dibawa .

Ketertarikan masuk GAM

Orang GAM merayu-merayu supaya ikut GAM namanya Dul Saman terus jadi suami aku. Aku tak bisa duduk lagi di rumah , karna suami aku Gam, akun ikut ke hutan. Aku bertugas memasak kadang-kadang ada 60 orang, aku duduk di rumah masak untuk mereka. Kalau dihutan kita masak dihutan. Kalau suami lari aku ikut lari, aku tak bisa tembak, aku bawa tembak, aku bawa saja. Suami saya ada latihan kalau sekarang jadi Tentra polpuler GAM.

Suami saya komandan pleton senebuk setelah Teuku Ali meninggal. Teuku Ali (teuku Kasih Sayang) di tembak di rumahnya, kepalanya hancur. waktu saya lari ke hutan, kami ada 15 orang , kadang makan kadang tidak. Kalau malam kami tidur, siang lari lagi, kita berjuang untuk rakyat Aceh (wawancara sempat terhenti, waktu itu datang seorang laki-laki dengan sikap curiga menanyakan apa yang sedang penulis lakukan dengan para ibu-ibu, dengan menunjukan sikap curiga, penulis berusaha menjelaskan bahwa penulis sedang menulis sejarah Aceh dan wawancara berlanjut).

Orang perempuan-perempuan banyak pergi dengan suami ikut ke hutan, kita kelompok-kelompok.

Harapan Aceh ke depan

Aceh harus merdeka, damai, aku tidak ikut referendum, kami masih di hutan. Kami baru turun setelah damai. Kalau kita damai enaklah, kalau Aceh berjuang lagi aku ikut GAM, karna suami ikut GAM. Aku juga ikut.

Pemahaman tentang Referendum

Waktu ada ramai-ramai referendum ada yang ikut ke Banda, ada juga lari orang-orang GAM, lari tak nampak-nampak. Orang-orang bilang kita mau merdeka kita merdeka. Aku nda ikut ke Banda. Suamiku ke Banda Aceh ikut referendum, selama 3 hari. Dan suami saya setelah itu di kantor (?) aja. Pakai baju dinas Tentara GAM populer Gam. Saya bangga kalau liat suami saya pakai haju Tentara.

Arti Kemerdekaan

Aku tak tau, aku ingin damai, dapat hidup makan, tak lari lagi di hutan. Tenang, aku dapat uang untuk perbaiki rumah. Tentara Populer GAM sempat sekarang masih ada, masih saling sapa antar mereka, tapi nda tau lagi. Tentara GAM sekarang cari diri sendiri. Kita dapat bantuan dari luar untuk GAM, bukan dari pemerintah.

Dana Rekonstruksi Konflik

Suami saya anggota GAM dapat bantuan seperti rumah yang dibakar, gara-gara GAM untuk bikin rumah. Saya dapat 40 juta rupiah. Kondisi sekarang enaklah, dulu aku takut pulang karna orang kena pukul dan usir kami, tapi sekarang tidak.

Nama : Nurgayah
 Umur : 32 tahun
 Alamat : Dusun Pengajian Sinebuek Tuha II, Peurlak
 Pekerjaan : buruh, ibu rumah tangga
 Keterlibatan konflik : Inong Bale
 Wawancara : 16 Agustus 2009
 Kategori keterlibatan : aktifis perempuan GAM (Inong Bale)
 Katagori Wilayah : wilayah Konflik

Ketertarikan ikut GAM

Aku ikut GAM karna suami GAM, orang-orang di dusun sini tidak tenang kalau ada suami aku karna orang-orang kena pukul kalau ditanya suami aku, aku juga .kadang-kadang orang-orang di sini tidak terima . Katanya kamu tidak tinggal disini, masuk lagi ke hutan, aku pergi ke hutan. Kalau aku ikut GAM karna suami ikut dengan Tentra GAM. Kami lari karna takut dipukul, kali disuruh pergi. Kakak sedih,ketika kami tidak diterima masyarakat. Kami masuk hutan. Aku di hutan sudah 3 tahunan.

Aku nda ikut, karena bapaknya dah tidak ada lagi. Saya waktu itu jualan lontong. Ada kabir mau referendum.aku kasih apa yang aku bisa kasih dari hasil jualan.

Referendum katanya orang kita mau merdeka, orang bilang Merdeka..., Merdeka.....ramailah semua. Aku senanglah. Aku tak minta-minta ke orang-orang aku jualan aku kasih.

Pengalaman selama konflik

Pertama melihat suami di tembak Tentra tapi tidak kena, tapi karna saya ditinggal saya dipukul. Malam itu malam Medang (malam menjelang hari raya idulfitri) sudah masak semua. Bapak saya bangun sholat. Dirumah bapak tuh waktu subuh turun untuk ambil air wudu. Bapak liat ada tentra di atas sedang menengok rumah dari belakang, di atas banyak Tentra. Rupanya ada orang kampung lapor kalau suami aku ada di rumah.TNI sudah dapat nama orang-orang GAM di senebuk sini.

Bapak buru masuk rumah dan ngasih tau tentang TNI tu, bapak waktu kluar pakai sarung. Bapak ambil sarung yang sudah dilihat TNI dikasih sama suamiku dan dikasih baju. Bapak nyuruh suamiku pakai kain dan baju bapak, dan disuruh pergi masuk hutan (daerah penelitian berupa hutan dan semak dengan kontruk tanah yang berbukit). Tentra kemudian nunggu tapi suamiku tak ada lagi. Waktu pergi Tentra masuk rumah menanyakan suamiku. Mana Suamimu....dia bilang, aku bilang tak ada... Bohong kata TNI. Katanya suamimu datang... Aku di bawa ke sana kemari sambil didorng-dorong dan ditarik-tarik, lalu dipukul-pukul bagian kepala dan punggung.. tanganku ditali. Waktu di depan ada dilihat anak-anak, terus ditanya TNI... de kamu lihat suami kakak ini, aku bilang jangan bilang-jangan bilang.. terus aku dipukul lagi.

Jam 12 siang , TNI bilang kalau nanti jam satu suami kamu tidak datang , kamu aku pukul, kami akan cari lagi. (Aku bolak balik dipukul..sakanan diambil semua). Kalau tidak bilang kupukul kamu... saya jawab bolehlah pukul aku (aku dipukul bagian kepala).

Orang TNI ada yang baik yang satu dipukul yang satu tidak. TNI satunya bilang jangan bilang GAM (melindungi) meski saya tidak kenal. Akhirnya rumah kami dibakar. Aku menyusul suami aku.

Suami aku kena tembak tapi tidak mati, dia mati karna tidak ada obat, orang minum obat sakit perut untuk mengobati pusing. Suami aku minum air apa itu yang dimasukan kalau sakit (maksudnya infus) setelah minum itu gatal semua mulut dan perut sakit. Akhirnya meninggal.

Pengalaman ditenjangi. Waktu itu ada orang bukan GAM ditangkap terus ditanya siapa yang GAM disini, langsung menunjuk aku. Aku memang iya GAM. Waktu itu malam tu kan aku diambil (dikek) dibawa aku, ditanya aku, dimana GAM, aku bilang ndak tau. Orang tu bilang kalau ngak tau aku bunuh kamu... dia bilang. Aku jawab enggak-enggak.. aku dipukul lagi. Aku pakai baju 3, celana 3 pakai BH. Baju diambil semua sama dia, disini dipegang (sambil menunjuk malu pinggang dan dada) sambil aku dibawa ke pohon kayu, celana dipegang dibawa aku ke sungai, dibawa kemana-mana ke sawah, aku telanjang baju tak satupun, digigit anjing, aku takut aku naik ke atas dia. TNI itu aku tau namanya Pak Taufik. Jam 5 aku dibawa ke rumah orang itu (Maryani anggota GAM perempuan lainnya) diatas aku dikurung. Tenra bilang nanti jam 7 kamu ngak bilang aku bawa kamu di jalan aku ikat kamu di mobil... aku bilang iya., terus aku dipukul lagi. Aku dilepas, aku berusaha lari tapi tak bisa jauh karena perutku sudah sakit, kaki sakit semua, dan nda bisa jalan lagi.rambutku dipotong nda ada apapun

Pengalaman hidup di hutan sebagai Inong Bale.

Hidup di hutan terus berpindah-pindah kalau malam baku tembak lari, kami dikasih baju hitam-hitam. Setiap anggota GAM diberi senjata terutama yang laki-laki. Senjata yang dibawa A.K, senjata lainnya paco, rantai. Kalau perlu kita tembak ya kita nembak. Kalau dalam satu hari kadang makan kadang tidak, makan kelapa, air kelapa. Kegiatan di hutan selain masak membantu bawa senjata rakitan. (ketika itu datang seorang Inong Bale ddari pasukan Inong Bale batu Ulim yang ternyata istri ke 4 panglima Hasan yang meninggal tahun 2003). Orang GAM di hutan tidak bisa keluar kemana-mana. Kalau perempuan-perempuannya bisc. Kami terus lari-lari. Pernah satu bukit dengan TNI. Orang TNI :anya kamun orang mana , kami jawab TNI, tapi kami tau mereka TNI kerna tidak pakai obat nyamuk tapi pakai autan. Baunya terasa. Waktu masuk hutan kita bau obat nyamuk bakar atau tidak bau berarti orang GAM. Jam 4 pagi kita sudah siap-siap pakai tas untuk lari yang meninggal ditinggal, nda mau jemput. Memang sedih takut tapi harus lari. Laki-laki kalau sudah tembak menembak tidak pedulikan orang-orang perempuan. Ditinggal entah nanti ketemu lagi.Dihutanpun ada pernikahan, aku ngaji dan sholat tak tinggal.kalau kita sedang lari di hutan nggak ingat apa-apa lagi yang diingat Cuma Allah. Suami nda tau kami. Anak saya dibawa ke Banda

Waktu di hutan ada panglima, pertama Geucik Ali, tapi meninggal ditembak, kedua Hasan Ali meninggal tahun 2003. Ketiga Kek Kie dia lari nda tahan di hutan .Lari ke Malaysia, sesudah damai dia pulang, untuk apa lagi nda perlu (nada mencemooh).

Pemungutan dana Perjuangan

Waktu itu pemungutan Cuma kalau dikasih kalaun tidak nda apa apa.ada yang cari dana dengan jualan. Hasilnya untuk perjuangan. Orang-orang GAM juga dapat bantuan dari luar tapi entah aku tak tau, obat juga dapat baju dengan tutup kepala, jadi kami putih-putih waktu turun.

Tentang Referendum

Saya nda ikut, karna suami waktu itu dah meninggal, saya jualan apa adanya. Kalau referendum setau saya Aceh mau merdeka, saya tidak ikut ke Banda, so'a Cuma kasih dari hasil jualan saya. Saya taunya referensum kita meredeka, da.nai.

Harapan Ke depan.

Hidup aman. Kita jangan miskin lagi, ingin hidup lebih baik.

Nama : Lindawati
 Umur : 35 tahun
 Alamat : Dusun Pengajian Sinebuk Tuha II, Peurlak
 Pekerjaan : buruh, ibu rumah tangga
 Keterlibatan konflik : korban
 Wawancara : 16 Agustus 2009
 Kategori keterlibatan : masyarakat sipil
 Katagori Wilayah : wilayah Konflik

Deskripsi wilayah sekarang

Desa Senebuk Tuha merupakan desa berada di Peurlak Kabupaten Aceh Timur yang merupakan daerah dengan kategori wilayah konflik. Kondisi desa berupa hutan jati.

A. Pengalaman konflik

Saya hidup disini di dusun Senebuk Tuha Dua, sejak lahir. Kejadian yang saya ingat tentang konflik waktu itu tahun 2002. Waktu itu pukul 4 pagi tahun 2002 kami masih tidur, pukul 4 pagi ketok-ketok pintu keras. Katanya Kak Ti, Kak Ti...mna GAM...aku jawab tak ada di rumah ni...(berkali-kali aku bilang takut aku), terus rumah kami digledah. Anak kami yang besar-besar suruh keluar, ayam ditembak dirumah Kak Ti. Orang itu TNI tinggal 3 hari berganti-ganti di rumah Kak Ti, tinggal pergi berganti-ganti.

Pergi dari rumah aku, itu TNI, datanglah orang-orang GAM jumlah 2 tidur juga di sini. Orang-orang GAM bilang Kak Ti, kenapa kau kasih tidur si Pai TNI, kenapa kami tidak, kau kasih makan itu orang, kami juga bisa jaga rumah ni... (aku takut betul bingung) aku bilang bolehlah kau tidur disini... kalau kau bilang GAM nampak disini, kalau tak diam gigi Kak Ti dipukul.

Setiap hari apa yang ada di rumah aku suruh masak, anak-anak makan itu air nira, pepaya apa saja yang ada, aku tak brani keluar jauh, mana bisa keluar. Beberapa hari orang GAM tinggalkan rumah kami, orang Aceh lembu dibawa lari. Suami Kak Ti, tak ada lagi di rumah pergi, tak pulang 7 hari, takut TNI, takut GAM.. setelah orang-orang itu pergi suami aku suruh pulang.

Waktu ada orang tentra ada, ada orang GAM disebelah sana (menunjuk ke arah barat rumah yang terlihat pohon-pohon jati dan semak belukar yang, orang itu angkat generuk (pagar) ketauan Tentra (tentara) ditembak dor...dor, orang itu lari kretanya (sepeda motor) dilempar, Kak Ti nada tau lagi orang itu lari ke hutan.kakinya kena 2 lagi.

Anak aku ada yang sudah besar..dia aku kasih makan itu pepaya,apa saja yang ada di dekat rumah, mana tak bisa kita keluar. Makanan habis ayam mati ada disembelih untuk makan tentra.

Makna Referendum

Aku tak tau cuma kata orang-orang referendum-referendum ayo ikut, aku tak dapat. Ramai orang mau berangkat ke Banda. Apa saja dikasih untuk bekal orang-orang. Aku bukan GAM kalau orang itu (menunjuk Maryani) orang GAM, kerna suaminya GAM ikut ke hutan.

Kalau sekarang enaklah sudah tak nampak lagi takut-takut, harapannya damaiilah. Takut kali dulu hidup apa lagi kalau ada orang GAM dikampung, tentra datang

tembak-tembak.tak tenang hidup. MoU aku tak tau yang aku tau sekarang damaihtak nampak orang tembak-tembak, orang GAM hidup juga disini.

Arti Kemerdekaan

Hidup tenang lah jangan ada tembak-tembak lagi, hidup nda takut lagi, sudah enak seperti ini. Kalau dulu kita takut tiap hari takut di pukul, dibentak, diambil harta. Sekarang tenang. Sekarang kita hidup tidak seperti dulu yang susah untuk makan. Sekarang sudah lumayan.

Nama : Muhamad Amin Hasan
 Umur : 50 tahun
 Alamat : Desa Monmut, Sigli
 Pekerjaan : pedagang
 Keterlibatan konflik : tidak terlibat langsung, saksi mata
 Wawancara : 18 Agustus 2009
 Kategori keterlibatan : masyarakat sipil
 Kategori Wilayah : wilayah Konflik

Pengalaman pada waktu Konflik

Waktu ramai-ramai di dekat gunung sering terdengar tembak menembak sehari kadang satu kadang dua, kadang tidak ada tapi sering. Kami takut masuk ke rumah di kolong, ada tetangga aku orang Gam ditembak ada 5 orang meninggal, ada ditangkap tapi dibawa entah kemana, katanya di Medan pulang 5 tahun dilepas orang itu.

Saya orang miskin anak dua (kemudian pak Hasan curiga dengan peneliti dan lari ketika peneliti merekam, dan dikira peneliti adalah tentara dengan menanyakan apakah Bapak Ibu Tentra, pakberi (sebutan pak ABR) setelah diberi penjelasan pak hasan mau melanjutkan wawancara). Pak saya takut di tangkap...

Bagi saya GAM itu baik, ndak pernah ganggu kami, dia kawan kami. Ada kita diminta sumbangan sukarela tapi tidak diminta aku kasih. Saya dikira GAM oleh Tentra saya dipukul-pukul, di bawa ke Langsa. Di tanya-tanya kalau aku GAM.

Tentra suka pukul orang-orang kampung, suka minta makanan menembak didepan orang, saya takut tentra. Kalau ditanya-tanya GAM suka kena pukul. Di dusun Monmut kita hidup baik dengan orang GAM, tapi kita tidak mau kasih tau GAM.

Referendum

Waktu referendum yang saya tau kita orang Aceh mau merdeka, mau damai tidak ada tembakan lagi. Orang Aceh dapat hidup enak. saya tidak ikut ke Banda, saya orang miskin tidak disuruh beri harta untuk ke Banda. Banyak orang yang berangkat naik truk-truk. Ramailah macam kita mau berangkat ramai-ramai kita senang.

Arti Kemerdekaan

Tak tau aku, katanya GAM mau buat kita merdeka, mau merdeka nda mau Republik Indonesia tapi aku tak tau.

Harapan ke depan tentang Aceh

Harapan saya keadaan akan datang, tentang makmur, mau merdeka. Supaya nda ganggu hidup saya lagi. Supaya saya tidak takut. Kondisi sekarang dah baik saya bisa jualan lagi.

Nama : Karnani
 Umur : 45 tahun
 Alamat : Dusun Cot Dipai Sigli
 Pekerjaan : dagang ibu rumah tangga
 Keterlibatan konflik : korban ole GAM
 Wawancara : 16 Agustus 2009
 Kategori keterlibatan : masyarakat sipil
 Katagori Wilayah : wilayah Konflik

Pengalaman konflik

Aku ke Kala Simpang karna lari dari dari Sigli, lantaran repot GAM disana dan aku takut. Kejadianya waktu itu malam jumat di Cot Dipai Sigli Kejadian berawal dari kejadian terbunuhnya 1 orang anggota GAM, di potong leher sebenarnya bukan GAM asli. Gam kecil.

Masalahnya waktu abang seorang Geucik mau ke kantor dicegat oleh orang-orang GAM kecil, diancam kalau ke kantor nanti rasakan akibatnya. Abang saya seorang Geucik yang disuruh teken tanah, kerbau, ladang oleh GAM. orang-orang Gam suruh abang teken itu tanah, diancam kalau teken selamat, kalau nda teken nda selamat. Abang nda mau teken.

Malam Jumat kita disuruh terima dama guru ngaji uang masjid, pas pulang dari masjid dengan beberapa orang diperiksa ditengah jalan, ditarik abang saya orang GAM kecil, ditanya mana KTPnya. Abang mau kasih tapi jangan di tempat gelap cari tempat terang, terus abang dipukul ambil parang, Abang teriak Allahu Akbar, dipotong lehernya ketika ditengok sudah meninggal dibawa ke menasan kembang.

Saya minta maaf dengan mamak aku, Islamkah Islamkah, karna orang nggak salah disiksa. Saya dari Kuala Simpang sini bawa anak-anak abang saya dan istrinya memang orang Jawa. Suami aku pergi samapi sekarang dengar-dengar sudah kluar.

Saya serahkan semua ke Allah, karna abang saya Geucik banyak yang nggak suka bukan GAM asli yang melakukan tapi anak buahnya. (Ibu Karnani tidak mau meneruskan wawancara dan menangis dan tidak mau bicara lagi wawancara dihentikan).

Nama : Romlah
 Umur : 42 tahun
 Alamat : Desa Beyeun, Alur Gadiag, Alur Mere
 Pekerjaan : nderes karet
 Keterlibatan konflik : korban dari pihak GAM
 Wawancara : 18 Agustus 2009
 Kategori keterlibatan : masyarakat sipil/istri seorang GAM
 Katagori Wilayah : wilayah Konflik

Pengalaman waktu Konflik

Pengalaman saya waktu konflik yang sampai sekarang sulit untuk dihilangkan saya dan juga anak saya terutama yang paling kecil yaitu pembunuhan suami saya di alu Mere Peurlak. Waktu kejadian di Alur Nyamuk, saya sedang hamil 6 bulan. Agak sulit yang diinga' waktu kejadian tahun 2000 terhadap suami saya.

Pada waktu tahun 2000 itu kejadiannya tanggal 23 bulan sepuluh hari minggu jam 4 tahun 2002. Kak Ramlah di rumah, bapaknya anak-anak ada di ladang di alur Nyamuk disanalah kejadiannya. Ada empat orang kejadiannya, kawan-kawannya tiga suami saya satu. Abis gitu Bapak ada di Lawi bukit panjang dihadang oleh orang-orang Tenra ditengah jalan, rupanya sudah ditunggu mereka. Namapak bapak anak-anak dan kawan-kawan mulai tembakan, nampak tembaknya di sini (pelipsis) yang nampak tembakannya dikepalnya otak keluarlah karna bawa turun ke bawah itu. Terus dibawa ke rumah sakit, waktu besok sudah ketauan kakak waktu jam 6 itu dah ada kabar tembakan di Alur Nyamuk, jam 4 kejadiannya. Kakak pikir kepantulah dia ke ladang sedangkan dia di rumah mebetulin sepeda. Disitu jam 6 kethuan kakak pikir nda kena diakan, kakak diam saja. Kakak diberitahu jam 12 malam, kaka diberi tahu anak-anak sudah tidaur semua. waktudiberitahu kakak lemas, maktumlah kita orang perempuan mana saya pikir sudahlah ditinggal orang yang dikandung 6 bulan, anak-anak.

Abis itu dibawa ke rumah sakit Umum, jam 10 kakak ambil untuk dibawa pulang. Sampai dirumah sakit jam 11 dan sampai dirumah jam lima eh setengah enam magrib lalu dikuburkan.

Pernah saya tanya, apa ayah ikut GAM, dia bilang tidak kemana-mana, ayah cari makan. Tapi itulah orang-orang bilang kalau suami kakak orang GAM, saya nggak tau. Tak taulah karna laki-laki kalau kumpul-kumpul di kedai manalah kita permepuan tau, kita nggak diajak, kaka selalu di rumah nggak pernah ikut.

Orang GAM di tempat kaka baik-baik menurut kakak pikir dan kakak liat yang sekitarnya orang-orang GAM baik-baik. Tak taulah.

Sekarang tempat jatuhnya kepala suami kakak yang kluar otaknya, sekarang kluar air jernih, sama orang kampung diberi pagar. Kakak tak mau kesana ingat disitu kepala abang ditembak.

Dampak kejadian terhadap anak-anak dan istri

Anak saya ada 5 yang sudah besar waktu kejadian 2 sudah besar 2 masih kecil-kecil yang dikandung 1. Anak kedua sangat-sangat ingat kalau bapaknya dibunuh tenra. Sekarang dia benci TNI. Dibilang ke adeknya, eh manalah kau punya bapak, bapak kau mati ditembak kepalanya oleh tenra. Adiknyanya bilang bresk tenra aku tembak juga, ayo kak kita prang. Ya kakak Ramlah liat rasa benci anak-

anak ke tenra. Tapi sudah kakak serahkan ke Allah. Sekarang saya jadi buruh nderes karet untuk makan.

Kalau kakak, setelah tau suami meninggal kakak ingin bantu GAM, kepingin betul tapi kakak mikir, kalaulah kakak bantu GAM dan kaka mati siapa pula mau urus anak-anak kakak.

Referendum

Kakak ikut referendum di Banda, di Masjid Raya, banyak orang pidato di masjid, aku rasa semangat, kita ikut ramai-ramai, keinginan kakak rasanya senang sekali, kakak ingin merdeka. Kalau sudah merdeka enak kita. Kakak ke Banda dengan uang kakak sendiri selama 3 hari 3 malam.

Ajakan referendum dari mulut ke mulut, kawan-kawan suami kakak mengajak ke Banda. Banyak orang-orang yang ikut ke Banda. Ramai kali.

Mou Helsinki

Kakak tak tau apa itu Mou, perjanjian damai. Harapan kakak Aceh ke depan harus baik, kok ribut-ribut kayak tahun 2000 sudah tak sanggup lagi. Anak yatim tolong diurus.

Dana rekontruksi akibat Konflik

Yang kakak dapat 1 tahun pernah dapat uang 3 juta tapiambilnya di Idi, macam manalah de, saya sudah janda ada 5 anak. Uang itu untuk membantu sekolah anak, saya penghasilan berapa De, Cuma tukang sadap karet.. kalau di sekitar kakak ada rumah-rumah yang diberi, tapi kakak tidak

Nama : Aminah
 Umur : 42 tahun
 Alamat : Desa Beyeun, Alur Gading,
 Pekerjaan : sukarelawan LSM
 Keterlibatan konflik : keluarga korban
 Wawancara : 18 Agustus 2009
 Kategori keterlibatan : masyarakat sipil
 Katagori Wilayah : wilayah Konflik

Pengalaman pada masa konflik

Kondisi masyarakat pada waktu resah, apalagi kalau terdengar tembakan. Tiap hari menjadi waswas. Setiap ada tembakan saya dan anak-anak saya lari-lari tiarap dibawah rumah, rumah kami berupa panggung, tidur di bawah kolong rumah takut ada tembakan. Tidak setiap hari kadang 3 hari kadang 1 hari. Daerah kami Alur Nyamuk termasuk daerah yang menjadi daerah yang menjadi sasaran baku tembak.

Ada yang makan satu hari tidak makan, ada suara tembakan kita di rumah Cuma ada perempuan-perempuan saja. Perempuan bisa beraktifitas di luar rumah kalau sedang tidak ada tembakan. Mereka ke ladang, jualan apa saja yang bisa di jual, kelapa, ikan. Masyarakat masih bisa makan tetapi tidak mencukupi. masyarakat di sekitar saya rata-rata sama tetapi yang banyak anak yang kasihan yang putus sekolah untuk cari makan.

Salah satu keluarga saya yaitu abang saya anggota GAM dan terlibat aktif sebagai Wakil Panglima GAM di daerah Bayeun bernama Nurdin. Panglima GAM waktu itu Teuku Raye Bachtiar. Di daerah kami antara orang-orang GAM dan milisi dari Jawa dengan masyarakat di Alur Nyamuk awalnya terlihat baik-baik saja. Mereka saling berteman, milisi sering beri (sumbangan) untuk operasi, maksudnya mereka kasih sama orang-orang di desa. Pokoknya baguslah. Sebulan sekali para milisi turun dari gunung dan keluar dari hutan atau masyarakat naik ngasih ke mereka GAM. Lama kelamaan mungkin mereka merasa tertekan, terus lapor, bukan maksudnya ada pihak lain lagi yang nggak serang lapor, pokoknya yang ingin aman biar tidak diganggu..Disana kemudian diberi 1 kompi BRIMOB untuk keamanan. Setelah itu wilayah-wilayah lain masuk ke barat. Maksudnya perselisihan antara suku Aceh dan Jawa di daerah Bayeun. Orang Jawa dan Aceh musuhan. Karena orang Jawa sering dimintai oleh milisi. Brimob jadi deking dari orang-orang Jawa yang punya kebon di atas. Orang-orang Jawa yang punya kebon karet atau sawit hasilnya bagus-bagus kasih ke orang Aceh yang GAM-GAM ini.

Waktu itu orang-orang GAM dijebak rupanya biar orang-orang aman atau tidak minta-minta duit. Orang-orang GAM ini dijebak katanya diundang ada kenduri. Waktu itu tanggal 24 bulan sepuluh hari minggu tahun 2000. orang GAM yang berangkat ada lima orang termasuk abang saya. Mereka naik 3 kreta (sepeda motor) datanglah orang-orang ini. Padahal itu jebakan dan sudah di tunggu brimob. Namanya sudah ditunggu, diatas bukit Brimob ini menembaki orang-orang ini, sempat juga menembak balasan, tapi namanya orang nggak siap. Cuma beberapa kali balasan orang sudah kena, yang empat meninggal, satu lari kena tanganya terus lari dan dia yang kasih berita, pertama dikop jam 4 sore baru jam dua belas malam baru sampai.. abang saya salah satu yang meninggal kena tembak.

Pemberlakuan DOM

Waktu diberlakukan Darurat Militer tahun 2000 di daerah kita orang nda berani kluar apalagi kalau sudah ada tembak-menembak. Kita tidak bisa bebas, operasi KTP sering berakhir dengan tindakan pukulan, apalagi pada orang yang diduga terlibat GAM.

Pengalaman Pribadi

Kakak sering dibentak-bentak tetapi tidak dipukul, dipinggir jalan sering dimintai juga oleh brimob-brimob yang sedang memalak supir-supir, jadi tidak Cuma GAM Brimob juga sering memalak, motor yang lewat dimintai duit, kalau tidak dibentak dan dipukul yang tidak distop ya lewat saja. Kakak pernah ditanya suami, para tentra ini masuklah mereka ke rumah tanpa lepas sepatu sa,mpai dapur-dapur di obrak-abrik, saya memang nda ada suami. Warga lain yang ada suami tetapi nda ada di rumah dipukul.

Dari pihak GAM sendiri, juga sering ancam kakak. Abang kakak sudah meninggal tetapi sering ada GAM sembunyi di rumah dan kita di suruh jangan bilang-bilang, nggak intimidasi kali terpaksa diam samapi tahun-tahun lama. Waktu sudah MoU sudah tidak berat kali.

Ketertarikan terhadap GAM

Kakak sering tanya kenapa abang menjadi GAM, katanya untuk bela Nanggroe, untuk menuntut hak yang dirampas, kekayaan, kebebasan yang dirampas orang-orang Jakarta, seperti jihadlah. Kakak bilang ..kan sudah ada yang berhak malah nanti kita kita mati, kita hanya rakyat kecil. Abang saya nda mau dengan dan nekad jauga tetap berjuang dengan GAM yang penting Aceh dikembalikan haknya.

Pemungutan untuk perjuangan GAM (Pajak Nanggroe?)

Pemungutan yang tadi disebut pajak Nanggroe, saya nggak ngerti, cuma ada beberapa yang diambil dari orang-orang Jawa. Tapi setahu saya ada aturannya berapa persen tapi tidak tertulis dari pihak GAM. Kalau dimasyarakat kadang dari orang-GAM minta untuk perjuangan tapi bukan pajak kita suka rela ngcsih. Tapi kalau ke orang Jawa saya tidak tau terutama orang Jawa yang di atas (daerah perkebunan karet) karna mereka kaya.

Sosok abang Nurdin sebagai anggota GAM

Abang saya kerjanya tukang bengkel sepeda, kreta dud-dua bisa. Orangnnya tertutup, nggak cerita, kadang dia pulang malam pergi malam. Kemana pergi nda tau. Abang tamatan SD. Abang selalu membawa radio ditangannya, HP satelit untuk hubungan dengan kawan-kawandimana-mana. Radio ini rupanya yang menjadi komunikasi yang digunakan oleh radio ini.

Tentang Referendum

Pada saat ada isu referendum ada, saya tanya sendiri untuk apa referendum. Saya jenuh kenapa mereka berontak terus. Nda ada ujungnya nuntut hak yang tau bisa apa nggak. Sebagian masyarakat Beyeun isu referéndum sebagai isu Aceh mau merdeka. Bahkan di jalan banyak orang-orang teriak Merdeka...Merdeka..agak diluar batas.saya takut sendiri. Masyarakat nda pikir lain, yang ada pikir merdeka...merdeka kalau sudah pikir merdeka bukan selamat, referéndum merdeka.

Isu yang banyak didengar , kalau Aceh referéndum, Aceh Merdeka . kalau kita merdeka itu Aceh akan kaya , punya mobil satu seorang. Kerna Aceh kaya, vanyak harta , harta Aceh. Harta Aceh kalau merdeka dikelola sendiri, kalau tidak merdeka tidak bisa. Isu itu sangat ramai dibicarakan dari mulut ke mulut, setau kakak tidak ada pidato-pidato di daerah Peurlak, tapi tau di luar wilayah kita orang tak tau. Ada kerta-kertas selebaran tapi walaupun ada pidato tertutup.

Kedudukan kepala desa waktu itu sangat sulit dan serba salah, kayak orang linglung. Tapi nampaknya dia harus pandai-pandai bawa diri. Kalau di daesa harus memihak, tapi kalau di perkotaannya tidak.

Untuk mwembantu referendum pada waktu itu paling tidak satu katron agua harus disediakan harus ada. Ketika referendum sant mereka memberikan sesuatu tidak dengan terpaksa. Katanya untuk merdeka, kalau sudah merdeka akan aman.

Harapan Aceh Ke depan

Memperhatikan pembangunan Aceh, masa konflik, dibangu kembali. TNI tetap menjaga, namun sikapnya harus adillah. Penyelesainay masalah Aceh jangan sampai dengan kekerasan militer lagi.

Nama : Salamah
Umur : 50 tahun
Alamat : Selemahmudah, Kec. Nursalam. Peurlak
Pekerjaan : ibu rumah tangga
Keterlibatan konflik : keluarga korban
Wawancara : 18 Agustus 2009
Kategori keterlibatan : masyarakat sipil
Kategori Wilayah : wilayah Konflik kategori daerah Hitam
Bahasa : Aceh

Pengalaman tentang Konflik

Daerah Selemahmudah ini jadi daerah konflik, (daerah ini dikategorikan daerah hitam). Daerah ini sering terjadi baku tembak. Kalau terjadi orang-orang lari, kalau orang-orang GAM turun, kita tidak tidur di rumah kami mengungsi ke tempat lain. Kalau sudah nampak orang-orang GAM atau tentara kami lari terus, walaupun sedang masak nasi, di Kuala Lorong, di jalan-jalan, orang-orang kampung menghindari ke tempat lain.

Peristiwa yang membuat trauma saya, saat rumah dibakar. Peristiwa itu diawali dengan adanya pertempuran antara GAM dengan Tentara. Perempuan-perempuan takut karena takut tertembak. Waktu itu bapak tidak ada di rumah, anak-anak di kurung yang perempuan dipukul karena kalau ditanya saudara laki-laki tidak jawab mereka dipukul, rambut anak perempuan dipotong ditarik-tarik sampai sekarang anaknya tidak bisa berpikir normal, anak yang ke 4.

Saya punya anak laki-laki yang ikut menjadi anggota GAM. Anak ini dicari oleh tentaranya ikut GAM. Saya tidak tau dimana anak laki-laki saya, semua isi rumah di rusak. Rumah saya dibakar tentara. Sampai sekarang saya takut mendengar suara tembakan.

Tentang Referendum

Saya orang kecil miskin nda tau apa itu referendum, oya yang ke Banda, banyak orang pergi ke Banda ramai-ramai untuk merdeka. Saya tidak diminta apa-apa, saya orang miskin. Kami diberi oleh GAM bantuan. GAM baik.

Arti Kemerdekaan

Yang penting kami bisa makan saya sekeluarga senang. Sekarang sudah jadi tukang derek tidak takut, tidak lari-lari. Jangan ada tentara lagi yang datang bakar-bakar rumah lagi.

Dana Bantuan Konflik

Dapat untuk rumah ini, dulu rumah ini dibakar dapat 25 juta rupiah.

Nama : Hasan Ibrahim
 Umur : 55 tahun
 Alamat : Selemahmudah, Kec. Nursalam. Peurlak
 Pekerjaan : petani deres karet
 Keterlibatan konflik : keluarga korban
 Wawancara : 18 Agustus 2009
 Kategori keterlibatan : masyarakat sipil
 Katagori Wilayah : wilayah Konflik kategori daerah Hitam
 Bahasa : Aceh

Pengalaman waktu Konflik

Waktu konflik seperti nyang digambarkan isteri saya, disini sering terjadi baku tembak. Saya dituduh sebagai GAM. Saat itu ada pembakaran di pajak ikan (pasar ikan) Idi Cot. Saya ditangkap di Idi tanggal 14 agustus 2000, setelah saya pergi dari laut hari Selasa jam 11 siang. Di tangkap di jalan rajawali mau pergi ke Kuala Idi. Ada kluar TNI ditangkap langsung. Sesudah itu di ikat dipukul kemudian di gantung kak' saya ada di ikat di atas, mulai jam setengah dua belas sampai jam tiga sore. Katerja saya ditangkap karna twerlibat pembakaran di pasar ikan. Dikira saya yang membakar. Jam setengah tiga datang Brimob dari Cantur Idi , kemudian dibawa saya ke kantor Idi sampai ndisana dimundikan di bawa ke Langsa di tangkap oleh TNI Rajawali ditanya tentang anak saya juga. Sesudah di Langsa selama dua malam. Nda disiksa lagi tapi diperiksa. Kejadian itu hari Minggu saya pulang. Selain saya ada lima orang lagi. Orang itu nggak tau berkumpul di Langsa.

Saya dipenjara disiksa , bagian tubuh saya dibakar sampai nda bisa jalan waktu berusaha lari. Orang kampung tolong lepaskan tali. Rumah ini dibakar, karna nda ada anak saya yang dicari. Anak perempuan saya itu (menunjukan ke seorang wanita muda) dipukul sampai pinsan dan dipukul-pukul sampai sekarang ingatannya tidak bisa pikir. Kami tidak memihak sekalipun tapi terpaksa anak-anak pinsan sampai berkali-kali, juga mamak sampai sekarang masih trauma dan pinsan-pinsan. Memang waktu itu sakit hati sekali, tapi sekarang ngguk masalah, sakit dipukul tulang rusuk saya.

Waktu konflik tahun 2004 saya disini lari tapi tidak jauh-jauh. Kalau ada pasukan ke sini turun ke kedai lari sama keluarga. Kalau aga GAM kita diam saja. Sama TNI kalau datang Tni ada tengok GAM kalau ditanya jawab ada, kamana pergi nggak tau kemana lari. Mana kita tau, kadang-kadang TNI kadang-kadang GAM. Dari GAM tanya ada TNI, bilang ada.

Saya sangat terganggu waktu konflik , tidur nda tenang kerja nda ada lari terus. Sebab kami dibilang orang kampung orang GAM. Ada macam-macam, itu kok GAM. memang keluarga kami yang GAM tahun 1999 namanya Hambali rumahnya di atas. Sebagai orang tua saya tidak bisa turut campur dia sudah kelaurga mana mungkin kita ajarkan lagi. Itu perasaan yang diambil aparat kita coba untuk bersikap tenang sebab itu ada macam-macam fitnah. Dia jam 2 pulang belum di makan TNI masuk. Anaknya ditangkap dan disekap. Pimpinan GAM di Selemahmudah Teuku Mahinasyah.

Ketika tau anak saya ditangkap saya pasrah ke Allah. Merdeka tidak merdeka terserah Allah. Merdeka bukan lepas dari Indonesia. GAM dan TNI ada diadu domba.

Tentang Referendum

Waktu referendum tahun 2000 saya tidak lagi dirumah, saya ke laut saya jadi nelayan. Jam sembilan saya ke laut dari terkumpul tanggal 3 bulan Maret tahun 2000. Satu bulan saya ke laut habis bulan saya dilaut sudah terdengar diradio tentang referendum. Kami masyarakat menganggap kalau-kalau nda beres. Katanya Aceh merdeka.. kita belum tau apa. Konflik terus ada, trauma anak-anak saya yang ditangkap dan dipukul terus ada. Jadi referendum saya ndak tau. Kalau kita pergi ke kedai kita nda bisa komunikasi. Kalau dikedai kita lihat dimana TNI, sebagai tempat mata-mata Kalau ada TNI atau GAM kita masyarakat sedikit takut. Orang-orang GAM pernah membantu kasih bantuan uang waktu lebaran. Memnga saya enggak pernah diminta sumbangan karena dilihat orang miskin, orang GAM kasihan juga .Memang dulu kepala desa waktu konflik tidak dikampung, karena takut.

Tentang MoU

Pernah dengar katanya kita damai merdeka Aceh. Ada dengar orang-orang GAM katanya ita merdeka. Damai tidak prang (perang) lagi.

Harapan Aceh ke Depan

Harapan bapak memang ada perubahan sedikit untuk sekarang. Ke depan untuk masyarakat jangan hidup dibuat susah , resah orang jangan ada konflik .kami ingin menghilangkan trauma-trauma apalagi anak dan istri saya sampai sekarang masih ketakutan, pernah waktu ada suata petasan dari bambu waktu lebaran isteri saya langsung pinsan. Ulit sekali menghilangkan trauma.

Orang-orang GAM yang sudah jadi DPR kita masyarakat juga memang jangan dibentak-bentak lagi jangan dengan kekerasan. Masyarakat juga kita yang kecil diperhatikan. Kita dari dahulu tidak pernah dijajah dan selalu merdeka. kita pada tahun 1953 sudah merdeka dilaksanakan oleh Teuku Daud Bereuh, Aceh Indonesia. Konflik Aceh jangan terutalag dan nggak pengen.

Nama : Legiyem
 Umur : 50tahun
 Alamat : Alu Gading, Alur Mekong , Beyeun, Bireun
 Pekerjaan : petani karet
 Keterlibatan konflik : keluarga korban
 Wawancara : 18 Agustus 2009
 Kategori keterlibatan : masyarakat sipil
 Katagori Wilayah : wilayah Konflik kategori daerah Hitam
 Bahasa : Jawa

Pengalaman konflik

Daerah kami merupakan daerah wong Jawa, tapi ada sediki' yang Aceh. Daerah kami orang-rang Jawa banyak jai petani ladang kami sampai 7 hektar. Orang Jawa di sini sebelum konflik tenang. Tapi sering kali kita di minta duit katanya untuk perjuangan orang Aceh.

Waktu bulan Januari 2001 rumah kami dan masyarakat sini di datangi oleh orang-orang GAM jumlahnya 30 orang. Mereka bersenjat lengkap. Waktu itu rumah ruang tamu penuh untuk tidur orang-orang itu. Bangun pagi jam 5 masak untuk sarapan , jam 7 cuci piring jam 12 masak lagi, seperti itu masih di injak-injak. Orang di sini bergantian jaga takut ada tenra. Kita nda bisa lari takut ditembak GAM, sana ada GAM, sini ada GAM. Setelah itu GAM pergi datanglah TNI.

Pada tanggal 3 Januari 2001 jam 8 malam. Rumah kami di atas bukit rumah batu. Ada orang itu (GAM) teriak. Orang Jawa ya...orang Jawa kutembak kau...bapaknya anak-anak jawab ...Jangan tembak , jangan tembak, terus dipukul pakai popor ditembak dor terus tersungkur. saya dan anak-anak dimasukkan ke dalam kamar. Anak saya laki-laki 2 dan perempuan satu. Dimasukan ke kamar dikunci. Masuk ke kamar orang itu nanya mana hartanya. Saya bilang saya nda punya harta, Cuma anak-anak. Semua dibongkar. Bapaknya anak-anak pinsan aku pikir juga mati. Orang tadi mulai bakar rumah kami. Orang-orang kluar semua. Waktu dikamar saya takut bingung bagaimana mau kluar. Saya ingat ada jendela anak-anak saya suruh melompat jendela dan suruh lari terus, saya kar gemuk saya pikir kakiku patah karena sebelah jendela ada jurang kami masuk jurang. Api dirumah mulai membakar, aku ingat bapak. Aku suruh anak-anak sembunyi di bawah pohon pisang aku kembali ambil bapak, dia masih belum sadar, aku gendong terus aku letakan di semak pohon pisang.

Rumah atapnya sudah kebakar akuingat ada air di drum ada du drum aku dengan anaku siram ke rumah. (sampai sekarang luka bakar dari bu Legiyem masih ada).

Nama : Suparno
 Umur : 50 tahun
 Alamat : Alu Gading, Alur Mekong, Beyeun, Bireun
 Pekerjaan : petani karet
 Keterlibatan konflik : keluarga korban.
 Wawancara : 19 Agustus 2009
 Kategori keterlibatan : masyarakat sipil
 Kategori Wilayah : wilayah Konflik kategori daerah Hitam
 Bahasa : Jawa

Pengalaman waktu Konflik

Orang-orang Jawa di sini dulu makmur. Mereka kerja terus dan kalau orang Aceh iri. Orang-orang GAM minta uang ke kita. Lama-lama kami tertekan juga. Kami sering di telatki hai orang Jawa. Katanya kami penjajah, kami diusir. Waktu ada GAM di rumah kami memberikan apa yang ada. Kami memberikan ya dengan terpaksa kami laripun tak bisa. Setelah GAM pergi datalah TNI kami lebih aman dengan TNI.

Namun rupanya ini mengundlang marah GAM, pada tanggal 3 januari 2001 mereka datang dan teriak orang Jawa kau, kutembak kau. Aku kena pukul dan nda sadarkan diri. Tau tau rumah sudah dibakar. Rumah orang-orang lain juga dibakar. Ozan mau tolong saya setelah itu aku muntah-muntah rupanya gegar otak dan sampai sekarang masih suka pusing dan sering lupa.

Keponakan saya ditembak namanya Warnen, karena besannya orang TNI namanya Panio, dinggap GAM segai mata-mata untuk TNI. Waktu ditembak sampai beberapa kali tidak meletup, kemudian ditembak dengan laras panjang dor kepalanya lepas. Sebenarnya ozan keponakannya sudah ngajak lari tetapi Warnen tidak maukatanya sudah kalau memeng harus mati di sini ya nda apa-apa. Anaku lari. Yang jadi korban di dusun sini banyak.

Setelah kejadian macam mana ngeri inget-inget. Disini ada orang Jawa dan sedikit orang Aceh. Orang Aceh nda kena. orang Aceh jadi mata-mat. Memeng iya. Orang Aceh kemudian ditangani Brimob. Kami ganti membakar kampung Aceh.

TNI baguslah melindungi rakyat yang buat kami sedih lagi, kami harus pergi dari sini, menuju Riau, Medan tapi tak peroleh kerja. Tahun 2002 demi perut kami kami balik ke sini. Tapi kami di daerah Beyeun belum berani ke sini, di sini Cuma untuk kerja, kalau ad abekas sepatu tentra kami tenang. Tapi kalau dengar suara tembakan kami langsung pulang. Setiap hari kami harus bawa parang untuk memela diri sampai sekarang.

Tentang Referendum

Kami diam saja, tidak ikut apa-apa. disini ndak banyak reaksi. Waktu ualang tahun GAM kami dimintai uang. Malam-malam ketuk pintu, saya sudah siap-siap dengan parang dibalik pintu nda berani kluara, saya tanya Siapa... jawabnya saya ... mau sumbang untuk perjuangan... aku tanya lagi berapa? dijawab sertus ribu.. saya nda punya lalu saya selipkan duapuluh ribu tanpa mambuka pintu.

Dana rekontruksi konflik

Nda dapat dana ..eh pernah 1 juta .. tapi hartaku sudah ileng semua, rumah dibakar, sekarang kami sekeluarga menempati rumah seperti ini.

Nama : Warni
 Umur : 28 tahun
 Alamat : Alu Gading, Alur Mekong, Beyeun, Bireun
 Pekerjaan : petani karet
 Keterlibatan konflik : keluarga korban
 Wawancara : 19 Agustus 2009
 Kategori keterlibatan : masyarakat sipil
 Kategori Wilayah : wilayah Konflik kategori daerah Hitam
 Bahasa : Jawa

Pengalaman konflik

Orang Aceh dan orang Jawa di sini bagus tetapi tidak dekat, kalau ketemu biasa saja. Orang Aceh sering teriak kita sebagai orang yang Jawa yang menjajah Aceh. Waktu konflik sering kalaun kita jalan di daerah Beyeun. Kami tidak menyangka kalau daerah sini akan jadi pembakaran dan penembakan. Karena disini ada orang Aceh seharusnya aman, beda kalau yang di daerah Wonosari hanya ada orang Jawa. Tapi di Wono sari malah aman karena ada Brimob.

Waktu kejadian ada 7 orang masuk rumah dan masuk ke kedai langsung ambil semua yang ada, lemari, dibuka paksa grombyang lemari dijatuhkan, rokok yang mahal-mahal makanan yang ada semua diambil. Sambil memaki dengan kata-kata kasar seperti anjing kamu, anjing kam i. Saya menangis, tau saya menangis orang itu malah bilang kalau nggak diam aku tembak kamu... sambil mengacungkan senjata, saya takut, saya diam, duduk di depan. Orang itu menjatuhkan lemari tempat tidur dibakar.

Sebagian orang masih nonton tivi di sebelah sana, aku dan anak-anak juga pak lik disuruh kumpul di lapangan. Orang-orang GAM itu pakai bahasa Aceh dan pakai tutup kepala, pak lik mau ambil KTP bilang ke GAM mau ambil KTP, diantar Gianto keponakannya. Tapi terus terdengar Demi Allah, Allahu Akbar. Dan terdengar suara tembakan. Rupanya pak Lik dicurigai, terus disiram minyak lampur tapi tidak bisa dibakar, terus ditembak pakai senapan besar. Waktu itu lampu mati semua. Tidak ada yang berani melawan. Setelah orang-orang itu pergi kami pulang ke rumah masing-masing, tapi rumah kami sudah dibakar.

Harapan Aceh ke depan

Mintanya ya damai. Kalau ada TNI kita tenang.

Referendum dan MoU

Kami tidak ikut, orang-orang sini tidak ikut ke Banda. Kalau MOU kami nda ngerti yang penting bagi kami biarkan kami tetap di Aceh.

Nama : Zainal bidin
 Umur : 30tahun
 Alamat : Kuala Langsa
 Pekerjaan : Nelayan
 Keterlibatan konflik : Simpatisan GAM
 Wawancara : 18 Agustus 2009
 Kategori keterlibatan : masyarakat sipil
 Katagori Wilayah : wilayah Konflik kategori daerah Abu-Abu

Kondisi Masyarakat pada waktu Konflik

Di Kuala Langsa di lorong ini bermacam-macam suku, saya sendiri ada keturunan etnis Cina, kami hidup berdampingan. Waktu konflik disini relatif aman meski jalan di depan (rumah informan berada depan jalan Kuala Simpang dan merupakan kampung nelayan).sering diadakan rasia oleh Brimob, di sini aman.

Kami hidup di Aceh ada undang-undang di Kuala Langsa yang harus sama-sama dijunjung oleh warga sini. Menanggapi pertanyaan tentang penerapan peraturan yang berlaku di masyarakat, saya liat undang-undang yang ada sekarang bukan undang-undang yang benar karena sisa-sisa undang-undang orang Belanda. Kenapa kita tidak menggunakan syariat saja. Saya lebih senang kalau di Aceh menggunakan peraturan syariat,tapi yang di atas-atas tidak sesuai. Macam kalaulah dah buat salah mereka tidak pakai syariat untuk hukum dirinya. Kalau Syarikat Nanggroe didirikan, dan semua orang juga bapak pejabat dikenakan, buat salah dicambuklah, tapi mereka tak kena, mana mau dicambuk.

Kalau seperti ini mana kita harus lihat lagi MOU Helsingki yang ada, bagaimana peraturan syariat, apakah nanti ada diajukan ladi oleh Partai Aceh.hal inikerna sering terjadi benturan terhadap penerapan syariat dan peraturan. Kami sendiri senang syariatlah karna semua aturan berasal dari aturan Al-Quran dan Hadist. Bagi macam-macam ini tidak tau berlaku untuk penjahat pejabat.Kalau dulu ngomong macam ini nda bisa, kita tak bisa ngomong macam ini. Kalau ketahuan siang malam nanti dah hilang diculik , pagi mati dibuang dijalan.

Waktu konflik TNI beraninya di kampung-kampung, nyawa dibawa, disepak. Ketika mereka dihutan mereka Cuma tidur , nda brani seperti kita. Kita tahu medan kita perang grilya. Di daerah ini kita bisa masuk daerah perbatasan Indonesia dan Thailand. Pernah waktu itu kita kontak senjata TNLi pakai KRI kita pakai kapal kepompong, dalam pertempuran takut dia.kita pukul lari.

Kita GAM kan sama dengan rakyat, maka sulit Tentra bedakan kita dengan rakyat itu.juga buat TNI main pukul orang tak salah diambil, dipukul , dibunuh.

Saya pernah ditangkap Yonif 8, karna dicurigai bawa ai. untuk GAM di hutan. Saya bawa bukti barang di prahu,ternyata tetap saja kami ditangkap, disepak dan ditendang. Kalau kita tidak kita tinggal nama.

Pendanaan rekontruksi konflik kita pernah dapat ada 25 juta, untuk modal kami usaha. Kami dapat orang per orang. Tapi tidak saya ambil semua. Tapi ada sekelompok-sekelompok GAM yang tidak dapat dana itu. Itulah jangan salah kalau mereka buat gaduh ambil duit-duit di jalan, merampok, memalak. Mereka tidak dilihat. Mereka yang dari hutan-hutan kebingungan mau buat apa. Kerja tak ada. Janji ada dikasih duit tak ada juga.

Makna MOU

Bagi saya MoU jalan tempat kita perjuangan bisa dapat, tapi ingat kalau pemerintah tak dapat laksanakan dan bohongi rakyat Aceh , pastilah akan ada lagi gerakan macam konflik kemaren. Kita orang Aceh yang selalu pegang janji, kita diambil semua harta untuk Jakarta, kita hanya muntut hak kita Aceh. Beri kebebasan untuk mengelola Aceh jangan ganggu Aceh lagi dan jangan bohongi Aceh. Pasti kita lawan orang kaphe'.

Nama : Tengku Muhamad Yatim Usman
 Umur : 38 tahun
 Alamat : Hagu Barat Laut, Lhokseumawe, Aceh Utara
 Pekerjaan : anggota DPRD Lhokseumawe
 Keterlibatan konflik : Panglima Sago wilayah Lhokseumawe
 Wawancara : 19 Agustus 2009
 Kategori keterlibatan : Petinggi GAM
 Katagori Wilayah : wilayah Konflik kategori daerah Hitam

Persoalan Aceh merupakan persoalan politik, Aceh tidak memungkiri hubungan dengan wilayah-wilayah lain. Bila Aceh melahirkan konsep-konsep aturan dahulu Aceh siap untuk berdamai. Harga perdamaian sangat mahal setelah ribuan orang jadi korban konflik selama 30 tahun. Kita tau perjuang Aceh menuntut hak. Persoalan hari ini di Aceh Indonesia mengatakan Aceh pembontak, mereka salah. Kita hanya menuntut kebenaran. Didalam konsep negara kesatuan dalam perjanjian mereka telah memungkinkan konsep-konsep dalam perekonomian. Kita tetapi dalam konsep negara kesatuan dalam perjanjian mereka telah memungkinkan konsep-konsep dalam perekonomian. Kita tetap bermula cangkan dalam peraturan juga bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara tapi aplikasinya nol, hal ini akhirnya yang menjadikan Aceh menjadi daerah yang bodoh. Bagi Indonesia bahkan menjadi mengkhianati dan manjajah, menipu lagi. Jadi saya katakan sekarang Aceh menuntut hak lagi. Kita berpihak, Aceh perdamaian tapi masih nggak jelas perkonomiannya. Mau kita kembali Aceh berjaya. Persoalannya kita berat Undang-Undang apalagi Aceh diberi pemerintah sendiri kita bertanggungjawab ke Pusat, 6 point termasuk paparannya. Keluar negeri, viskal, ekonomi, perdagangan semua dikembalikan oleh Aceh sendiri. Kenapa kita mau karena mengingat harga perdamaian itu sangat mahal. Kita ini seperti pembontakan perang, berkat bantuan Allah Aceh merdeka. Kita damai dengan keadilan. Kita bukan pembontak. Kalau kekayaan semua diangkut ke Jakarta, apa ada orang Aceh di Jakarta menyalurkan, persoalan pemerintah waktu itu bagaimana rumah-rumah rakyat, kemana uang itu, pengontrol uangnya kalau negara koruptor negara hancur. Di Aceh berdamai lah. Persoalannya pusat jangan menipu Aceh lagi. Orang-orang Aceh di luar negeri mereka masih menuntut kemerdekaan. Arti kemerdekaan itu sangat luas. Kalau hasil bumi ini dibawa kesana, maka rasa percaya pada pejabat. Bagaiman rumah rakyat, nasib rakyat yang sangat beda sat negara Aceh. Kemana uang itulah pemerintah yang tidak konsis dengan sistem uang, komitmen GAM-RI. Bagaimana untuk menjadi perdamaian, kalau tidak kita jaga. Perdamaian satu dua hari, apalagi teman saya kan ada persoalan panjang. Apalagi teman saya di Eropa, Amerika, di Australia tidak ada arah otonominya. Mereka semua tidak setuju dengan perdamaian ini, mereka masih menuntut kemerdekaan. Jadi artinya kemerdekaan yang luas kalau ekonomi, yang luas, keamanan nda merdeka. Isikan perdamaian dengan kemerdekaan, seluruh lini, kons?p perdamaian harus dipahami.

Mengapa orang-orang Aceh yang ada di luar negeri tidak setuju dengan perdamaian? Mereka sah-sah saja, ini alam demokrasi, kita harus dapat meyakinkan mereka dengan perdamaian ini benar-benar bisa menerima ini. Jadi jangan sedikit-sedikit GAM, oknum juga, bagaimana kita beri kesejahteraan mereka. Bagaimana caranya apalagi mereka telah tiga tahun, dihutan ada yang dua tahun dihutan.

Bagaimana mereka disosialisasikan kembali ke masyarakat. Itu yang harus kita pikirkan.

Saya pribadi telah banyak mengalami tragedi. Bulan Maret 1998 saya dipaksa ke gunung. Kemudian saya kena tembak dan saya dibawa ke rumah sakit, tahu-tahu kaki saya telah dipotong. Ya mungkin saya tidak berburuk sangka, kaki saya di potong ada unsur-unsur politiknya. Kemudian saya ke Malaisia dan akhirnya ke Denmark.

Awal saya tertarik membantu GAM, berawal dari keyakinan bahwa Aceh tidak pernah dikalahkan oleh penjajah manapun Belanda, Jepang. Kita telah terbentuk negara ketika Sorkarno mengumumkan wilayah Aceh tahun 1953. N amun apa yang diberikan tentang keistimewaan Aceh nda jelas dengan memerangi dan membodohi. Di Indonesia buat sistem sentralisasi, Aceh supaya dipikirkan oleh pusat. Kenapa di Aceh kalau ada orang datang sekarang selalu curiga? Sebenarnya itu proses pembelajaran sikap pemerintah yang menyebabkan hilang keprobadian dan curiga. Saya tertarik pada perjuangan GAM karena memperjuangkan kepentingan umat, nda salah dengan agama. Ini konsep sama dengan Islam.pemerintah tidak jelas dengan konsep, walaupun otonomi, sampai keluar. Saya keturunan pejuang Aceh,saya harus teruskan. Saya jadi Ule Sago (Bupati) tahun 1989 letak jabatan baru kemari. Panglima Ule Sago Teuku Dallah, daerah perjuanga di daerah.

Pada tahun 1999 saya ditangkap terjadi penyiksaan kemudia saya dilepaskan. Itulah tahun 1989 saya turun gunung bersama Yusuf Ali saya kluar ke Malaysia. Saya ditugaskan ke Eropa. Jumlah kami ada 32 dipersenjatai lengkap. Kalau saya dibawa saya akan mati, kami dalam kelompok yang diburu ada yang mati ada yang tertangkap, ada yang dimalaisia. Saya harus kembali ke Aceh memberi saya 50 juta.

Aceh inginkan pemekaran, rujukannya pada tanggal 1 Juni 1956 Rujukan Aceh. Apakah Aceh setelah RUU Partai Aceh. Aceh jangan didikte, jalankan dulu 70% persen untuk Aceh, 30 % untuk pusat secara konsisten. Kalau kesenjangan di Aceh tetap g ia. Kalau dibiarkan kebijakan melenceng pasti ada perjuangan Aceh lagi.

Pajak Nanggroe, kalau dulu ya, dalam perjanjian ada disitu untuk membina para combatan. Mereka sangat mengharapkan pada kami, ekonomi dan pendidikan. Kalau kemerdekaan Aceh dah dapat saling menghargai tapi kita belum coba seperti ini di Eropa.

Nama : Tengku D.A. Rahman
 Umur : 69 tahun
 Alamat : Desa Matang Ara, Kec. Mayak Payet, Kab. Aceh Tamiang
 Pekerjaan : Veteran
 Keterlibatan konflik : Mantan Panglima Ule Sago wilayah Mayak Payet
 Wawancara : 16 Agustus 2009
 Kategori keterlibatan : Petinggi GAM
 Wilayah : Daerah Abu-abu

Perjuangan dalam GAM.

Kalau dulu wilayah ini merupakan wilayah &, Tamiang jadi kalau ada orang pulang ke Aceh Utara harus ke Simpang Ulim dulu. Kita bukan orang yang pegang senjata, waktu itu Husein Mujahid sebagai Komandan Besar tahun 1953 karena teringat saya kali. Pecah disepanjang jalan DI/TII.

Saya mantan Geucik setelah selesai jadi geuciksaya kerja di perkebunan Tuan Sati sebagai pengawas. Karena Tuan Sati tau saya mantan FBI rupanya dalam peristiwa itu saya dipecat. Gara-gara saya lari dari Megarsari ke Bukit Tinggi.

Jadi apapun kalau kita pikir cerita kita yang bekerja orang yang senang itu terjadi di Aceh. Saya sama Tuan Puteh mantan Panglima Gunung Masid nda ada yang berani mengatakan kita GAM waktu itu. Saya masuk GAM karena ajakan dari teman yang ada di atas, saya katakan perjuangan GAM tepat betul karena perjuangan dari nenek moyang kita belum selesai. Saya dulu anggota DI/TII, ayo kita lanjutkan kita bergerak lagi kita selesaikan pada saat pidato di Rembug Pidi.

Ini perjuangan yang berbeda dengan DI. Pada waktu itu hal yang perlu ditanyakan disini, kita jangan pakai orang pakai orang Jawa sampai kebawah. Sudah dapat, orang lalu tapi ujung-ujungnya lemah. Jangan meminta tolong ke orang Jawa, Alasannya sebagian orang kita Jawa sudah keturunan nenek moyang di Aceh, tapi belum jadi Aceh, masih belum ada kawin silang. Namun belum Aceh asli, meski bahasa Aceh. Jangan sampai orang Jawa boleh ikut kalau perjuangan sudah selesai kita tanya orang Jawa, dari tahun berapa mereka ada di Aceh. Kalau misalnya jawabnya dari nenek moyang nda tau lagi ihwal keturunannya berarti dia orang Aceh. Tapi kalau orang tersebut tahun 1995 maka oorang Jawa dibilang kamu pulang dulu buat surat paspor baru masuk.

Kita orang sudah dianak tirikan. Perjuangan kita menuntut hak Aceh dari segala kekayaan Aceh yang diambil, dikuras, dibawa pula dikasih orang lain, sedangkan si Aceh sendiri banyak yang nggak makan.

Kalau Aceh nda berdiri, Aceh akan kembali. Banyak sekali uang Aceh. Saya dulu aktif juga di AM. Padu sebenarnya Aceh ingin melepaskan diri dari RI wajar karena sebagian dari orang ini (GAM generasi baru) tidak mengikuti perjuangan GAM. Kalaulah tidak melepaskan dari NKRI harus diatur bagaimana Aceh bisa berdsiri sendiri, jangan diatur kemana-mana. semua menjadikan Aceh miskin. Ada sebagian yang berjuang untuk melepaskan diri, namun sebagian untuk dapat hidup dengan layak.

Kalau yang muda macam mana perjajian tetapi sudah mendekati. Ketika perjuangan sudah tidak sesuai dengan awal perjuangan saya mundur. Saya senang mati dibunuh.

Ada 8 butir lagi yang kita sekarang perjuangkan, saya bukan pembesar lagi. Cuma sekarang saya dipandang sebelah mata oleh orang-orang GAM yang muda-muda.

Orang banyak bantu kita orang Padang, kami sering ke situ. Kata mereka wajar kalau Aceh bergerak. Mengenai perbatasan menuet sejarah Aceh yang dituntut kembali adalah daerah Gebang. Saya ras di kasih kembali kuala Simpang sudah lumayan. Macam kita orang dikuasai tapi nda cara ribut. Kita dikuasai sistem itu, sistem Jepang pula labu. Sistem nggak baik jadi ukurannya adalah seberapa jauh pucuklah kemana-mana.

Pengalaman sebagai korban konflik

Saya tugas di kebon, saya nggak tahu rumah sudah dikepung. Saya maka tiga suap tetapi sudah tidak mampu makanan masuk, ada apa, saya sujud ke mamak saya makan, kemudian mamak bilang pergilah dengan selamat, waktu saya kembali ke menasah keluar Pak ABRI, saya tidak bisa tidur di kantor saya bersama Ahmad Stein, saya tidur di pak Citro.

Saya dan Pak Citro bersama-sama berpidato, di 7 kampung Jawa, saya katakan kalau Geucik kasih keluar warga saya nggak jamin selamat, resiko saya ancam. Ini bukan ancaman bukan mau bunuh pak Lurah. Namun ada dua wilayah yang diluar kendli yaitu du Alur dan Mendading. Pada waktu itu terjadi eksodus orang-orang Jawa di Mandading rupanya ada orang yang menulis di pintu orang-orang Jawa Boleh menempati 1 x24 Jam lebih dari itu tidak tanggung. Rupanya itu ditulis oleh orang Jawa.

Kebijakan DOM telah membuat orang Aceh terbakar semangatnya. Dulu rakyat Aceh yang tidak ikut perjuangan menjadi ikut berperang. Bayangkan saja kadang kita sedang duduk bertiga datang Tentara kita lari karena takut bukan salah, terus ditembak, yang lainnyapun akan kena jerat.

Orang dari luar sering melukai perasaan orang Aceh, seperti ucapan Jendral (wiranto maksudnya) yang mengatakan " Kami tidak perlu rakyat Aceh kami perlu tanah Aceh" ucapan itu akan selalau diingat oleh orang Aceh.

Kondisi Aceh meski sekarang sudah damai ibarat ikan yang telah sering dipancing. Sudah banyak luka yang ada di mulut terkoyak, dan telah membuat ikan sakir. Kalau pemerintah di Jakarta tidak open bisa bedrontak lagi, apalagi bagi anak-anak yang menjadi korban.

Nama : Ismuha Sabi
 Umur : 42tahun
 Alamat : Desa Raja Tuha, Kec.Mayak Payet, Kab. Aceh Tamiang
 Pekerjaan : Petani
 Keterlibatan konflik : Mantan Combatan
 Wawancara : 16 Agustus 2009
 Kategori keterlibatan : Anggota GAM
 Wilayah : Daerah Abu-abu

Saya menjadi combatan di wilayah Peurlak. Saya menjadi GAM dan dilatih kemiliteran di Malaysia. Kami tidak pernah mengusir orang-orang Jawa tapi kami hanya mengatakan kami tidak menjamin keselamatan saudara, kalau kita orang Jawa merasa tidak nyaman dan tidak terjamin keselamatannya silahkan saja keluar dari Aceh, karena ini daerah konflik.

Saya masuk GAM umur 20 tahun, karena kondisi ditempat saya di daerah Arun sangat memprihatinkan.

Pengertian negara Indonesia sebagai negara kepulauan adalah negara yang berdiri sendiri, juga yang harusnya terjadi di Aceh biarlah kita mengurus Aceh sendiri.

Mou Helsinki merupakan perubahan strategi perjuangan GAM, sebenarnya perjuangan kita masih panjang kita masih ada garis komando. Kita belum arti damai. Apa yang ada di Helsinki (Mou maksudnya) harus diwujudkan, seperti desintegrasi (reintegrasi maksudnya), kemakmuran orang Aceh. Pencapaian Helsinki dianggap tepat. Dimana eksekutifnya sudah dikuasai GAM kemudian legislatifnya harus masuk. Mou menjadi tujuan akhir, lkalau pemerintah melaksanakan MoU Helsinki di bumi Aceh.maka sejahteralah kita . tidak ada lagi kata merdeka lagi, kita NKRI. Tapi kalau pemerintah mengkhianati ini akan berubah lagi. Kita komitmen menerima 5 hal .

Abang saya meninggal ketika Darurat Militer I tahun 1999. Abang di bawa ke Gaperta oleh Kopasus dan dibawa ke Jambi, sekarang tidak tahu kabarnya. Pada saat Darurat militer I kita GAM dipisahkan dengan masyarakat sipil. Kita di hutan-hutan, pada waktu selanjutnya kita tidak dipisahkan dengan masyarakat. Masyarakat hutan kami, pelindung kami. Masyarakat akan melindungi kami.

Jangan ada kata kamimemusuhi Jawa. Kami tidak memusuhi Jawa. Kami memusuhi pemerintah Indonesia, tentunya agama,pemerintah Indonesia atau siapapun yang merupaka perpanjangan tangan pemerintah.

MoU Helsinki

Pencapaian Helsinki dianggap tepat, eksekutifnya sudah dikuasai GAM kemudian legislatifnya harus masuk. Bagaiman kita merubah dan membuat sistim baru di Aceh. Mou sekarang belum berjalan. Saya masih ragu dengan HDC-CoHA semua porak poranda. Harapan kita merkeka harus betul-betul melaksanakan MoU di Aceh. Kalau terlaksana di Aceh tidak ada apa-apa.

UU PA

Syariat Islam di Aceh tidak berjalan karena terbentur dengan undang-undang . kalau ini dilanggar .maka akan ada perjuangan lagi.

Harapan tinggal bagaiman legislatif GAM, mereka harus membuat sistim, tapi harus menunggu UU PA, persoalan distribusi harus 70% -30%. Jadi masyarkat sudah tidak lapar lagi. GAM legislatif, sebenarnya yang duduk di legislatif tetap komando di KPA mereka mempunyai Tim ahli, tapi banyak GAM eksekutif yang bandit.

Harapan GAM legislatif adalah perhatikan masyarkat Aceh yang ada di Aceh, jangan atasnamakan kelompok, individu.

Dana rekontruksi konflik

Mantan-mantan GAM ada yang senang ada yang susah, saya harus mengancam itulah untuk dapat hak. Kita masih melihat seperti kemarin, rumah-rumah atap rumbia, masak masih dengan kayu. Kekuatan di Aceh ini yang lebih ditonjolkan. Jangan ada babinsa, sukuplah polisi sipil.

Nama : (Tauke Suum)
 Umur : 40 tahun
 Alamat : Desa Raja Tuha, Kec. Mayak Payet, Kab. Aceh Tamiang
 Pekerjaan : Ketua Partai Aceh, anggota DPRD,
 Keterlibatan konflik : Pemasok senjata untuk GAM
 Wawancara : 16 Agustus 2009
 Kategori keterlibatan : Panglima GAM daerah Langsa
 Wilayah : Daerah Abu-abu

Keterlibatan dalam GAM

Saya tahun 1990 berangkat ke Malaysia, yang ada dalam hati saya merubah nasib, karena di sini kita tidak ada pekerjaan. Merantau waktu itu bukan karena GAM. Sebagian orang Aceh berduyun-duyun kerja di Malaysia pada tahun-tahun 1990. orang-orang Aceh berduyun-duyun ke Malaysia, anak perempuan tua-muda, ditangkap oleh tentara Malaysia karena dianggap migran gelap. Saya baca dikoran-koran kok nda seperti biasanya, orang yang datang ke Malaysia biasanya anak musa yang mencari kerja, ini kok jumlahnya banyak dan banyak anak-anak, ibu-ibu bahkan ibu hamil, orang tua datang ke Malaysia. Mereka ditangkap.

Waktu kami datang untuk menemui orang-orang ini kami tidak dikasih masuk, kami datang sampai tiga kali. Baru datang ke tiga kali kami dikasih masuk. Kami tanya kok disini? Dia bilang daripada kita mati di Aceh, biarlah mati disini. Taulah orang Aceh malam diambil pagi tinggal nama, mana ada yang dibuang dikarung goni, dibuang di perbatasan, istri diperkosa, dibunuh ditaruh di tepi jalan. Bila bapaknya dicurigai bapak ditangkap anaknya juga ditangkap, kena pukul istrinya. Rumah dibakar buat kita ketakutan, jadi itulah

Hal ini buat saya berpikir negara kok bunuh seperti ini. Itulah yang menyayat hati, itulah yang buat sayadendam dan berpikir bergabung dengan GAM. Kami lebih baik mati, kita sudah diinjak-injak harkatnya.

Pada mulanya saya masuk GAM ingin menuntut keadilan, sampai beberapa waktu kita mau tidak mau harus punya negara sendiri, karena pusat nda bisa merespon.

MoU Helsinki

Laksanakan MoU, yang 70% - 30%, kalau itu sudah tercapai maka baguslah. Sekarang baru 60% dilaksanakan, dan juga syarat Islam harus dilakukan. Kita tunggu bagaimana UU PA. Kita revisi UU PA utamanya syariaat.

LAMPIRAN

Bendera GAM



Sumber Dokumen pribadi





Panglima GAM daerah Gunung Masjid, Mayakpayet, Aceh Tamiang, M. Husen Puteh dengan Peneliti saat wawancara, tanggal 10-Agustus 2009



Salamah korban konflik yang mengalami trauma di dusun Selemahmudah, desa Nursalam.kec. Peurlak kab. Aceh Timur



Tempat menuju "daerah hitam" konflik antara Jawa dan Aceh, daerah Alur Minyak



Rumah tinggal para korban konflik etnis Jawadi daerah Alur Meku akibat pembakaran



Muhammad Yatim Usman, Panglima Wilayah Lhoksuemawe, dengan peneliti se usai wawancara



Penulis dengan narasumber Warni (etnis Jawa korban konflik GAM) di Alue Megu,

Tabel 1. DATA SINGKAT NANGGROE ACEH DARUSSALAM

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah		Penduduk							Jumlah Kecamatan	Jumlah Mukim	Jumlah Gampong	Jumlah Kelurahan	Jumlah Gampong Kelurahan	PNS		Penduduk /PNS (7/17)
		(Km ²)	%	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	% NAD	Desiti (7/3)	% Miskin 1	Miskin (10*7)						Jumlah 2	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Aceh Selatan	3851,69	6,60	95.407	101.973	197.380	4,67	51,25	59,29	117.027	16	43	232	10	242	3.617	4,64	55
2	Aceh Tenggara	4189,26	7,18	86.257	87.230	173.487	4,11	41,41	84,56	146.701	16	36	352	1	353	3.658	4,69	47
3	Aceh Timur	6040,60	10,38	167.803	166.919	333.822	7,91	66,28	60,36	201.496	21	48	482	1	483	7.766 ³	9,94	43
4	Aceh Tengah	4315,14	7,39	73.329	71.820	145.149	3,44	33,64	42,01	60.977	14	19	226	2	228	3.891	4,99	37
5	Aceh Barat	2927,95	5,02	87.570	89.018	176.588	4,18	60,31	41,37	73.054	11	33	314	7	321	3.960	5,08	45
6	Aceh Besar	2969,00	5,09	152.377	144.184	296.541	7,02	99,88	29,27	86.798	22	68	596	5	601	7.032	9,01	42
7	Pidie	3430,98	5,88	238.749	272.325	511.074	12,10	148,88	55,78	285.128	30	128	928	29	955	9.295	11,92	55
8	Aceh Utara	3236,88	5,54	237.914	233.641	471.555	11,17	145,88	44,38	209.276	22	58	851	2	853	6.917	8,87	68
9	Simeulue	2051,48	3,51	36.102	37.581	73.683	1,76	35,92	78,26	56.191	8	11	135	0	135	1.443	1,85	51
10	Aceh Singkil	3608,00	6,18	75.072	72.575	147.647	3,50	40,92	64,01	94.509	15	24	194	0	194	1.820	2,48	77
11	Bireun	1901,22	3,28	169.767	182.068	351.835	8,33	185,08	46,24	162.889	17	70	560	2	562	6.310	8,09	58
12	Aceh Barat Daya	2334,01	4,00	57.561	60.173	117.734	2,79	50,44	58,75	69.169	6	20	131	1	132	1.893	2,43	62
13	Gaya Lues	5719,57	9,80	51.332	58.524	109.856	2,60	19,21	88,15	94.641	11	11	96	1	97	1.084	1,39	101
14	Aceh Jaya	3817,00	6,54	45.070	36.397	83.467	1,98	21,87	44,79	37.385	6	21	172	0	172	1.157	1,48	72
15	Nagan Raya	3826,00	6,73	61.809	61.775	123.384	2,92	31,41	59,62	73.562	5	27	222	0	222	2.135	2,74	58
16	Aceh Tamiang	1939,72	3,32	116.418	114.352	230.770	5,47	118,97	47,72	110.123	12	27	211	1	212	2.534	3,25	91
17	Bener Meriah	1457,34	2,50	58.219	59.202	117.421	2,78	80,57	43,28	50.820	7	12	232	0	232	1.825	2,08	72
18	Banda Aceh	61,38	0,11	112.359	110.015	222.374	5,27	3.624,09	2,77	6.160	9	17	70	20	90	5.805	7,19	40
19	Sabang	153,00	0,26	14.078	13.317	27.395	0,65	179,05	19,02	5.211	2	7	0	18	18	1.530	1,96	18
20	Lhokseumawe	181,06	0,31	92.884	88.781	181.665	4,30	1.003,34	32,53	59.098	4	9	60	6	66	1.911	2,45	95
21	Langsa	262,41	0,45	64.769	64.657	129.426	3,07	493,22	42,93	55.583	3	6	45	6	51	2.733	3,50	47
Total		68.375,93	-	2.094.746	2.127.508	4.222.251	-	71,81⁴	49,58	2.055.671	267	693	6.107	112	6.219	78.006	-	69

Dotih Rhamdan, T. Voerza; Sebagian Besar Data dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NAD 2007-2012

1 BPS

2 Sumber : Biro Kepegawaian SETDA Prov. NAD

3 Penormaan PNS Kabupaten Aceh Timur Akhir Tahun 2007

4 Non Kotamadya

SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN (TAHUN II)

Penelitian tentang Konflik Vertikal dan Horizontal pada masyarakat Aceh merupakan lanjutan dari penelitian Tahun Pertama yang berjudul *Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) : Memory Collective Masyarakat Aceh Tentang Konflik GAM - RI*. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian-penelitian tentang konflik di Aceh sebelumnya dimana pada penelitian-penelitian ini lebih menekankan pada paradigma masyarakat Aceh dengan menggunakan ingatan sosial tentang konflik antara GAM dan pemerintah RI. Pada tahun pertama penelitian ini menghasilkan : (1) Pemetaan terhadap konflik GAM-RI yang terbagi menjadi dua yaitu konflik vertikal dengan isu yang ada pada masyarakat tentang distribusi ekonomi dan politik yang belum terasakan oleh masyarakat Aceh dan dipahami sebagai bentuk ketidakadilan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan konflik horizontal yang muncul setelah MoU Helsinki yang berkembang di dalam masyarakat Aceh sendiri (2) Konflik yang berkembang menumbuhkan rasa solidaritas sosial untuk bergerak dan membentuk adanya tujuan bersama dalam bentuk nation imajiner tentang "Pemerintah Aceh yang Merdeka", pembentukan nilai ke-Acehan yang ada pada masyarakat Aceh dibentuk oleh pemahaman kesejarahan dan pemahaman nilai-nilai adat Aceh.

Berdasarkan temuan data pada tahun pertama di lapangan perlu kajian lebih lanjut pada Tahun ke II dengan masih mempertahankan paradigma masyarakat Aceh. Dengan demikian hasil penelitiannya merupakan "*Suara dari Rakyat Aceh*" tentang apa yang mereka pahami tentang konflik yang mereka rasakan dan mereka alami. Adapun target penelitian tahun II adalah 1. Mencoba mengidentifikasi bentuk konflik vertikal dan konflik horizontal pasca perdamaian. 2. Mencoba menganalisis konflik vertikal dan konflik horizontal dengan paradigma masyarakat sebagai bentuk pemahaman masyarakat Aceh. 3. Secara umum hasil pendokumentasian mengenai ingatan sosial masyarakat Aceh dapat dijadikan sebagai sumber untuk pembuatan kebijakan strategi alternative bagi penyelesaian konflik sosial laten di Aceh yang sampai sekarang belum dapat diselesaikan secara tuntas.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 merupakan upaya untuk mengakhiri konflik yang telah terjadi di Aceh selama lebih dari 30 tahun. Proses awal dari perdamaian ini tampaknya berjalan dengan lancar dan baik. Secara umum situasi keamanan di sebagian besar wilayah Aceh menunjukkan kondisi yang aman. Penarikan pasukan non-organik TNI-POLRI dan penyerahan senjata oleh para gerilyawan GAM berdampak pada berkurangnya kontak senjata. Namun demikian kondisi ini tidak secara langsung menghilangkan segala bentuk konflik di Aceh pasca perdamaian.

Proses perdamaian ini masih harus menempuh perjalanan panjang. Beberapa permasalahan pasca perdamaian, dengan kecenderungan baru dengan munculnya garis konflik yang bergeser dari permasalahan serta garis konflik dari bentuk vertikal ke bentuk horizontal. Fokus permasalahan pasca perdamaian berkisar pada pemerintahan dan tata pemerintahan di Aceh. Munculnya konflik ini berdampak terhadap friksi-friksi sosial kemasyarakatan dan politik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, serta friksi yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri, baik secara intra maupun antar masyarakat Aceh.

Realita di lapangan menunjukkan, masih adanya peristiwa ketegangan setelah 4 tahun perjanjian Helsinki yaitu beberapa peristiwa besar seperti penculikan dan pembunuhan misalnya di sepanjang Pantai Timur Aceh dari Banda sampai ke Langsa, Aceh Timur. Pada umumnya penculikan, perampokan, dan pembunuhan mempunyai motif dasar yaitu ekonomi. Permasalahan ketidaksiapan sebagian para mantan kombantan GAM untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga muncul banyaknya pengangguran yang memicu k tindak kriminal. Masih beredarnya senjata ilegal juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tindak kriminal. Kasus-kasus yang terjadi termasuk tindak kriminal, bukan aksi protes politik yang tidak setuju dengan perdamaian. Setelah dilakukan interograsi, para pelaku adalah mantan combantan Aceh Merdeka (GAM). Namun ini mengindikasikan munculnya bentuk-bentuk ketegangan dan konflik di masyarakat.

Selain munculnya tindak kriminal, “perdamaian” anatar GAM-RI memicu munculnya permasalahan baru yang berskala nasional maupun lokal. Agenda penyelesaian konflik yang tertuang dalam MoU Helsinki masih belum sepenuhnya dilaksanakan dan beberapa poin isi MoU masih menimbulkan ketidakpuasan dari kedua belah pihak, GAM-RI. Tarik menarik inilah yang kemudian berimplikasi tidak hanya di tingkat nasional, namun menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan baru di tingkat lokal. Isu nasional masih berkisar pada distribusi ekonomi dan politik yang masih simpang siur, sedangkan isu lokal yang ada seperti permasalahan Pelanggaran HAM, proses rekonstruksi dan rehabilitasi korban konflik, reintegrasi tentara GAM, penyelenggaraan sistem pemerintah Aceh sesuai Undang-Undang Pemerintah Aceh, tranformasi GAM dari gerakan militer kepada gerakan politik, dan pembentukan partai lokal. Di samping itu masih ada isu terakhir yang merebak, yaitu isu pemekaran provinsi Aceh menjadi tiga provinsi (Aceh-ALA-ABAS)

Beberapa permasalahan yang muncul pasca perdamaian merupakan permasalahan lama yang terus bergulir pada saat konflik kekerasan sampai konflik pasca perdamaian, yaitu dua pihak yang berseberangan antara GAM dan Pemerintah Pusat di Jakarta. Kondisi ini menjadi semakin komplek dengan meningkatnya partisipasi politik masyarakat sipil dalam konflik vertikal, dalam konteks desentralisasi dan “pemerintahan sendiri” untuk Aceh.

Konteks konflik horisontal, beberapa konflik yang muncul antara lain munculnya pengelompokan dengan paradigma korban konflik di dalam masyarakat Aceh menjadi kelompok elite GAM, mantan combantan, millisi anti GAM, dan masyarakat sipil. Proses penyelesaian pelanggaran HAM, reintegrasi anggota GAM, demiliterisasi mantan tentara GAM (Tentara Aceh/ TA), rekontruksi, dan rehabilitasi konflik terutama yang berkaitan dengan dividen perdamaian berupa distribusi dana kompensasi, Transformasi GAM dari gerakan bersenjata menjadi gerakan politik sebagai partai politik lokal dan persaingan partai-partai lokal di Aceh dengan partai politik nasional. Selain itu isu pemekaran Aceh menjadi tiga provinsi yaitu Provinsi ALA (Aceh Lauser Antara), Propinsi ABAS (Aceh Barat Selatan) dan Provinsi Aceh. Dualisme sistem pemerintahan yang ada di Aceh yaitu sistem pemerintahan berbasis syariat yang termaktub dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa *platform* perjuangan GAM sekarang bukan persoalan merdeka untuk melepaskan diri dari Indonesia tetapi bagaimana mengisi perdamaian dengan apa yang mereka yakini sebagai *self government* seperti yang mereka sebut dalam

... bahwa di bidang pembangunan masih banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian-penelitian yang bersifat deskriptif mengenai keadaan masyarakat dan pembangunan di berbagai daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keadaan masyarakat dan pembangunan di berbagai daerah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di berbagai daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat di masing-masing daerah.

... Selain itu, perlu diadakan penelitian-penelitian mengenai pembangunan di berbagai daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keadaan masyarakat dan pembangunan di berbagai daerah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di berbagai daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat di masing-masing daerah.

... Beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah adalah sebagai berikut: (1) kurangnya sarana dan prasarana, (2) rendahnya tingkat pendidikan, (3) terbatasnya lapangan kerja, (4) rendahnya pendapatan per kapita, (5) rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, (6) rendahnya tingkat kesadaran politik masyarakat, (7) rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, (8) rendahnya tingkat kesadaran lingkungan masyarakat, (9) rendahnya tingkat kesadaran sosial masyarakat, (10) rendahnya tingkat kesadaran budaya masyarakat.

... Untuk itu, diperlukan kebijakan yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat di masing-masing daerah. Kebijakan yang diperlukan adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan sarana dan prasarana, (2) meningkatkan tingkat pendidikan, (3) meningkatkan lapangan kerja, (4) meningkatkan pendapatan per kapita, (5) meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, (6) meningkatkan tingkat kesadaran politik masyarakat, (7) meningkatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat, (8) meningkatkan tingkat kesadaran lingkungan masyarakat, (9) meningkatkan tingkat kesadaran sosial masyarakat, (10) meningkatkan tingkat kesadaran budaya masyarakat.

... Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di berbagai daerah masih memerlukan kebijakan yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat di masing-masing daerah.

tahap-tahap perundingan di Helsinki. Para elite GAM yang ada di Indonesia seperti Malik Mahmud, Zakaria Zaman, dan Zaini Abdullah tidak (belum) memberikan stemen yang tegas apakah mereka akan memerdekakan Aceh dari Republik atau tidak. Secara politik kemerdekaan Aceh bukan lagi sebagai *platform* bagi GAM, apalagi setelah GAM mentransformasikan diri dari gerakan bersenjata ke gerakan politik.

Arah gerakan politik GAM sekarang adalah pemulihan hak-hak ekonomi dan politik rakyat Aceh, sebagai gerakan untuk membuat masyarakat Aceh kembali bermartabat dan berdaulat atas diri mereka sendiri. Dengan demikian isu perjuangan GAM sekarang lebih pada *platform* keadilan dan kesejahteraan rakyat Aceh.

Aceh selama ini banyak dilihat dari kacamata Indonesia, mungkin perlu ada pembalikan cara pandang yaitu bagaimana Aceh melihat Indonesia, sebagai perubahan bentuk sudut pandang dari asumsi dominasi Indonesia kepada asumsi akomodasi oleh Indonesia. Bagaimana orang Aceh memaknai Indonesia, memaknai hidup bersama dalam satu *platform* Indonesia dan apakah yang sebetulnya cita-cita yang ingin dicapai lewat ke-Indonesia-an bersama warga Indonesia lainnya.

Dengan demikian fenomena konflik yang ada pada masyarakat Aceh pasca perdamaian berkisar pada permasalahan distribusi politik dan ekonomi antara Aceh dan Jakarta yang masih menjadi konflik utama dan di saat yang bersamaan juga muncul permasalahan konflik baru berupa distribusi politik dan ekonomi ke tingkat lokal di dalam masyarakat Aceh.

... yang merupakan bagian dari ...
... yang merupakan bagian dari ...
... yang merupakan bagian dari ...
... yang merupakan bagian dari ...

... yang merupakan bagian dari ...
... yang merupakan bagian dari ...
... yang merupakan bagian dari ...
... yang merupakan bagian dari ...

... yang merupakan bagian dari ...
... yang merupakan bagian dari ...
... yang merupakan bagian dari ...
... yang merupakan bagian dari ...

... yang merupakan bagian dari ...
... yang merupakan bagian dari ...
... yang merupakan bagian dari ...
... yang merupakan bagian dari ...

**DAFTAR NARA SUMBER DAN DATA PRIBADI
NARA SUMBER**

A. Wilayah Louksumawe Kab. Aceh Utara

No	Nama	Tempat/ Tgl lahir	Alamat	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1	Tengku Rusli Kana	Tanjung Rin, Kec Payo Bakong Aceh Utara, th 1970	Lhokseumawe	SMP	Penyair, sastrawan	Masyarkat Sipil
2	Surya Dharma	Pangkalan Brandan, 29 Mei 1974	Lhokseumawe	SMA	Programer Radio Sappa	Masyarakat Sipil
3.	Ardi Armansyah, S PT	Louksumawe , 20 Oktober 1968	Lhokseumawe	Sarjana	Direktur Radio Sappa	Masyarakat Sipil
4.	Teuku Mohamad Yatim Usman	Lhokseumawe , 29-12-1966	Lhokseumawe, Hagu Barat Laut	Sarjana (Accounting)	Panglima Wilayah Ulee sago	Anggota DPRD

B. Wilayah Aceh Tamiang

No	nama	Temp/tgl	Almt	pendidikan	pekerjaan	keterangan	Tgl wawancara
1	M Husein Putih	65 th/	Gunung Mesjid, Kec. Meyekpayet, Aceh Tamiang	SD	petani	Penglima Gunung Mesjid	10-8-09
2.	Marliah	50 th	Gunung Mesjid, Kec. Meyekpayet, Aceh Tamiang	SD	petani	Istri panglima/GAM wanita	10-8-09
3	Teuku D.A Rahman	Simpang Ulim, Kedai Tua th 1940	Matang Ara kec. Mayekpayet, Aceh Tamiang	SD	Veteran	Panglima Ule sago (bagian Sipil GAM- pendanaan)	11-8-09
4	Citro	Sukoharjo, th 1943	Beteng Anyak		Mantan kepala desa- 1974 (Geucik	Simpatisan GAM etnis Jawa	11-8-09
5	Ismuha Sabi	Lhokseum awe	Raja Tuha, Mayekpayet	SMP	petani	Mantan Combatan GAM	15-8-09
6.	Zainudin Sabe	68 th	Raja Tuha, Mayekpayet	SD	Mantan Kepala Desa	Simpatisan GAM	15-8-09
7	H. Ahmad Hasan (Ahmad Stain)	Samalanga Kab. Bireun kab. Aceh Utara Lama., 80 th	Raja Tuha, Mayekpayet	SD	*Mantan Kepala Desa (Geucik) *Veteran	Simpatisan GAM	15-8-09

C. WILAYAH LANGSA

No	Nama	Tmpt/tgl	Almt	pendidikan	pekerjaan	keterangan	Tgl wwncr
1	Abdullah Hanafi/ Tauke Suum	Langsa th 1969	Matang Situ Langsa Timur	STM/Mahasiswa Universitas Medan	*Anggota DPRD Langsa *Ketua Umum Partai Aceh *KPA (KOMisi Peralihan Aceh)	Panglima Wilayah Langsa	11-8-09
2	M. Sufi	-(generasi muda)	Matang Situ, Langsa Timur	-	Anggota Komisi Peralihan Aceh	Anggota GAM angkatan Baru	11-8-09
3	Siswanis Manaf	55 tahun	Raya Berjuk Tunong Langsa	Sarjana	Guru	Masyarakat sipil	
4	Zainal Abidin	30 tahun	Kuala Langsa	SMA	Nelayan	Anggota GAM (penyalur logistic)	15-8-09
5	Muhamad Hanafiah	30 tahun	Kuala langsa		*Kepala lorong (dusun) *nelayan	Anggota GAM (penyalur logistic)	15-8-09
6	Samsul	27 tahun	Kuala Langsa	SMA	*Nelayan	Panglima Operasi	15-8-09
7	Hermansyah Yusuf	34 tahun	Kuala Langsa	SMP	nelayan	Anggota GAM (penyalur logistic)	15-8-09
8	Syarifah	30 tahun	Langsa Raya	Sarjana	LSM	Masyarakat Sipil	18-8-09

D. Wilayah Kec. Bireun, Aceh Timur

No	nama	Tmpt/tgl	Almt	pendidikan	pekerjaan	keterangan	Tgl wwncr
1.	Ramlah Rani	Cot Mancang, Bireun Bayeun, 31-12- 1964	GP Bayeun, Kec. Biren Bayeun Aceh Timur	SD	Buruh karet	Korban konflik GAM dari pihak GAM/ istri anggota GAM	15-8-09
2	Aminah	45 tahun	Langsa Raya	SMA	LSM Sheep Foundation	Masyarakat sipil/ keluarga korban	18-8-09

E. Wilayah Kec. Peurlak, Aceh Timur

No	nama	Tmpt/tgl	Almt	pendidikan	pekerjaan	keterangan	Tgl wwncr
1.	Salamah	50 tahun	Selemahmudah Nursalam, Kec. Nursalam Peurlak	-	Ibu rumah tangga	Simpatian Gam/ Korban TNI	16-8-09
2.	Hasan Ibrahim	59 tahun	Selemahmudah Nursalam, Kec. Nursalam Peurlak	-	Petani (nderes Karet)	Simpatian GAM	16-8-09
3.	Maryani	Dusun Pengajian Sinebuek Tuha II, Peurlak, tahun 1977	Dusun Pengajian Sinebuek Tuha II, Peurlak	SD		Inong Bale	17-8-09
4.	Lindawati		Dusun Pengajian Sinebuek Tuha II, Peurlak			Inong Bale	14-8-09
5.	Nurgayah		Dusun Pengajian Sinebuek Tuha II, Peurlak			Inong Bale	14-8-09

F. Wilayah Idi Rayek

No	nama	Tmpt/tgl	Almt	pendidikan	pekerjaan	keterangan	Tgl wwncr
1	Karnani	45 tahun	Sigli (Pidie)	-	Penjual Nasi	Keluarga korban TNI	16-8-09
2	Muhamad Amin Hasan	50 tahun	Desa Monmut Sigli (Pidie)	-	Penjual duren	Masyarkat Sipil	18-8-09

G. Wilayah KotaCane

No	nama	Tmpt/tgl	Almt	pendidikan	pekerjaan	keterangan	Tgl wwncr
1	Sulaiman Sekedang	Kota Cane, 5 Maret 1954	Kota Cane	SMA	pedagang	Masyaraka: Sipil	19-8-09
2							

H. Beyeun, Bireun. Alur Mekong

No	nama	Tmpt/tgl	Almt	pendidikan	pekerjaan	keterangan	Tgl wwncr
1	Legiyem	50 Tahun	Alu Gading, Alur Mekong Bireun	SD	petani	Masyarakat Sipil/korban konflik	13-8-09
2	Suparno	54 tahun	Alu Gading, Alur Mekong Bireun	SD	petani	Masyarakat Sipil/korban konflik	13-8-09

H. Pihak TNI

No	nama	Tmpt/tgl	Almt	pendidikan	pekerjaan	keterangan	Tgl wwncr
1	Praka Seriono	Medan, 5- 11-1969	Koramil 07 Peurlak	SMA	TNI	Bertugas di Peurlak	12-8-09
2	Serka Ruslan	Trienggading Pidi, 31-3- 1960	Koramil Pedawa Idi	SMA	TNI	*TNI * orang Aceh	12-8-09
3	Pratu Mukmin	Idi Cot, 5 -4- 1981	Koramil pedawa Idi	SMA	TNI	*TNI * orang Aceh	12-8-09